

**PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**T E S I S**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**MOHAMMAD IQBAL BHARATA**  
L4D 001 205



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2 0 0 3**

**PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

MOHAMMAD IQBAL BHARATA  
L4D001205

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal Mei 2003

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Mei 2003

Pembimbing Pendamping

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Pembimbing Utama

Ir. Bambang Setioko, M.Eng

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

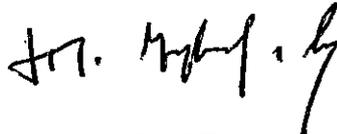


Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Mei 2003



**MOHAMMAD IQBAL BHARATA**  
NIM L4D001205

*"Aku hendak menawarkan suatu amanah kepadamu sekalian, bumi, langit, gunung, samudera dan hewan"*

*(QS Al Ahzab: 72)*

*Alam diciptakan Allah untuk kepentingan manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan telitilah hukum-hukum yang ada didalamnya agar kita mengetahui yang tersembunyi didalamnya.*

**Tesis ini kupersembahkan untuk:**

Bangsa di negeri ku yang sedang tercabik derita nan dirundung malang, semoga kita dapat merangkai kembali keping-keping kejayaan masa silam. Buat Ayahanda Surya yang selalu membimbingku, Bunda Rosmiaty yang memberikan semangat dan restu, Adikku Buleun yang manja, dan istriku tercinta Rita Mutia yang selalu setia mendampingiku beserta calon bayiku dalam kandungannya.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dipanjatkan hanya untuk Allah SWT yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin-Nya tesis ini dapat diselesaikan dan salawat kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang memimpin umat untuk mereformasi kondisi keimanan kita.

Tesis yang berjudul **“Peranan Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar”** dibuat sebagai syarat untuk mengakhiri tugas belajar pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Pemilihan topik ini didasari pada pemikiran tentang pemindahan ibukota Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1984 dari Banda Aceh ke Kota Jantho. Untuk itu, penulis mencoba meneliti keadaan ini dari aspek spasial agar mengetahui peranan suatu kota setelah menjadi ibukota kabupaten terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar.

Keberhasilan pengerjaan dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, dan karenanya penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. Ir. Sugiono Sutomo, DEA selaku Ketua Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ir. Bambang Setioko, M. Eng selaku Pembimbing I dan Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku Pembimbing II dengan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan tesis ini.
3. Ir. Fajar Hari Mardiansyah, MT, MDP selaku pembahas dan Ir. Ragil Haryanto, MSP selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan bagi kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh dosen yang mengampu mata kuliah pada Program MPPWK, UNDIP.
5. Kepala Pusdiktek Departemen Kimpraswil, dan seluruh staf BKPMMD yang telah memberikan pendanaan terhadap penulis dalam studi ini.
6. Bupati Aceh Besar yang memberi izin untuk mengikuti studi di MPPWK UNDIP.
7. Para pimpinan dan staf Kantor Bupati, Bappeda, dan BPS Kabupaten Aceh Besar yang membantu penulis untuk mendapatkan data-data bagi penelitian ini.
8. Istri tercinta, Ibunda dan Ayahanda terkasih serta Adikku tersayang yang selama ini memberi dorongan semangat, penuh kerelaan dan pengertian yang mendalam.
9. Teman-teman kuliah MPPWK angkatan pertama Universitas Diponegoro Semarang dengan kekompakannya serta saling menolong.
10. Haryadi dan Bobby sebagai *a good supporting staff*. Fahruzi, Babe Hanif, Ai Bakong, Mbak Lina, Nina dan Bang Ridwan di saat-saat akhir. Bang Sauki dan Bang Yan atas segalanya. Junaidi, Mirza dan Muklis teman baik dalam memburu data.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima sebagai masukan berharga dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga penyusunan tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2003

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	9
1.4 Ruang Lingkup .....	10
1.4.1 Ruang Lingkup Subtansial.....	10
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	11
1.5 Keterbatasan Studi .....	11
1.6 Kerangka Pemikiran .....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II    PERANAN KOTA TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH .....</b>	<b>17</b>
2.1 Fungsi-Fungsi Kota .....	17
2.1.1 Pengertian Serta Fungsi Kota dan Perkotaan.....	17
2.1.2 Kota sebagai Pusat Administrasi Pemerintahan .....	19
2.1.3 Kota sebagai Pusat Pertumbuhan.....	21
2.1.4 Pengertian dan Fungsi Kota Baru .....	22
2.2 Wilayah dan Perkembangan Wilayah .....	24
2.2.1 Konsep Ruang dan Wilayah .....	24
2.2.2 Pertumbuhan Wilayah.....	27
2.3 Kedudukan Kota dalam Perkembangan Wilayah.....	29
2.3.1 Kota dalam Wilayah .....	29
2.3.2 Pengembangan Wilayah .....	31
2.3.3 Peran Kota dalam Pengembangan Wilayah.....	34
2.4 Kesimpulan Kajian Pustaka.....	37
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Pendekatan Studi.....	42

3.2	Teknik Analisis.....	43
3.3	Data yang Digunakan.....	49

#### **BAB IV KARAKTERISTIK WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

	<b>KOTA JANTHO .....</b>	<b>53</b>
4.1	Kajian Umum Wilayah Kabupaten Aceh Besar .....	53
4.1.1	Kondisi Fisik Alam.....	56
4.1.2	Kependudukan .....	57
4.1.2.1	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Jenis Kelamin	57
4.1.2.2	Kelompok Umur .....	62
4.1.2.3	Angkatan Kerja dan Jenis Pekerjaan .....	62
4.1.3	Fasilitas .....	63
4.1.3.1	Fasilitas Peribadatan .....	63
4.1.3.2	Fasilitas Pendidikan .....	67
4.1.3.3	Fasilitas Kesehatan .....	68
4.1.3.4	Fasilitas Pertanian dan Perikanan .....	68
4.1.3.5	Fasilitas Perindustrian dan Perdagangan .....	69
4.1.3.6	Fasilitas Sarana dan Prasarana.....	70
4.1.3.7	Fasilitas Ekonomi .....	72
4.1.4	Perekonomian .....	72
4.1.4.1	Pertumbuhan Ekonomi .....	72
4.1.4.2	Produk Domestik Regional Bruto.....	73
4.2	Kajian Karakteristik Kota Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten.....	74
4.2.1	Sejarah Pertumbuhan Kota .....	75
4.2.2	Gambaran Umum Kota Jantho .....	77
4.2.2.1	Kondisi Fisik Dasar .....	77
4.2.2.2	Kondisi Fasilitas .....	77

#### **BAB V PERANAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR .....**

	<b>KABUPATEN ACEH BESAR .....</b>	<b>79</b>
5.1	Perkembangan Sistem Kota-Kota.....	79
5.1.1	Analisis Hierarki Sistem Kota-Kota .....	80
5.1.2	Kecenderungan Perubahan Hierarki Kota Jantho.....	87
5.1.3	Analisis Wilayah Pengaruh Kota Jantho .....	90
5.2	Keunggulan Ekonomi Wilayah.....	96
5.2.1	Tipologi Ekonomi Wilayah Kabupaten Aceh Besar.....	97
5.2.2	Tipologi Ekonomi Sub Wilayah di Kabupaten Aceh Besar ..	102
5.2.3	Analisis Keterkaitan Antar Aktivitas Perekonomian Kota Jantho dengan Kabupaten Aceh Besar.....	113
5.3	Analisis Peranan Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Besar ke Jantho Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar..	122

<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	133
6.1 Kesimpulan .....	133
6.2 Rekomendasi .....	135
DAFTAR PUSTAKA .....	137
LAMPIRAN.....	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	207

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	PDRB Kabupaten Aceh Besar Menurut Harga Konstan Tahun 2000 .....	3
Tabel II.1	Kesimpulan Teori .....	38
Tabel III.1	Data yang Digunakan.....	50
Tabel IV.1	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan .....	54
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Besar .....	61
Tabel IV.3	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha.....	63
Tabel IV.4	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Wilayah Administrasi Tahun 1980.....	64
Tabel IV.5	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Wilayah Administrasi Tahun 1990.....	65
Tabel IV.6	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Wilayah Administrasi Tahun 2000.....	66
Tabel IV.7	PDRB Kabupaten Aceh Besar Menurut Harga Konstan .....	74
Tabel IV.8	Fasilitas di Kota Jantho.....	78
Tabel V.1	Hierarki Kota Tahun 1984, 1990 dan 2000 .....	84
Tabel V.2	LQ Kabupaten Aceh Besar tahun 1984, 1990 dan 2000.....	97
Tabel V.3	Sektor-Sektor Basis tiap-tiap Kecamatan .....	102
Tabel V.4	Klasifikasi Sektor Basis Pada Kecamatan-Kecamatan.....	105
Tabel V.5	Kondisi Tahun 1980.....	113
Tabel V.6	Kondisi Tahun 1990.....	115
Tabel V.7	Kondisi Tahun 2000.....	117

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Propinsi NAD.....	6
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kabupaten Aceh Besar.....	7
Gambar 1.3	Alur Pikir.....	14
Gambar 3.1	Alur Pikir Proses Analisis Data.....	45
Gambar 4.1	Peta Kondisi Konflik Tahun 1999-2000.....	58
Gambar 4.2	Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 1995.....	59
Gambar 4.3	Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2000.....	60
Gambar 5.1	Peta Hierarki Kota-Kota Tahun 1984.....	81
Gambar 5.2	Peta Hierarki Kota-Kota Tahun 1990.....	82
Gambar 5.3	Peta Hierarki Kota-Kota Tahun 2000.....	83
Gambar 5.4	Peta Wilayah Pengaruh Kota Jantho Tahun 1984.....	91
Gambar 5.5	Peta Wilayah Pengaruh Kota Jantho Tahun 1990.....	92
Gambar 5.6	Peta Wilayah Pengaruh Kota Jantho Tahun 2000.....	93
Gambar 5.7	Peta Sektor Basis Tahun 1980.....	107
Gambar 5.8	Peta Sektor Basis Tahun 1990.....	108
Gambar 5.9	Peta Sektor Basis Tahun 2000.....	109
Gambar 5.10	Peta Keterkaitan Antar Aktivitas Ekonomi Tahun 1980 dan 1984.....	110
Gambar 5.11	Peta Keterkaitan Antar Aktivitas Ekonomi Tahun 1990.....	111
Gambar 5.12	Peta Keterkaitan Antar Aktivitas Ekonomi Tahun 2000.....	112
Gambar 5.13	Peta Pergerakan Aktivitas di Kabupaten Aceh Besar.....	121
Gambar 5.14	Peta Kondisi yang Terjadi Akibat Konflik Tahun 1999-2000.....	132

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	Lembar Wawancara .....	142
LAMPIRAN B	Data Fasilitas, Perhitungan Hierarki Kota dan Perhitungan Titik Henti.....	150
Tabel B.1	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1984 .....	151
Tabel B.2	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1985.....	152
Tabel B.3	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1986 .....	153
Tabel B.4	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1987 .....	154
Tabel B.5	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1988 .....	155
Tabel B.6	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1989 .....	156
Tabel B.7	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1990 .....	157
Tabel B.8	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1991 .....	158
Tabel B.9	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1992 .....	159
Tabel B.10	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1993 .....	160
Tabel B.11	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1994 .....	161
Tabel B.12	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1995 .....	162
Tabel B.13	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1996 .....	163

Tabel B.14	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1997 .....	164
Tabel B.15	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1998 .....	165
Tabel B.16	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1999 .....	166
Tabel B.17	Jumlah Fasilitas yang Ada di Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2000 .....	167
Tabel B.18	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1984 .....	168
Tabel B.19	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1985 .....	168
Tabel B.20	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1986 .....	169
Tabel B.21	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1987 .....	169
Tabel B.22	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1988 .....	170
Tabel B.23	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1989 .....	170
Tabel B.24	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1990 .....	171
Tabel B.25	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1991 .....	171
Tabel B.26	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1992 .....	172
Tabel B.27	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1993 .....	173
Tabel B.28	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1994 .....	173
Tabel B.29	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1995 .....	174

Tabel B.30	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1996 .....	174
Tabel B.31	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1997 .....	175
Tabel B.32	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1998 .....	175
Tabel B.33	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 1999 .....	176
Tabel B.34	Perhitungan Skalogram dalam Penentuan Hierarki Kota pada Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2000 .....	176
Tabel B.35	Hierarki Kota-Kota pada Kabupaten Aceh Besar dari Tahun 1984 hingga Tahun 2000 .....	177
Tabel B.36	Perhitungan Titik Henti dari Kota Jantho .....	178
LAMPIRAN C	Data PDRB, Data Tenaga Kerja dan Perhitungan LQ Kecamatan..	179
Tabel C.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha Tahun 1984-1990 .....	180
Tabel C.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha Tahun 1991-1995 .....	181
Tabel C.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Besar Menurut Lapangan Usaha Tahun 1996-2000 .....	182
Tabel C.4	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1984-1990 .....	183
Tabel C.5	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1991-1995 .....	184
Tabel C.6	Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996-2000 .....	185
Tabel C.7	Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Wilayah Administrasi dan Lapangan Usaha Tahun 1980 .....	186

Tabel C.8	Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Wilayah Administrasi dan Lapangan Usaha Tahun 1990 .....	186
Tabel C.9	Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Wilayah Administrasi dan Lapangan Usaha Tahun 2000 .....	187
Tabel C.10	LQ Kecamatan Lhoong Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	188
Tabel C.11	LQ Kecamatan Lhoknga/Leupung Tahun 1980, 1990 dan 2000 ....	189
Tabel C.12	LQ Kecamatan Indrapuri Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	190
Tabel C.13	LQ Kecamatan Seulimeum Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	191
Tabel C.14	LQ Kecamatan Mesjid Raya Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	192
Tabel C.15	LQ Kecamatan Darussalam Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	193
Tabel C.16	LQ Kecamatan Kuta Baro Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	194
Tabel C.17	LQ Kecamatan Montasiek Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	195
Tabel C.18	LQ Kecamatan Sukamakmur Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	196
Tabel C.19	LQ Kecamatan Darul Imarah Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	197
Tabel C.20	LQ Kecamatan Ingin Jaya Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	198
Tabel C.21	LQ Kecamatan Peukan Bada Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	199
Tabel C.22	LQ Kecamatan Pulo Aceh Tahun 1980, 1990 dan 2000 .....	200
LAMPIRAN D	Foto-Foto di Lokasi Penelitian .....	201

## ABSTRAK

*Penetapan Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1984 diharapkan membawa pengaruh terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya. Sebagai pengganti Kota Banda Aceh, Jantho yang berjarak 52 km dari Banda Aceh dan terletak di pedalaman Kabupaten Aceh Besar. Kawasan itu sebelumnya merupakan areal kosong, kemudian menjadi kota baru dengan dibangunnya prasarana perkotaan, terutama sarana pemerintahan, perekonomian, sosial dan pendidikan, maka fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan akan membawa daya tarik terhadap aktivitas ekonomi sehingga Kota Jantho bisa menjadi kota pusat pertumbuhan..*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan studi ini adalah: (1) Identifikasikan perkembangan sistem kota-kota, (2) Identifikasi keunggulan ekonomi wilayah, (3) Tingkat peranan Kota Jantho bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar.*

*Pedekatan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yang nantinya dapat dilihat sistem kota-kota, wilayah pengaruh, perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar dan interaksi aktivitas perekonomian antara Jantho dan Kabupaten Aceh Besar. Aspek ekonomi dipakai untuk melihat pertumbuhan wilayah, yaitu memperhatikan pertumbuhan ekonominya, dimana kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah. Untuk menganalisis penelitian ini digunakan alat analisis skalogram, titik henti, LQ, dan analisis kualitatif.*

*Dari hasil analisis bahwa ditetapkan Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar semenjak tahun 1984 hingga tahun 2000 dapat disimpulkan, Kota Jantho tidak terlalu berperan dalam perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar, karena kondisi sebagai kota orde III dan IV diperkuat dengan jangkauan wilayah pengaruh yang relatif tidak melayani semua wilayah di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Seulimum ada tiga sektor basis pada tahun 1980, kemudian menjadi empat sektor pada tahun 1990 dan 2000 dengan penambahan sektor jasa, ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh keberadaan Kota Jantho, karena aktivitas pemerintahan mulai berpusat di kota tersebut. Sedangkan orde hirarki kota-kota seperti Lhoknga, Lambaro, Peukan Bada, Lampeuneurut, dan Seulimum mempunyai hirarki lebih tinggi dari Kota Jantho, hal ini menggambarkan bahwa aktivitas yang terjadi di Kota Jantho walaupun sudah mengalami pertumbuhan tetapi belum menunjukkan peranan terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi wilayah, secara keseluruhan untuk aktivitas perdagangan dan jasa lebih didominasi oleh Kota Lambaro, Lhoknga, Peukan Bada, dan Banda Aceh sebagai bekas ibukota, yang ternyata masih berlangsung aktivitas masyarakat Aceh Besar di kota ini. Beberapa hal yang menyebabkan fungsi Kota Jantho tidak optimal sebagai pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah terbatasnya sarana dan prasarana transportasi regional Kota Jantho dengan wilayah sekitarnya.*

*Untuk mendukung Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar disarankan adanya pengembangan sarana dan prasarana transportasi seperti angkutan umum dan jalan karena kondisi aksesibilitas menuju Kota Jantho masih kurang optimal, perlunya peran pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendorong penanaman investasi di Kota Jantho, terutama menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menarik investor dan masyarakat, serta diperlukan studi kelayakan ulang terhadap Kota Jantho sebagai pusat pertumbuhan dan Ibukota Kabupaten Aceh Besar.*

*Kata kunci: pusat pertumbuhan, perkembangan wilayah*

## ABSTRACT

*The establishment of Jantho as the capital city of Aceh Besar Regency on 1984, has been expected to give influences to the development of surrounding areas. As the replacement of Banda Aceh, with the distance of 52 Km from the city, Jantho is located on the inland of Aceh Besar Regency. Jantho is the new city which was opened from an empty areas with the development of urban infrastructures especially government facilities, economics, social and educational facilities. These urban facilities development supported Jantho's urban function as the central of administrative governmental activities would brings attractions to the economic activities that enable Jantho as the growth center.*

*The purpose of this research was to explore the roles of Jantho as the capital city to the regional development of Aceh Besar. Objectives on this research consist of: 1) Identification on the development of urban systems, 2) Identification on regional economics competitiveness, and 3) Identification on the level of Jantho City's roles to the regional development of Aceh Besar Regency.*

*Methodology in this research used descriptive method, which would describe the result in the analysis of urban system, regional side-effects, development of Aceh Besar Regency, and the interaction of economic activities between Jantho and Aceh Besar Regency. Economic aspect in regional development was used regarding the economics growth as the main component of regional development subject to economics improvement (Alkadri et al.). Research analysis used Schallogram, Ended point, Location Quotient, and qualitative analysis.*

*The research concluded that from the establishment of Jantho as the capital city of Aceh Besar Regency since 1984 until 2000 did not gave significant roles on the regional development of Aceh Besar Regency, because the condition of Jantho as ordo III and IV city was unable to give services to all areas of Aceh Besar Regency. The basic sectors of Seulum Sub district in 1980 consist of 3 sectors and increases in 1990 and 2000 into 4 sectors which shows the influences of Jantho existence as the center of governmental activities. The urban hierarchy ordo of Lhoknga, Lambaro, Peukan Bada, Lampeuneurut, and Seulum were higher than Jantho Municipality, this could refer to activities happened in Jantho even though increases in growth was unable to give affect to the regional economic growth. The commercial activities of trade and services were dominated by the city of Lambaro, Lhoknga, Peukan Bada and the activities of Aceh Besar peoples remains in Banda Aceh Municipality as the former capital city. Other variables related to the less optimal function of Jantho Municipality as the regional growth center of Aceh Besar Regency, mainly caused by the limited regional transportation infrastructure and facilities of Jantho Municipality to its surrounding.*

*Suggestion to support Jantho as the capital city was the development of transportation infrastructure such as public transportation and roads subject to the less optimal condition of accessibility to Jantho. The improvement of regency's government roles was needed to enable investment in Jantho, especially in creating new work fields to attract investor and community, also further feasibility study to Jantho Municipality as the growth center and the capital city.*

*Keywords: Growth Center, Regional Development*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Aceh Besar terletak pada ujung barat Pulau Sumatera, dengan wilayah yang mengelilingi Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang juga berfungsi sebagai pusat perekonomian. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.947,12 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar 285.925 jiwa. Kabupaten Aceh Besar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dengan Kota Banda Aceh sebagai ibukota pada saat itu.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, memiliki konsekuensi terhadap pemisahan ibukota kabupaten dan kotamadya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1979 Kota Jantho ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar yang baru. Jantho terletak di pedalaman wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang berjarak 52 km dari Banda Aceh, mempunyai hanya satu akses jalan menuju ke jalan negara sepanjang 15 km. Kota Jantho belum berkembang sebagai pusat pertumbuhan perekonomian (wilayah) dan hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pada RTRW Kabupaten Aceh Besar sistem hierarki kota-kota, Jantho merupakan Kota Orde 1 sebagai pusat pelayanan kabupaten.

Artikel Kompas 14 Juni 2002, memuat sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa "*Jantho mirip lokasi jin buang anak...*" sebuah ungkapan yang sifatnya negatif yang pernah diungkapkan ketika Jantho dijadikan ibu kota Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1984. Kala itu banyak orang, terutama pegawai negeri tak mau tinggal di Jantho. Ada satu kesulitan yang dihadapi pemerintah setempat, yaitu engganannya pegawai negeri yang mau menetap di sana meskipun diberi rumah. Alasannya, Jantho terisolasi, jauh dari

pusat pasar, dan alasan lainnya (Kompas, 14 Juni 2002). Kondisi ini dikemukakan oleh masyarakat lewat media massa, dan kenyataan itu terlihat juga pada kondisi lapangan. Dari segi aksesibilitas, dengan hanya satu ruas jalan ke arah Jantho fungsi Kota Jantho sebagai pusat pelayanan tentu saja hanya terbatas kepada penduduk lokal, lokasi transmigrasi, dan urusan-urusan pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.

Wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat dikatakan masih bergantung dengan Banda Aceh. Ketergantungan Kabupaten terhadap Kota Banda Aceh dapat dilihat dengan fungsi Kota Banda Aceh dalam melayani kebutuhan layanan sosial, perekonomian, dan kebutuhan aksesibilitas antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Aceh Besar.

Banda Aceh menjadi tujuan dari masyarakat Aceh Besar dalam melakukan aktivitas perdagangan seperti yang terlihat di Pasar Aceh yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jumlah pedagang 50% merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Besar, dan hampir 45% hasil produksi perternakan dari Kecamatan Seulimum dijual di Pasar Penayong (Dinas Pasar Kota Banda Aceh), pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Banda Aceh (pada tahun 2002 jumlah rumah sakit di Kota Banda Aceh berjumlah 24 buah) dan menjadi rujukan bagi rawatan lanjutan penduduk Kabupaten Aceh Besar; RS Zainal Abidin), perbankan, dan bahkan untuk jasa pelayanan usaha seperti notaris (tahun 2002 tidak tercatat adanya kantor notaris di Kabupaten Aceh Besar), perkantoran dan fungsi-fungsi lainnya.

Kota Jantho jika dilihat dari segi kelengkapan prasarana tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada skala pelayanan seperti Kota Banda Aceh, tetapi hanya berfungsi pada skala pelayanan administrasi pemerintahan. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kota Jantho dalam mendukung aktivitas penduduknya selain gedung-gedung pemerintahan adalah puskesmas, pasar skala lokal, bank cabang pembantu dan pertokoan

yang sebagian belum terisi. Walaupun begitu pengembangan prasarana dan sarana di Kota Jantho oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari pelebaran jalan menjadi dua jalur di Kota Jantho, pembangunan sarana pendidikan dari TK, SD, SMP, SMU dan SMK, pembangunan rumah sakit (belum berfungsi) dan lainnya.

Wilayah Kabupaten Aceh Besar bisa dikatakan sebagai wilayah belakang dari Kota Banda Aceh. Daya tarik Kota Banda Aceh yang kuat, dan pertumbuhan Kota Jantho yang lambat menjadi suatu permasalahan di Kabupaten Aceh besar. Aktivitas penduduk Aceh Besar ke Banda Aceh dapat mengakibatkan mengalirnya sumber daya terutama aktivitas dan modal ke Banda Aceh. Kondisi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar, terutama kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Aceh Besar.

**TABEL I. 1**  
**PDRB KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT LAPANGAN USAHA**  
**TAHUN 2000 ATAS HARGA KONSTAN 1993**

No.	Lapangan Usaha	PDRB 2000 (dalam jutaan rupiah)	Distribusi PDRB (%)
1	Pertanian	144,648.06	33,53
2	Pertambangan dan Galian	16,742.70	3,88
3	Industri Pengolahan	98,541.06	22,84
4	Listrik dan Air Minum	1,554.04	0,36
5	Bangunan Konstruksi	29,388.60	6,81
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	35,953.65	8,33
7	Pengangkutan dan Komunikasi	50,044.02	11,60
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,601.40	1,99
9	Jasa-Jasa	45,921.96	10,64
	Total PDRB	431,395.49	100,00

*Sumber: BPS Kabupaten Aceh Besar*

Berdasarkan distribusi PDRB Kabupaten Aceh Besar yang menjadi sektor terbesar adalah sektor pertanian, diikuti oleh sektor industri pengolahan serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut lebih mengarah ke wilayah utara. Kondisi ini karena industri terbesar berupa pabrik semen ada di Kecamatan Lhoknga/Leupung, industri menengah lebih banyak di Kecamatan Ingin Jaya, Darul Imarah dan Mesjid Raya, sementara untuk perhubungan pelabuhan laut berada di Kecamatan Mesjid Raya dan di Jantho sendiri tidak mempunyai terminal bis, jika melihat pemasaran hasil pertanian, maka Kota Banda Aceh dapat menyediakan sarana pasar yang lebih baik dibandingkan Jantho.

Pemindahan ibukota kabupaten biasanya selalu diikuti dengan pemindahan kegiatan pemerintahan, serta segala bentuk aktivitas yang mendukung jalannya pemerintahan, seperti perizinan, pelayanan publik dan lainnya. Untuk mendukung aktivitas ini dibangun juga sarana dan prasarana berupa fasilitas seperti perkantoran, perumahan pegawai, pertokoan, prasarana transportasi dan fasilitas, lainnya yang mendukung. Pengembangan prasarana ini berarti akan membuka lahan di wilayah lokasi yang dijadikan ibukota pemerintahan tersebut, termasuk membangun wilayah sekelilingnya atau membudidayakan lahan kosong.

Menurut Juoro (1995) peningkatan investasi infrastruktur berarti peningkatan stok modal infrastruktur yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dengan demikian perkembangan infrastruktur selain mendukung perkembangan sektor-sektor lainnya juga secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi sarana dan prasarana di suatu wilayah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berarti mempercepat pertumbuhan wilayah. Dengan dipilihnya ibukota di suatu lokasi, seharusnya akan diikuti juga dengan pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana, yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan wilayah di lokasi ibukota tersebut berada, termasuk juga

wilayah di sekelilingnya. Kelengkapan infrastruktur serta sarana dan prasarana tersebut tentu saja akan dapat menarik aktivitas terutama investasi. Hal inilah yang nantinya akan menjadi pendorong aktivitas perekonomian di suatu wilayah.

Pengertian fungsi suatu kota pusat pemerintahan dilihat adalah pusat administrasi pemerintahan (masyarakat) berupa lokasi perkantoran untuk semua kepentingan-kepentingan khusus (lobi) yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan perorangan maupun kelompok (swasta), anggota legislatif dan kantor pemerintah (Eisner, 1993: 365). Posisi pusat pemerintahan seperti itu akan memperkuat peranan suatu kota dalam kedudukan dalam wilayah administrasi seperti kabupaten, propinsi dan negara. Kuat pengaruh ini disebabkan adanya kekuasaan yang menjalankan tugas di kota tersebut, sehingga hal-hal yang mempengaruhi kebijakan terhadap wilayah termasuk program pembangunan dipusatkan dilakukan di ibukota.

Faktor kedekatan dengan pusat kekuasaan sering menjadi salah satu pertimbangan bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan usahanya di wilayah ibukota, dengan alasan memperpendek rentang birokrasi. Fenomena ini berlaku pula di Indonesia, karena keberadaan pemerintahan sangat erat mempengaruhi kondisi perekonomian, termasuk antara penguasa, dan pelaku ekonomi. Dengan kondisi tersebut, ibukota akan menyerap sumber daya wilayah sehingga terjadi pemusatan pembangunan di kota tersebut. Sebagai pusat pemerintahan akan berfungsi juga menjadi pusat pertumbuhan, karena kota sebagai pusat pertumbuhan tidak saja merupakan tempat pemusatan fasilitas, namun lebih dari itu kota merupakan pemukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat di wilayah-wilayah belakangnya (Glasson, 1983: 133).

SELAT MALAKA



Peta Indonesia



  
 PROGRAM PASCA SARJANA  
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 WILAYAH DAN KOTA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

---

**TESIS**

PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
 KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
 WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

PETA  
 PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

LEGENDA

- BATAS KABUPATEN/KOTA
- - - BATAS PROPINSI
- IBUKOTA PROPINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- JALAN
- SUNGAI
- DANAU

SUMBER :  
 BAPPEDA PROPINSI NAD

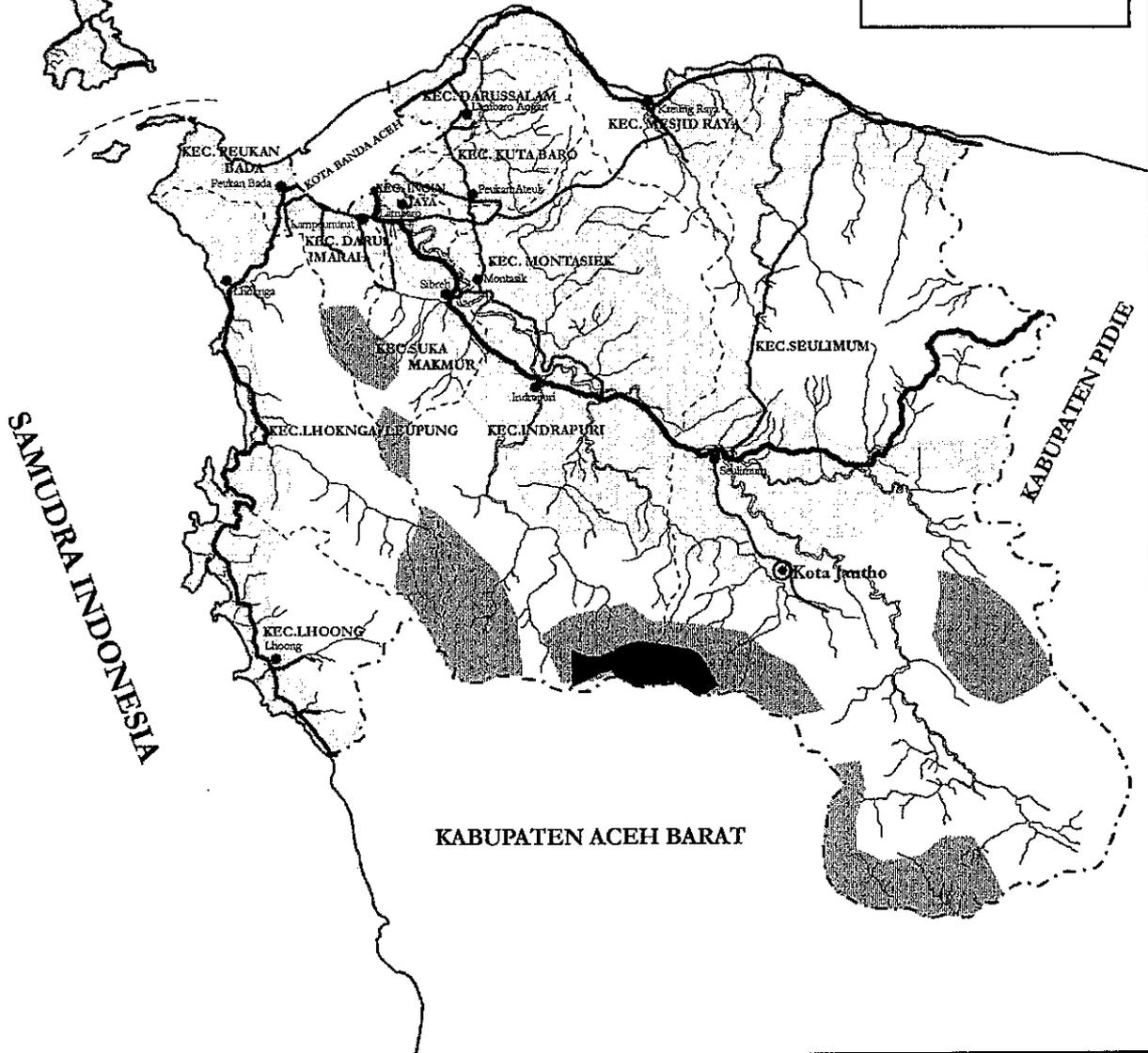
TANPA SKALA



 UTARA	NO. GAMBAR	NO. HAL
	1.1	6

# SELAT MALAKA

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam



## PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ACEH BESAR

Sumber :  
BAPPEDA KABUPATEN ACEH BESAR

  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

---

**TESIS**

---

PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

**LEGENDA**

- Batas Perairan
- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten

**KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT**

- 0 - 200 m
- 200 - 450 m
- 450 - 1000 m
- 1000 - 1500 m
- Lebih tinggi dari 1500 m

**SKALA**

NUMERIK	GARIS	
1 : 500.000		
	1.2	7
UTARA	NO. PETA	HALAMAN

Tahun Pembuatan :  
2003

Sebagai ibukota kabupaten, Kota Jantho selain menjadi pusat pemerintahan diharapkan juga dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Letak Kota Jantho yang berada di wilayah selatan Kabupaten Aceh Besar tentu saja merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah. Alasannya wilayah Kabupaten Aceh Besar bagian utara relatif lebih maju. Dari studi ini nantinya akan dilihat dalam kurun waktu 1984 – 2000 peranan Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar sudah dapat dirasakan masyarakat sekitarnya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama menyangkut peran Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pemindehan Ibukota Kabupaten Aceh Besar dari Banda Aceh ke Kota Jantho dianggap sebagai langkah yang kurang menguntungkan, terutama jika dilihat dari aspek lokasi Kota Jantho yang berada di wilayah Selatan Kabupaten Aceh Besar dimana selama ini pertumbuhannya relatif lebih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Utara Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu membutuhkan usaha yang lebih keras jika dibandingkan dengan penempatan lokasi ibukota di wilayah utara Aceh Besar yang relatif sudah lebih maju baik aktivitasnya maupun keberadaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Kondisi kurang tepatnya Jantho diperkuat dengan aksesibilitas menuju ke Jantho yang hanya satu akses sehingga kurang menarik minat masyarakat beraktivitas di Jantho. Selain itu, kondisi fasilitas pelayanan umum di Kota Banda Aceh lebih baik dibandingkan

Kota Jantho, hal tersebut membuat perbandingan tidak seimbang antara Banda Aceh sebagai bekas ibukota Kabupaten Aceh Besar dan Jantho sebagai ibukota baru.

Dilain pihak, penempatan lokasi ibukota Kabupaten Aceh Besar ke wilayah bagian selatan juga salah satu strategi agar terjadi pemerataan pembangunan wilayah. Diharapkan keberadaan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar akan memberikan pengaruh/eksternalitas positif terutama bagi wilayah sekitarnya, terutama jika dilihat usaha Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana di Kota Jantho sebagai usaha untuk mengoptimalkan peran Jantho sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka pertanyaan yang muncul untuk diteliti adalah, **bagaimana peran Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar, terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Aceh Besar.**

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Studi ini bertujuan untuk mengkaji peranan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan studi ini adalah:

1. Mengidentifikasi perkembangan sistem kota-kota dengan melihat perkembangan kota-kota pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar dan kedudukan Kota Jantho dan besaran wilayah pengaruhnya di dalam sistem kota-kota tersebut, yang mengukur:
  - Sistem hierarki kota-kota di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
  - Perubahan hierarki Kota Jantho
  - Identifikasi wilayah pengaruh Kota Jantho

2. Identifikasi keunggulan ekonomi wilayah dengan melihat kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Besar dan kecamatan-kecamatan di wilayahnya, sehingga didapat pertumbuhan aktivitas perekonomian antara Kota Jantho dan Kabupaten Aceh Besar, dengan mengukur:
  - Tipologi perekonomian Kabupaten Aceh Besar
  - Tipologi perekonomian sub wilayah di Kabupaten Aceh Besar
  - Interaksi keterkaitan antar aktivitas perekonomian antara Kota Jantho dan Kabupaten Aceh Besar.
3. Tingkat peranan Kota Jantho bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar, dengan membandingkan Kota Jantho dengan Kota-Kota lain berdasarkan dua sasaran di atas dan opini masyarakat terhadap pengaruh Kota Jantho.

## **1.4 Ruang Lingkup**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Subtansial**

Ruang lingkup substansial yang membatasi materi pembahasan yang berkaitan dengan identifikasi wilayah, yaitu sebagai berikut:

- Peranan pusat pertumbuhan terhadap wilayah pengaruhnya, peran yang dimaksud adalah peranan Jantho sebagai ibu kota kabupaten dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar.
- Perkembangan wilayah, perkembangan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di wilayah Aceh Besar.
- Sebagai batasan waktu penelitian adalah mulai Jantho difungsikan sebagai ibukota pada Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1984 hingga tahun 2000.

## 1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah adalah batasan wilayah studi, yaitu sebagai berikut:

- Unit Analisis yang dipakai adalah analisis perekonomian wilayah, dan aspek spasial terhadap kecenderungan yang terjadi setelah pemindahan ibukota dilihat dari perubahan sektor-sektor basis dan fisik dalam wilayah (hierarki kota-kota dan wilayah pengaruh).
- Wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar yang menjadi daerah pengaruh dari Jantho, sebagai wilayah makro. Wilayah Kabupaten Aceh Besar diambil dari tiap-tiap kecamatan yang ada sebelum pemekaran kecamatan pada tahun 2001, yaitu sebanyak tiga belas kecamatan .
- Jantho yang dimaksud adalah Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah Desa Kota Jantho dan desa-desa di sekitarnya, berupa kawasan yang dibangun fasilitas gedung-gedung pemerintahan, sekolah, pasar dan sarana lainnya. Wilayah ini sebelum menjadi kecamatan secara administrasi dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

## 1.5 Keterbatasan Studi

Studi ini mempunyai keterbatasan dalam memperoleh data-data di lapangan, sehingga kurang mempertajam analisis peranan penetapan Jantho sebagai ibukota terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar ini.

Kekurangan data disebabkan beberapa hal, yaitu: (1) data-data PDRB kecamatan memang tidak tersedia di BPS Kabupaten Aceh Besar, dan Bappeda, (2) data-data lain untuk kecamatan-kecamatan yang memang kurang karena tidak ada dokumentasi, kurangnya pencacahan, (3) administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang belum baik,

(4) konflik di wilayah ini yang menyebabkan banyak kantor terpaksa ditutup, pindah lokasi atau dibakar.

Konflik menyebabkan dokumentasi data untuk penelitian ini menjadi tidak maksimal, sehingga data sekunder yang ada kurang lengkap karena data-data tersebut hilang dan sering berpindah tempat. Demikian juga untuk data primer, masyarakat tidak bisa maksimal dimintai pendapatnya. Kondisi gangguan keamanan ini membuat objek penelitian di Wilayah Kabupaten Aceh Besar menjadi tidak maksimal, sehingga survei lebih banyak dilakukan di kantor-kantor, dan untuk meminta opini masyarakat penulis harus memakai pendamping, selain itu juga tidak semua wilayah di objek penelitian dapat dikunjungi.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran studi secara makro didasarkan ditetapkannya Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar. Latar belakang pemikiran ini adalah bagaimana fungsi Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan wilayah akan dapat berjalan sehingga dapat mempunyai peranan penting dalam perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar, sesuai yang diharapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Besar. Peranan ini dilihat mulai dibangunnya Kota Jantho, yang berarti dikembangkan sarana dan prasarana di Kota Jantho. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu, peranan Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah

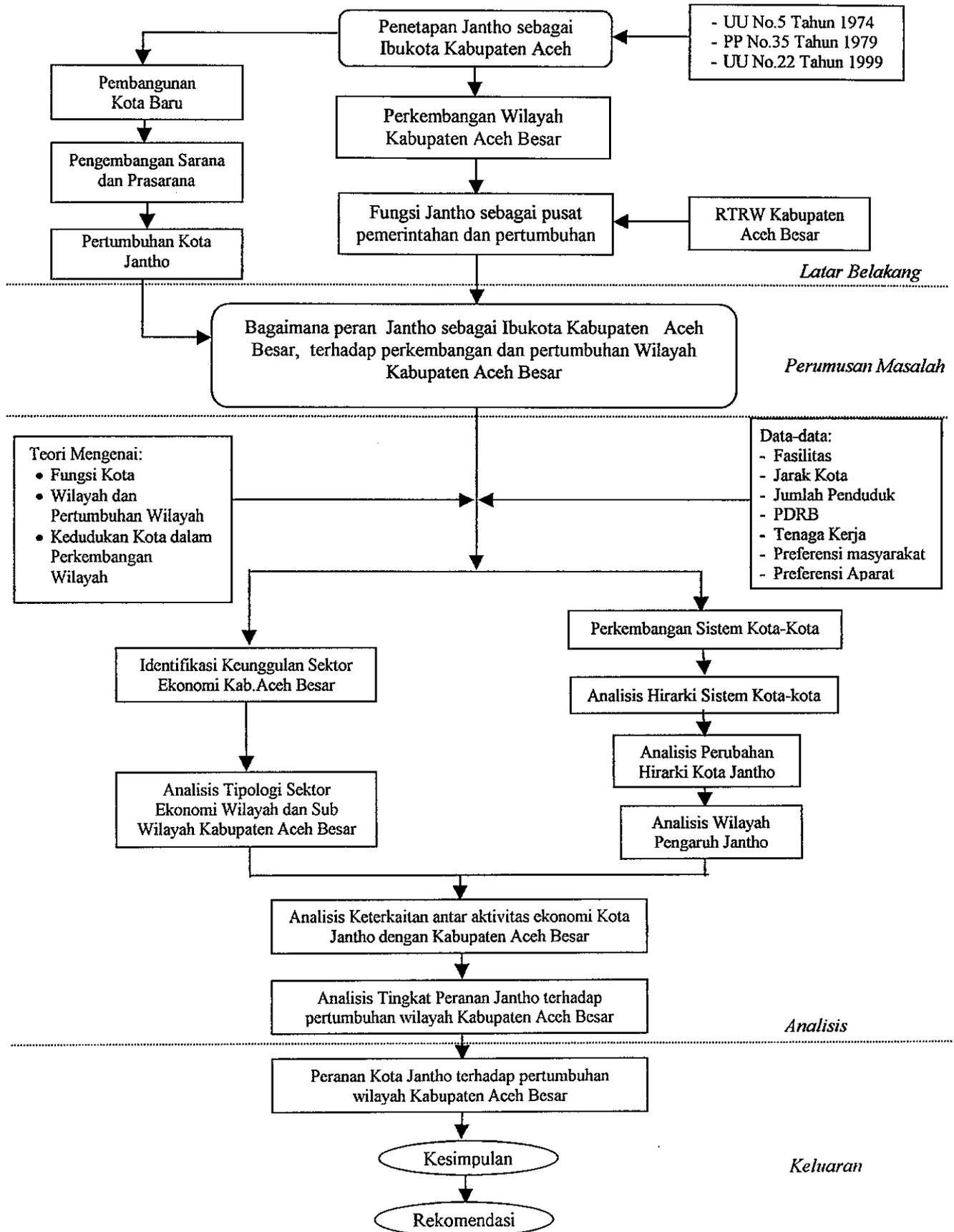
mengkaji peranan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar dengan tiga sasaran analisis yaitu:

1. Mengidentifikasi perkembangan sistem kota-kota

- Identifikasi sistem hierarki kota-kota di wilayah Kabupaten Aceh Besar, dengan melihat kelengkapan fasilitas kota-kota dan perubahan penambahan fasilitas per tahun dari kota-kota tersebut, sehingga didapat kota-kota sebagai pusat pelayanan dengan orde hierarki I, II, III dan IV.
- Identifikasi perubahan hierarki Kota Jantho, dari hasil identifikasi sistem kota-kota, perubahan hierarki Kota Jantho dapat dilihat dengan terjadinya penambahan fasilitas di Kota Jantho.
- Identifikasi wilayah pengaruh Kota Jantho dari jarak antara Kota Jantho dengan kota lain yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar akan didapat besaran wilayah pengaruh Kota Jantho, untuk itu akan dibandingkan dengan perubahan jumlah penduduk dan pengembangan jaringan jalan sehingga akan dilihat perubahan wilayah pengaruhnya.

2. Identifikasi keunggulan ekonomi wilayah

- Identifikasi pertumbuhan aktivitas perekonomian Kabupaten Aceh Besar, dari perhitungan sektor basis antar kecamatan di Kabupaten Aceh Besar didapat tipologi perekonomian di tiap kecamatan pertahunnya.
- Keterkaitan antar aktivitas ekonomi antara Kota Jantho dengan Kabupaten Aceh Besar dapat dibandingkan hasil sektor basis di tiap kecamatan dengan hierarki dan wilayah pengaruh Kota Jantho akan didapat keterkaitan aktivitas ekonomi di Kabupaten Aceh Besar menuju Kota Jantho.



**GAMBAR 1.3**  
**ALUR PIKIR PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

- 3 Tingkat peranan Kota Jantho bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar, yaitu peran Kota Jantho terhadap pertumbuhan wilayah di Kabupaten Aceh besar didapat dari hasil keterkaitan aktivitas perekonomian yang dibandingkan dengan kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan maka terlihat tingkat peranan Kota Jantho. Analisis ini akan memperhitungkan opini masyarakat dan pejabat di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, analisis yang dilaksanakan adalah identifikasi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Aceh Besar, hierarki Kota Jantho, analisis wilayah pengaruh Jantho dan peranan Kota Jantho terhadap pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Hasil ketiga analisis ini akan diketahui hasil studi berupa besarnya peranan Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Setelah tahapan analisis, akan diberikan kesimpulan hasil studi dan rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini dibagi dalam enam bab yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, yang berisikan tentang latar belakang perlunya dilakukan penelitian ini, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup substansi dan spasial serta memberikan landasan pemikiran nantinya.

**Bab II Kajian Pustaka Peranan Kota Terhadap Wilayah**, menjelaskan landasan teori-teori yang terkait dengan konsep pembahasan dalam mengkaji materi, meliputi : teori kota, teori wilayah, pertumbuhan wilayah, strategi pengembangan wilayah.

**Bab III Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan Studi**, berisikan pendekatan dan metodologi pelaksanaan studi yang dilakukan, dengan teknik pengumpulan, teknik pengolahan, dan penyajian data, serta teknik analisis.

**Bab IV Kajian Karakteristik Wilayah Penelitian**, berisikan gambaran wilayah di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Jantho. Dalam bab ini diperlihatkan data-data sebagai pendukung analisis yang diambil dari hasil survei lapangan berupa data penduduk, perekonomian, sarana dan prasarana (fasilitas), dan data lainnya yang diperlukan.

**Bab V Peranan Jantho Sebagai Ibukota Terhadap Perkembangan Kabupaten Aceh Besar**, berisikan analisis hasil pengolahan data. Pengolah data yang dipakai adalah hasil dari alat analisis skalogram, tipologi sektor ekonomi, analisis kualitatif untuk mengukur pertumbuhan Jantho sebagai ibukota kabupaten dengan fungsi pusat pemerintahan, perekonomian dan pelayanan masyarakat, mengukur tingkat perkembangan Kabupaten Aceh Besar sebagai pengaruh setelah ditetapkan Jantho sebagai Ibukota Kabupaten, peranan Kota Jantho bagi bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya.

**Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi**, berisikan kesimpulan hasil analisis dan saran-saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil analisis berupa masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **PERANAN KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN WILAYAH**

#### **2.1 Fungsi-Fungsi Kota**

##### **2.1.1 Pengertian Serta Fungsi Kota dan Perkotaan**

Menurut Branch (1996: 2) Kota diartikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu atau lebih penduduk, sedangkan perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu permukiman terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu (Branch, 1996:2). Dalam pengertian lain kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang sebagian besar lahannya terbangun dan perekonomiannya bersifat non pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, kota adalah permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Sedangkan perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau Wilayah Nasional sebagai simpul jasa.

Dalam Inmendagri nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Permendagri nomor 7 tahun 1986 tentang Batas-batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia, ciri-ciri wilayah kota dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek sosial ekonomi. Dilihat dari aspek fisik, maka wilayah kota mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ; (a) tempat permukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya; (b) proporsi bangunan permanen lebih besar di tempat itu daripada di wilayah-wilayah sekitarnya; (c) mempunyai lebih banyak bangunan fasilitas sosial ekonomi (sekolah, poliklinik, pasar, toko, kantor pemerintah dan lain-lain)

daripada wilayah sekitarnya. Dilihat dari aspek sosial ekonomi, maka wilayah kota mempunyai ciri-ciri; (a) mempunyai jumlah penduduk yang relatif besar daripada wilayah sekitarnya, yang dalam satu kesatuan areal terbangun berjumlah sekurang-kurangnya 20.000 orang di Pulau Jawa, Madura dan Bali atau 10.000 orang di luar pulau-pulau tersebut; (b) mempunyai kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dari wilayah sekitarnya; (c) mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian lebih tinggi dari wilayah sekitarnya; (d) merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan pertanian wilayah sekitarnya dan tempat pemasaran atau processing bahan baku bagi kegiatan industri.

Kota-kota secara umum dapat dibedakan berdasarkan fungsi kota maupun untuk kepentingan perumusan kebijakan perencanaan. Berdasarkan fungsinya, menurut Sujarto (1989) kota di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi ; (a) kota pusat pemerintahan, (b) kota pusat perdagangan, (c) kota pusat lalu lintas dan angkutan.

Haris mengelompokkan kota di Amerika Serikat berdasarkan fungsinya sebagai berikut : (a) kota industri M', dimana 74 % penduduknya bernafkah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran; (b) kota industri M, dimana 60 % penduduk bernafkah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran; (c) kota pusat pengeceran, dimana 50 % penduduk bernafkah sebagai pekerja industri, pedagang besar atau eceran; (d) kota perdagangan besar, dimana sejumlah besar penduduk menjadi pedagang besar; (e) kota perangkutan, dimana lebih dari 11% penduduk bernafkah di bidang perangkutan; (f) kota campuran (diversifikasi), dimana tidak menampakkan suatu fungsi dengan jelas; (g) kota pertambangan, lebih dari 15% penduduk bernafkah di bidang pertambangan; (h) kota universitas, dimana sebagian besar penduduk berkecimpung dalam bidang perguruan tinggi; (i) kota peristirahatan dimana sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang jasa

tertentu. Seperti rekreasi, perhotelan dsb; (j) kota politik, dimana sebagian besar penduduk bekerja di bidang pemerintahan (Jayadinata, 1999:128-129).

Sementara itu definisi modern Amor Rapoport merumuskan definisi baru yang dapat diterapkan pada daerah permukiman kota dimana saja yaitu, sebuah permukiman dapat dirumuskan sebagai sebuah kota bukan dari segi morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu menyusun sebuah wilayah dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar berdasarkan hierarki-hierarki tertentu (Zahnd, 1999:5).

Pada penelitian ini Kota Jantho dikaji dengan batasan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan, perkembangan kota dan pengertian Jantho sebagai kota baru dengan pembangunan prasarana untuk aktivitas tersebut.

### **2.1.2 Kota sebagai Pusat Administrasi Pemerintahan**

Kota sebagai pusat pemerintahan pada dasarnya merupakan tempat kedudukan suatu administrasi pemerintah yang bersifat membawahi (mensubordinasi) beberapa kota/wilayah wewenangnya. Pusat pemerintahan (masyarakat) adalah lokasi perkantoran untuk semua kepentingan-kepentingan khusus (lobi) yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan perorangan maupun kelompok (swasta), anggota legislatif dan kantor pemerintah (Eisner,1993:365).

Keberadaan kota sebagai pusat administrasi pemerintahan akan perkembangan bentuk fisik kota, menurut Branch ibukota suatu negara bagian atau negara menampilkan beberapa bentuk tata ruang yang monumental, menggambarkan simbol kepentingan pemerintahan, yaitu dengan adanya mall, bangunan-bangunan umum yang diatur secara menarik, atau bangunan yang secara khusus dirancang untuk tujuan kota tersebut (Branch,

1996:40). Penetapan suatu Ibukota berarti pengembangan bangunan-bangunan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan pemerintahan, serta bangunan-bangunan lain sebagai pendukung kegiatan permukiman.

Kegiatan pemerintahan dalam sebuah demokrasi yang besar menarik semakin banyak penduduk ke ibukota (Gallion, 1992: 67). Ketertarikan terhadap ibukota ini, bukan hanya karena kelengkapan fasilitas penunjang tapi juga kegiatan pemerintahannya, dengan kedekatan ke pusat kekuasaan menurut Gallion (1992: 67), dengan penduduk tersebut datang juga kekuatan perdagangan, dan terjadilah kekuatan-kekuatan yang berlawanan; kota perdagangan dan kota klasik sama sekali berlawanan.

Keberadaan pusat pemerintahan dan perkembangannya selalu diiringi dengan perkembangan kota sebagai pusat perdagangan (CBD), bahkan pada beberapa kasus, pusat pemerintahan merupakan bagian dari pusat perdagangan. Hal ini disebabkan pada umumnya pusat pemerintahan dan perdagangan terletak pada satu lokasi yang memiliki keuntungan sama dan keduanya menjadi karakteristik keberadaan suatu kota (Kostof, 1992:153).

Menurut Madjid Ibrahim (Neonufa, 1999:19), setiap wilayah, baik wilayah administrasi maupun wilayah pembangunan mempunyai kota besar, sedang dan kecil sebagai pusatnya. Wilayah administrasi seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan masing-masing memiliki ibukota sebagai pusat yang merupakan kota terbesar yang terdapat dalam lingkungan daerahnya.

Kriteria kota kabupaten (*distric towns*) menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik Persatuan Bangsa-Bangsa (1979:103) adalah, berpenduduk rata-rata 5.000 jiwa, atau tidak di bawah dari angka 2.500 jiwa dan jarang berada di atas 25.000 orang. Radius pengaruh dari kota kabupaten adalah antara 15-50 km dengan rata-rata adalah 25

km. Luas servis areal antara 700-7.500 km<sup>2</sup> dengan rata-rata luas areal 2.000km<sup>2</sup>. Populasi penduduk pada wilayah pengaruhnya adalah antara 20.000 sampai dengan 200.000 orang biasanya rata-rata adalah 50.000 orang.

Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik Persatuan Bangsa-Bangsa (1979:103) kota kabupaten sebagai pusat wilayah pedesaan yang melayani wilayah-wilayah sekelilingnya, berfungsi sebagai jaringan antara kota besar dengan desa. Fasilitas umum yang harus ada di kota kabupaten adalah air bersih, pembuangan sampah, pengolahan limbah rumah, tangga dan listrik pedesaan, jalan propinsi dan kabupaten, landasan pesawat, stasiun kereta api kecil serta terminal bus. Untuk layanan yang diberikan adalah sekolah menengah pertama, pusat kesehatan masyarakat, pasar permanen dan layanan administrasi kabupaten. Aktivitas yang berlangsung di kota kabupaten adalah industri skala kecil, perdagangan skala lokal, fasilitas kredit (perbankan) dan layanan umum skala kabupaten (Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik Persatuan Bangsa-Bangsa, 1979).

### **2.1.3 Kota sebagai Pusat Pertumbuhan**

Pusat pertumbuhan, dimana Kota sebagai pusat pertumbuhan tidak saja merupakan tempat pemusatan fasilitas namun lebih dari itu kota merupakan permukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat di wilayah-wilayah belakangnya (Glasson, 1990: 133). Penyediaan fasilitas ini berkaitan dengan sebagai pusat pelayanan dengan konsep tempat pusat dari Christaller dengan wilayah pengaruh berdasarkan teori hexagonal.

Menurut Bryan Berry (dalam Rondinelli, 1985:5-6), dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan membentuk sistem jaringan penduduk yang besar dan lokasi yang

tepat, sehingga pusat-pusat itu tersebut dapat dikembangkan sebagai suatu tempat berkumpul dan penyebaran bagi wilayah lainnya.

Dalam pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan adanya strategi, oleh Daljoeni (1998: 101-104) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Hierarki, sebagai tingkat pelayanan dimulai dari pelayanan paling rendah di kota-kota kecil, sampai pelayanan paling besar di kota-kota besar. Adanya hierarki ini akan menunjukkan bermacam kelengkapan fasilitas, dari yang paling kecil ketersediaannya dan yang paling besar jumlah fasilitasnya.
- Penduduk Ambang, yaitu jumlah penduduk minimum yang dapat mendukung kegiatan pelayanan. Dengan tingkat penyediaan kelengkapan fasilitas tertentu membutuhkan penduduk ambang yang berbeda.
- Lingkup Pasar, yaitu jarak pasar maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk menuju suatu pusat pelayanan, jika diluar jarak tersebut maka penduduk akan mencari pusat pelayanan lain. Lingkup pasar ini akan menjadi batas pengaruh suatu pusat pelayanan dengan wilayah pelayanannya.

#### **2.1.4 Pengertian dan Fungsi Kota Baru**

Jantho merupakan kota yang dibangun melalui proses perencanaan, dan berdiri pada suatu lokasi lahan yang masih kosong dari konstruksi (bangunan) dan jaringan jalan. Menurut Gallion 2 (1994: 242) unsur yang membedakan kota baru adalah bahwa kota itu dirancang lebih dahulu, tidak hanya pemisahan politis dari daerah perkotaan yang sudah mapan. Kota baru yang sengaja dibangun untuk aktivitas pemerintahan, dirancang sebagai kota mandiri, dengan menyediakan aktivitas (pekerjaan) bagi penduduknya agar kota baru dapat menjadi tempat bermukim para pendatang (Alonso dalam Bourne, 1978: 536)

Menurut Sujarto (1993) bahwa sesuai dengan fungsi dan tujuan kota baru sangat bervariasi dari segi lokasi, jenis, serta pola fisiknya. Namun secara fungsional kota baru dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### 1. Kota Penunjang

Kota Penunjang yaitu kota baru yang direncanakan dan dikembangkan dalam kaitan dengan kota yang telah tumbuh dan berkembang. Jenis kota baru demikian membantu memecahkan masalah kota yang sudah ada, misalnya untuk memecahkan masalah keruangan perumahan atau dalam perluasan kota. Kota baru ini dapat dikatakan sebagai *supporting new town* atau kota baru penunjang, karena berperan sebagai penunjang eksistensi kota yang sudah ada serta telah berkembang.

Secara ekonomi dan sosial fungsinya mempunyai ketergantungan pada kota induk. Secara geografis kota baru penunjang dibangun pada wilayah tertentu yang jaraknya berdekatan dengan kota induk. Secara fisik kota baru penunjang terpisah oleh wilayah tak terbangun.

Kota-kota baru penunjang ini :

- a. Permukiman skala besar di pinggiran/di luar kota induk (*dormitory town*) yang disebut kota satelit (*satelit town*)
- b. Kota kecil di sekitar kota induk yang ditingkatkan dan dikembangkan.

### 2. Kota Mandiri

Kota Mandiri yaitu kota yang direncanakan dan dikembangkan tersendiri, meski fungsinya sama dengan kota-kota yang telah tumbuh dan berkembang, tetapi kota-kota ini dikembangkan dengan fungsi khusus berkaitan dengan potensi tertentu. Kota baru demikian dapat dikatakan sebagai *independent town* atau *self sufficient new town* atau kota mandiri baru. Secara ekonomi dan sosial dapat memenuhi kebutuhan sendiri

paling tidak sebagian besar penduduknya. Secara geografis, kota baru mandiri di wilayah tersendiri yang berjarak cukup jauh dari kota yang sudah ada. Secara fisik, terpisah oleh wilayah bukan permukiman seperti pertanian, hutan, jalur hijau atau wilayah non urban lainnya.

Kota baru mandiri ini antara lain adalah (Gollany, 1976):

- Kota pusat pemerintahan
- Kota industri atau pertambangan
- Kota usaha kehutanan
- Kota instalasi militer
- Kota pusat rekreasi
- Permukiman skala besar

Menurut Gallion (1994: 242) kotapraja baru bukanlah kota baru, tetapi kota-kota itu merupakan kelompok penduduk yang sudah ada, yang ingin mempunyai keinginan mempunyai wewenang pengendalian lebih besar atas urusan-urusan lokal yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Pemisahan ibukota Kabupaten dengan Kota yang lama berarti juga memindahkan wewenang ke kota yang direncanakan tersebut.

## **2.2 Wilayah dan Perkembangan Wilayah**

### **2.2.1 Konsep Ruang dan Wilayah**

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu: (a) jarak; (b) lokasi; (c) bentuk; dan (d) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut

di atas secara bersama-sama menyusun unit tataruang yang disebut wilayah (Budiharsono, 2001:13).

Whittlessey (1954) memformulasikan pengertian tata ruang berdasarkan: (a) unit areal konkret, (b) fungsionalis di antara fenomena, dan (c) subyektifitas dalam penentuan kriteria. Kemudian Hartchorne (1960) mengintroduksikan unsur-unsur hubungan fungsional diantara fenomena, yang melahirkan konsep struktur fungsional tataruang. Struktur fungsional tata ruang bersifat subyektif, karena dapat menentukan fungsionalis berdasarkan kriteria subyektif (Budiharsono, 2001:13).

Wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu: (1) wilayah homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah perencanaan; dan (4) wilayah administratif (Budiharsono, 2001:14).

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi, geografi, alam, suka dan sebagainya. Richardson (1975) dan Hoover (1977) mengemukakan bahwa wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (Budiharsono, 2001:14-15).

Wilayah Nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan wilayah belakangnya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Sukirno (1976) menyatakan bahwa pengertian wilayah nodal yang paling ideal untuk digunakan dalam analisis mengenai ekonomi wilayah, mengartikan wilayah tersebut sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Batas wilayah nodal ditentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh

pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Hoover (1977) mengatakan bahwa struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup atau suatu atom, dimana terdapat inti dan plasma (feripheri) yang saling melengkapi (Budiharsono, 2001:15).

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik. Sementara itu Boudeville dalam Glasson (1990: 21) mendefinisikan wilayah perencanaan sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan (Budiharsono, 2001: 15-16).

Klassen dalam Glasson, (1990: 21) mempunyai pendapat yang hampir sama dengan Boudeville, yaitu bahwa wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri ; (a) cukup besar untuk mengambil keputusan investasi yang berskala ekonomi; (b) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (d) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (*growth point*); (e) menggunakan cara pendekatan perencanaan pembangunan; (f) masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalannya.

Di Indonesia pengertian suatu wilayah adalah secara administratif melingkupi suatu negara, propinsi atau kabupaten. Dalam Undang-undang No. 24 tahun 1992, ditegaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dapat dikatakan wilayah di Indonesia berarti memiliki kesatuan yang di dalamnya berisi manusia, hewan, tumbuhan

dan lingkungan lainnya yang menjadi sumber daya bagi kelangsungan pengembangannya. Untuk itu bagaimana memanfaatkan sumber daya tersebut supaya seimbang diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan ini menjadi suatu acuan dalam strategi pengembangan wilayah.

### 2.2.2 Pertumbuhan Wilayah

Pertumbuhan terjadi pada suatu wilayah, yang menurut para ahli dianggap wilayah adalah suatu organisme yang hidup dan secara alami akan berkembang. Menurut Alkadri et. Al (1999: 11) pertumbuhan wilayah merupakan suatu proses dinamika perkembangan internal dan eksternal wilayah tersebut, pertumbuhan wilayah pada awalnya dipicu oleh adanya pasar yang dapat menyerap hasil produksi wilayah yang bersangkutan. Perkembangan wilayah ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Glasson, 1990:102-109).

Teori yang mengungkapkan tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah adalah teori sektor dan teori tahap yang merupakan perluasan dari teori sektor. Teori sektor diungkapkan proses pertumbuhan wilayah berdasarkan asumsi kenaikan pendapatan perkapita akan diikuti oleh relokasi sumber daya. Teori tahap memberikan gambaran umum mengenai tahap-tahap perkembangan wilayah dan menunjukkan syarat-syarat untuk berpindah dari suatu tahap ke tahap lainnya. Faktor-faktor internal ini meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Cara faktor-faktor internal mempengaruhi pertumbuhan wilayah dapat diuraikan sebagai berikut (Perroux dalam Glasson, 1990:88):

- Tahap pertama, tahap perekonomian subsistem swasembada. Pada tahap ini masih sedikit investasi di wilayah tersebut dan didominasi oleh sektor pertanian.

- Tahap kedua, terjadi setelah adanya kemajuan transportasi dan perdagangan yang mendorong spesialisasi wilayah yang memunculkan industri sederhana di desa-desa untuk memenuhi kebutuhan para petani. Lokasi industri desa ini dekat dengan lokasi pertanian setempat.
- Tahap ketiga, dengan semakin bertambahnya perdagangan antar wilayah, wilayah yang bersangkutan akan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian.
- Tahap keempat, penduduk semakin bertambah dan berkurangnya tambahan hasil pertanian akan memaksa wilayah yang bersangkutan melakukan industrialisasi (tanpa industrialisasi akan mengakibatkan tekanan penduduk, menurunnya taraf hidup, stagnasi, dan kemerosotan kehidupan masyarakat). Industri sekunder mulai berkembang, mengolah produk primer dan akan mengarah ke spesialisasi.
- Tahap kelima atau terakhir, merupakan pengembangan industri tersier yang berorientasi ekspor. Wilayah ini akan menyalurkan/mengekspor model, ketrampilan, dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke wilayah yang kurang berkembang.

Pengaruh eksternal dalam pertumbuhan wilayah didekati melalui teori basis ekspor (*export base theory*). Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh eksplotasi sumber daya alam dan pertumbuhan basis ekspor wilayah yang bersangkutan serta dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari wilayah lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja. Pengaruh-pengaruh eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah secara optimal jika faktor/variabel utama yaitu pola pendapatan dan pengeluaran sektor ekspor, inisiatif bisnis lokal, dan peranan pemerintah diusahakan secara maksimal (Richardson, 2001:44). Teori lain yang menjelaskan pengaruh eksternal adalah model alokasi sumber daya antar wilayah, model ini

mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja dan modal akan mengalir dari wilayah dengan tingkat upah rendah ke wilayah-wilayah dengan tingkat upah tinggi.

Selanjutnya melihat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonominya, karena kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah (Alkadri et al., 1999: 17), sedangkan pendekatan spatial merupakan kajian penunjuk dari kegiatan ekonomi yang merupakan jawaban dari pertanyaan aktivitas di dalam wilayah berlangsung, ke arah mana aktivitas itu berkembang, dan sebaiknya aktivitas tersebut optimal dikembangkan.

## **2.3 Kedudukan Kota dalam Perkembangan Wilayah**

### **2.3.1 Kota dalam Wilayah**

Kota dalam suatu wilayah merupakan noda dalam suatu wilayah, dapat dikatakan kota menjadi salah satu elemen wilayah dimana terjadi hubungan antara kota dan wilayah sekelilingnya, menurut Daldjoeni dahulu kota-kota di zaman Yunani kuno tak mengenal batas yang tegas secara ekonomis maupun politis antara darinya dan pedesaan agraris diluarnya. Memang nampak tembok kota itu memisahkan penduduk kota dari penduduk yang bertani di luarnya, tetapi sebenarnya antara kota dan wilayah sekelilingnya itu terdapat relasi yang simbiotis (Daldjoeni, 1998:76). Di Eropa interaksi kota-wilayah memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, misalnya *Umland* (sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia); di Inggris *hinterland*. Adapun berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman tadi lalu muncul sebutan *catchment area*, *space of influence* dan *urban field* serta *city region* (Daldjoeni, 1998:77). Dalam pengertian lain, kedudukan kota terhadap wilayah sekelilingnya adalah sebagai inti dengan wilayah

pinggiran, yaitu dalam struktur ruang wilayah sebagai pusat dari kegiatan, yang menjadi pusat pertumbuhan bagi pengembangan suatu wilayah, dengan melihat berbagai teori yaitu Konsep kutub pertumbuhan (Perroux, 1955), Konsep pusat pertumbuhan (Boudeville), Konsep integrasi ruang ekonomi (J. Friedman, 1966) yang dalam rencana tata ruang diterjemahkan kota-kota dengan hierarki tertentu yang melayani wilayah pengembangan. Sehingga terjadi pemusatan pembangunan fasilitas dalam fungsinya sebagai pusat pelayanan.

Selanjutnya Friedman menilai peran kota tersebut dalam suatu sistem perkotaan yang dipandang sebagai agen dinamis pengembangan wilayah. Sistem perkotaan bukan hanya membangkitkan namun juga menjadi mediator pengembangan wilayah. Hal ini dipandang karena perkembangan kota lebih dulu maju dibandingkan pengembangan wilayah (Friedman, 1979).

Kota dengan pengaruh keunggulan dalam kemajuan ini akan menimbulkan keterkaitan berupa daya tarik aktivitas pergerakan dari wilayah bukan kota (bisa dikatakan desa kalau di Indonesia), sehingga menimbulkan urbanisasi. Mengenai urbanisasi sendiri menurut Hope Tisdale Eldridge (1956) dalam Bintarto (1989:75-76) adalah: "*Urbanization is the process of people moving to cities or other densely settled areas. The term urbanization is also used to describe the changes in social organization that occur as a consequence of population concentration. Urbanization is the process by which rural areas become transformed into urban areas*". Besarnya pengertian tersebut dapat dilihat besarnya keterkaitan antara kota dan wilayah bukan kota (desa), dimana menurut Bintarto penduduk pedesaan lebih mengenal kota, bahkan dari mereka yang hidup di kota. Ada banyak dari mereka yang meninggalkan desanya dan tinggal di kota terdekat, tetapi ada juga yang hanya bekerja di kota tetapi masih tinggal di desa. Dalam interaksi kota dengan

desa dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif baik untuk kota maupun desa (Bintarto, 1989:75).

Sesuai dengan fungsinya, kota sebagai pusat administrasi pemerintahan dan kota sebagai pusat pertumbuhan, maka kedudukan kota dalam wilayah dapat di bagi:

1. Secara administrasi sesuai dengan UU No.24 Tahun 1992 Mengenai Tata Ruang, kota dengan fungsi sebagai ibukota, melayani dalam hal urusan pemerintahan, sosial dan lainnya wilayah-wilayah yang secara administratif merupakan wilayahnya.
2. Secara fungsional kota sebagai pusat pertumbuhan/pengembangan wilayah sesuai dengan konsep pusat pertumbuhan. Kota (pusat) melayani wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah pengaruhnya (wilayah belakang).

### 2.3.2 Pengembangan Wilayah

Perencanaan dan Pembangunan suatu wilayah biasanya berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut, ini menurut teori *resource endowment* (Perloff dan Wingo, 1961) menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu. Yang dalam jangka pendek merupakan aset untuk memproduksi barang dan jasa. Menurut North (1955), pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Akhirnya menurut Myrdal (1957), terdapat dua kekuatan yang bekerja pada pertumbuhan ekonomi, *backwash effect* dan *spread effect*. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, kekuatan efek balik negatif biasanya melampaui efek

penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari daerah tidak berkembang ke daerah berkembang.

Berdasarkan teori pengembangan, ada dua konsep tentang teori tersebut, yaitu pembangunan dari atas (*Development from above*) dan pembangunan dari bawah (*Development from below*). Pendekatan berdasarkan strategi konsep pengembangan wilayah dari atas paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktek. Tujuan dari strategi ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama (terpilih) pada lokasi tertentu sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruhan bagian wilayah.

Secara umum terdapat 5 (lima) pemikiran yang paling banyak memberikan pengaruh pada teori-teori pengembangan/pembangunan dari atas (Hansen dalam Ma'arif 2000: 4), yaitu :

- a. Polarization and Trickle Down Effect, yang dikemukakan oleh Hirschman.
- b. Backwash effect dan spread effect (Gunnar Myrdal, 1957)
- c. Konsep kutub pertumbuhan (growth pole ; Perroux, 1955)
- d. Konsep pusat pertumbuhan (growth centre : Boudeville)
- e. Konsep integrasi ruang ekonomi (centre – periphery : J. Friedman, 1966)

Konsep pengembangan wilayah dari bawah adalah suatu proses pembangunan yang menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil, memobilisasi sepenuhnya kemampuan dan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan bersama dalam ekonomi, sosial dan politik. Konsep pengembangan dari bawah merupakan kebalikan dari konsep pengembangan wilayah dari atas. Ada beberapa pendapat mengenai upaya pendekatan model pengembangan wilayah dari bawah (Ma'arif 2000: 13-15), yaitu:

- a. Efektif spasial closure (Stohr dan Todling, 1978)

- b. Territoriality (Friedman dan Weaver, 1979)
- c. Teori pengembangan agropolitan

Konsep-konsep pengembangan ini dapat diadopsi untuk perencanaan pusat pelayanan, dengan pendekatan node berupa kota-kota yang berinteraksi dengan skala pelayanan berupa transportasi dengan fungsi-fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya sesuai dengan potensi wilayah tersebut.

Timbulnya konsep pusat pelayanan dan daerah belakang karena beberapa asumsi dan kebutuhan. Ada beberapa asumsi konsep-konsep pusat pelayanan (Budiharsono, 2001: 13), yaitu:

- a. Penduduk didistribusikan pada beragam ukuran permukiman
- b. Mereka mempunyai kebutuhan biofisik sama baiknya dengan kebutuhan sosial ekonomi
- c. Mereka menggunakan sumber daya alam dan manusia seperti barang-barang dan jasa untuk kebutuhan mereka
- d. Mereka membentuk permukiman dalam bentuk rumah, desa dan kota serta memutuskan untuk tinggal bersama selama masih tersedia sumber daya yang dibutuhkan
- e. Mereka menggunakan sumber daya untuk kebutuhan dasar yang dibatasi atau keinginan terbatas
- f. Mereka berpindah ke tempat lain untuk mencari kebutuhan yang tidak terdapat di tempat mereka.

Pusat dan wilayah belakang merupakan suatu wilayah nodal yang mempunyai hubungan yang bersifat *simbiotik* dan mempunyai fungsi yang spesifik sehingga keduanya tergantung secara internal. Fungsinya berupa, pusat permukiman, pelayanan, industri,

perdagangan, sedangkan untuk wilayah belakang berfungsi sebagai; penyedia barang dasar, daerah pemasaran dan pusat pertanian. Dan wilayah tersebut mempunyai hierarki, berdasarkan jumlah penduduk, jumlah fasilitas dan jumlah fasilitas pelayanan.

### **2.3.3 Peran Kota dalam Pengembangan Wilayah**

Negara-negara dengan keragaman yang bervariasi, antara lain keragaman ekonomi, sosial, budaya, ideologi ataupun lainnya, peranan kota dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilihat dari besaran (jumlah) penduduk atau ukuran kota tersebut. Peran kota ditentukan karakteristik fungsi kota yang diembannya, yaitu aksesibilitas yang dipunyai terhadap wilayah pinggirannya (Rondinelli, 1978). Kaitannya dengan peranan penetapan ibukota dapat dirumuskan peran kota dalam pengembangan wilayah sebagai berikut :

1. Merupakan penyedia lokasi bagi kepentingan desentralisasi fasilitas pelayanan publik skala lokal sehingga meningkatkan aksesibilitas antara desa dengan kota
2. Memberikan bermacam variasi barang konsumen, perdagangan, pelayanan perorangan dan perluasan sektor informal
3. Memberikan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan manufaktur, industri kecil yang dapat berfungsi melayani pasar lokal dan regional. Peningkatan pelayanan akan terjadi dengan semakin tingginya skala kota tersebut
4. Kegiatan agroprosesing serta agrokultural yang ada berfungsi sebagai supply bagi wilayahnya dan menyediakan pelayanan bagi wilayah pedesaan (belakang)
5. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdagangan dan pasar hasil pertanian serta meningkatkan produktifitas pertanian dan pendapatan daerah belakang
6. Pusat transportasi dan komunikasi yang menghubungkan kota kecil dengan pedesaan dan daerah belakang, dengan kota besar dan daerah lainnya

## 7. Dapat berfungsi sebagai pusat transformasi sosial

Sebagai pusat pemerintahan, kota merupakan pusat administrasi pemerintahan yang berperan sebagai pusat kelembagaan dan informasi yang dapat terus dikomunikasikan lewat hubungan fungsi sosial, ekonomi dan administrasi ke wilayah sekitarnya sehingga menjamin keterkaitan fungsi pembangunan, inovasi dan kemajuan yang serasi, seimbang dan selaras antara kota, dan wilayah perdesaan.

Dalam RTRW sebuah kabupaten atau propinsi dikenal dengan sistem hierarki kota-kota, kedudukan ibukota hampir selalu sebagai kota dengan orde satu, sedangkan kota-kota lainnya sesuai dengan urutan perkembangan kotanya mempunyai orde dua dan tiga. Konsep ini didasari teori tempat sentralnya Christaller, yaitu kota menjadi titik yang melayani wilayah berbentuk *hexagonal* di sekelilingnya dan bersinggungan dengan daerah lain secara matematik menguntungkan karena tidak ada wilayah yang tidak terlayani (Glasson, 1990:136).

Dalam Revisi Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar Tahun 1998, Jantho sebagai kota orde satu dengan jangkauan pelayanan adalah seluruh Kabupaten Aceh Besar, sedangkan Banda Aceh dalam Revisi RTRW Propinsi Aceh Tahun 1999/2000 berkedudukan sebagai kota orde satu. Kedudukan orde satu bagi ibukota kabupaten dalam RTRW ini berarti mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sesuai dengan strategi pusat-pusat pertumbuhan.

Beberapa strategi pusat-pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut (Parr, 1999):

### 1. Membangkitkan Kembali Daerah Terbelakang

Daerah terbelakang dipandang sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan per kapita rendah, tingkat kesejahteraan

penduduk yang di bawah rata-rata, serta rendahnya tingkat pelayanan fasilitas maupun utilitas yang ada.

Strategi ini dilakukan guna menciptakan struktur ruang wilayah yang lebih kompetitif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara pergerakan modal secara inter-regional. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk mencegah aliran modal ke luar wilayah, serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Hasil yang kemudian diharapkan adalah berupa transformasi struktur ruang ekonomi wilayahnya.

## 2. Mendorong Dekonsentrasi Wilayah

Strategi ini dilakukan guna menekan tingkat konsentrasi wilayah, serta bertujuan untuk membentuk suatu struktur ruang yang tepat khususnya pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan. Artinya, pengembangan yang dilakukan adalah pada wilayah non-metropolitan guna menekan peranan wilayah metropolitan yang sudah terlalu besar. Yang menjadi perhatian adalah tidak semua lokasi bisa dijadikan pusat pertumbuhan, sehingga lokasi sangat berperan dalam pengembangan.

## 3. Memodifikasi Sistem Kota-kota

Tujuan strategi ini adalah guna mengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan. Dengan adanya pengaturan sistem kota-kota dengan hierarki yang terstruktur, diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.

## 4. Pencapaian terhadap Keseimbangan Wilayah

Strategi ini muncul akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional, biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan serta yang

berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumberdaya alam pada wilayah-wilayah tersebut.

Menurut Parr (1973) ada dasar-dasar rasional yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan, yaitu:

1. **Konsentrasi Prasarana Kota Pada Pusat Pertumbuhan**

Pemusatan prasarana kota pada pusat-pusat pertumbuhan yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan utama ekonomi dan tujuan sosial. Dalam konteks umum, penyediaan prasarana dibatasi pada penyediaan prasarana skala luas. Prasarana skala luas akan menciptakan eksternalitas, hal ini akan membuat kota menjadi lebih menarik bagi masyarakat dalam konteks lokasi dan masuknya investasi. Dalam penyediaan prasarana ini peranan investasi pemerintah lebih besar.

2. **Konsentrasi Aktivitas Perekonomian (aglomerasi)**

Konsentrasi aktivitas ekonomi di kota pusat pertumbuhan terutama industri memiliki kaitan ke depan dan kaitan ke belakang. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran investasi yang masuk langsung ke pusat pertumbuhan dan dikaitkan dengan eksploitasi aglomerasi ekonomi (Parr, 1973).

#### **2.4 Kesimpulan Kajian Pustaka**

Dari pembahasan teori-teori yang berkaitan mengenai pengaruh pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Aceh Besar terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar dapat diambil kesimpulan bahwa kota mempunyai pengaruh terhadap perkembangan wilayah, dan uraiannya sebagai berikut:

**TABEL II. 1**  
**KESIMPULAN TEORI**

**FUNGSI KOTA**

No.	Pendapat	Pernyataan
1	Sujarto (1989)	Kota berfungsi sebagai: - Pusat Pemerintahan - Pusat Pertumbuhan
2	Gallion (1992: 67)	Keberadaan pusat pemerintahan perkembangannya akan sangat berpengaruh terhadap berbagai aktivitas kota karena akan menarik bagi pengembangan prasarana yang mendukung aktivitas, sehingga menarik pula penduduk
3	Glasson (1983: 133)	Kota tidak hanya tempat pemusatan fasilitas, lebih dari itu kota merupakan pemukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat di wilayah belakangnya
4	Kostof (1992: 153)	Pada beberapa kasus Pusat Pemerintahan merupakan pusat bagian dari pusat perdagangan, yang memiliki keuntungan yang sama dan keduanya menjadi karakteristik keberadaan suatu kota
5	Daldjoeni (1998: 101-104)	Pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan dengan strategi: - Hierarki - Penduduk ambang batas - Jarak Pasar maksimum

**PERTUMBUHAN WILAYAH**

No.	Pendapat	Pernyataan
1	Budiharsono (2001: 13)	Struktur wilayah dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup atau suatu atom, dimana terdapat inti dan plasma yang saling melengkapi
2	Glasson (1990: 21)	Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal meliputi distribusi faktor produksi: - Tanah - Tenaga Kerja - Modal Faktor eksternal yang merupakan berkembangnya kegiatan penduduk, perpindahan modal dan tenaga kerja

No.	Pendapat	Pernyataan
3	Alkadri (1999: 11)	Kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah

#### KEDUDUKAN KOTA DALAM PERKEMBANGAN WILAYAH

No.	Pendapat	Pernyataan
1	Rondinelli (1978)	Peran kota ditentukan oleh karakteristik fungsi kota, serta aksesibilitas yang dimiliki terhadap wilayah Pengaruhnya
2	Christaller (1933) dalam Glasson (1990)	Kota menjadi titik yang melayani wilayah yang berbentuk hexagonal, sehingga secara matematik bersinggungan dengan wilayah hexagonal lain
3	Parr (1973)	Adapun yang mempengaruhi kinerja pusat pertumbuhan secara keseluruhan, yaitu: - Konsentrasi prasarana kota pada pusat kota - Konsentrasi aktivitas perekonomian (aglomerasi)

Berdasarkan kajian teori di atas didapatkan beberapa variabel yang akan digunakan dalam melakukan kajian mengenai Peranan Penetapan Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Beberapa Variabel tersebut adalah :

#### 1. Kondisi Perekonomian Wilayah

Representasi yang menggambarkan kondisi perekonomian wilayah adalah PDRB dari tiap-tiap kabupaten/kecamatan. Variabel ini terutama digunakan untuk mencari sektor basis dari tiap-tiap wilayah serta tipologi perekonomian wilayah. Sehingga nantinya tipologi pertumbuhan wilayah dapat dilihat, karena kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah (Alkadri et al., 1999: 17). Tingkat keunggulan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh klasifikasi sektor basis dan non basis, yang ditentukan dari perbandingan tingkat pendapatan regional atau jumlah tenaga kerja persektor wilayah terhadap wilayah acuan

## 2. Keberadaan fasilitas pelayanan

Variabel keberadaan fasilitas pelayanan terutama akan sangat bermanfaat digunakan dalam menentukan hierarki perkotaan di wilayah studi. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas dari fasilitas yang ada akan semakin menjadikan suatu wilayah memiliki orde yang tinggi. Beberapa fasilitas yang akan dijadikan dasar penentuan hierarki kota diantaranya adalah fasilitas pendidikan, perdagangan dan jasa, kesehatan, peribadatan dan lainnya. Dari kelengkapan fasilitas pada tiap-tiap kota ini nantinya akan menunjukkan tingkat kekotaan masing-masing wilayah yang pada akhirnya akan menggambarkan sistem perkotaan yang ada.

## 3. Demografi

Kondisi demografi (kependudukan) merupakan aspek yang sangat penting terutama sebagai indikator dalam pertumbuhan wilayah. Mobilitas penduduk (migrasi) ke suatu wilayah akan dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki daya tarik aktivitas bagi masyarakat. Selain itu pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di suatu wilayah juga merupakan indikasi bahwa pertumbuhan wilayah tersebut baik.

## 4. Aksesibilitas

Merupakan jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak pasar ini yang diwakili jarak antar kota, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas.

## 5. Pertumbuhan dan Perkembangan Aktivitas

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas terutama ditujukan pada aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan, industri serta perdagangan dan jasa, kondisi ini akan dilihat dari kondisi perekonomian wilayah yang dapat dilihat dengan interaksi antar aktivitas perekonomian. Variabel ini termasuk berdasarkan wawancara dengan

tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini perlu terutama untuk memberikan kondisi riil yang terjadi di wilayah studi.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan studi, teknik analisis, serta data-data yang sudah diperoleh di lokasi penelitian untuk dianalisis.

### **3.1 Pendekatan Studi**

Penelitian ini dilakukan di wilayah yang menjadi batas administrasi Kabupaten Aceh Besar. Ruang lingkup studi ini dibatasi hanya pada kasus peran kota terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pendekatan studi yang dipilih adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan wilayah. Pendekatan ekonomi dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa kemajuan ekonomi dapat menjadi indikator pengembangan wilayah (Alkadri et.al). Sedangkan pendekatan spatial merupakan kajian penunjuk dari kegiatan ekonomi, sehingga lebih merupakan jawaban dari pertanyaan aktivitas di dalam wilayah berlangsung, ke arah mana aktivitas itu berkembang, dan sebaiknya aktivitas tersebut optimal dikembangkan.

Pendekatan ekonomi dan keruangan yang dilakukan dapat dilihat dalam lingkup mikro, pada tiap-tiap wilayah, maupun pada lingkup makro yang mempertimbangkan interaksi antara dua wilayah yang membentuk suatu sistem wilayah yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal maupun pengaruh eksternal.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan survei, hasil survei berupa data dihitung dengan alat analisis, dan hasilnya dianalisis dengan metoda deskriptif sebagai paparan hasil analisa. Van Dalen (1973) dalam Arikunto (2002: 93), mengatakan bahwa pendekatan survei merupakan bagian dari metode penelitian deskriptif

yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian merupakan gabungan atau perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dapat membantu menyederhanakan fakta memberi jalan dalam hubungan antara ubahan-ubahan, kualitatif dapat digunakan untuk membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendasari hubungan yang terbangun (Brannen, 2002: 38).

### **3.2 Teknik Analisis**

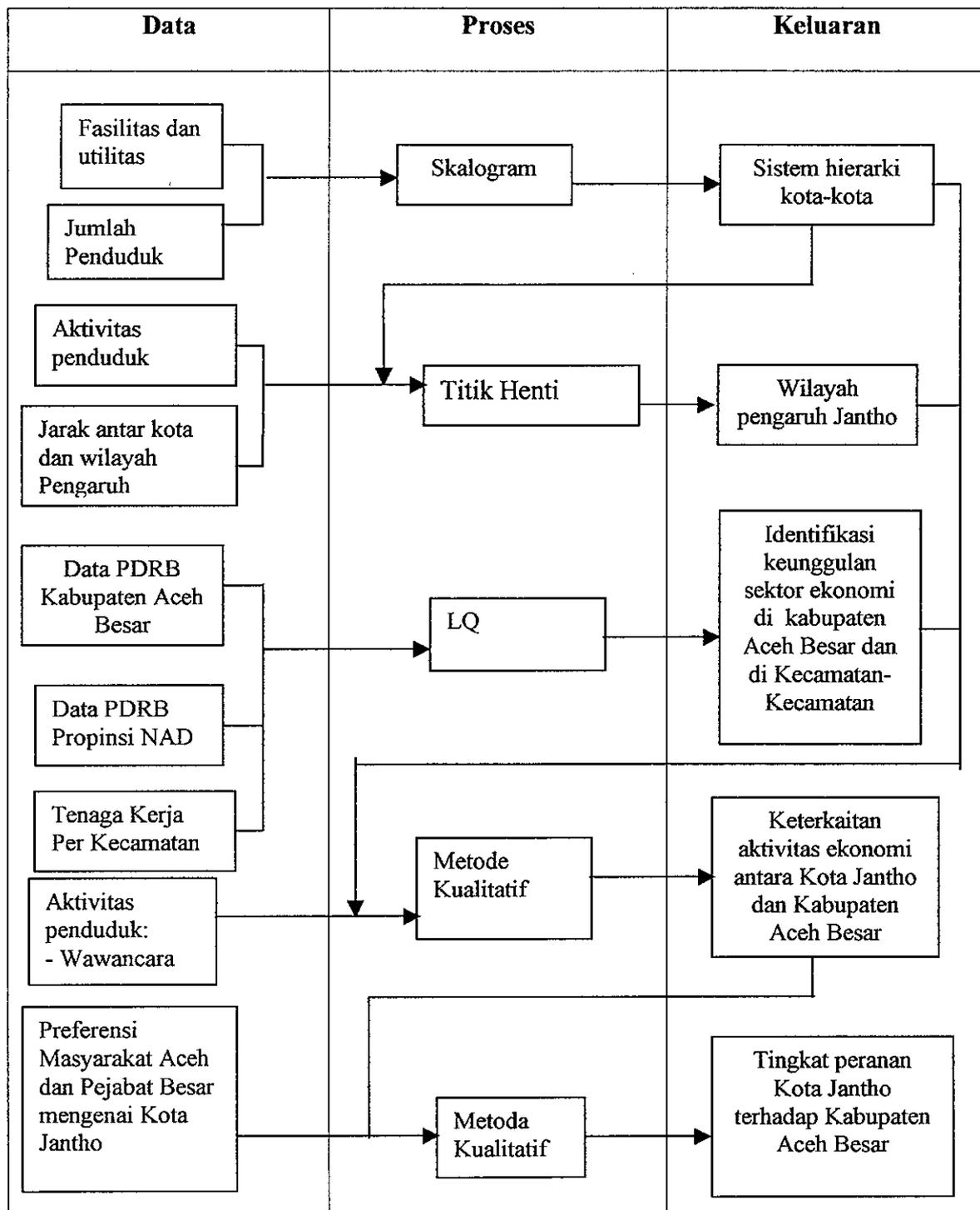
Kerangka analisis berdasarkan tujuan dari penelitian ini dan kerangka pemikiran pada BAB I, merupakan urutan analisis serta kaitannya. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peranan Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan studi ini adalah:

1. Identifikasikan perkembangan sistem kota-kota.
2. Identifikasi keunggulan ekonomi wilayah
3. Tingkat pengaruh Kota Jantho bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Data yang dikumpulkan akan diproses sesuai dengan kerangka tersebut dan akan dikeluarkan hasil berupa output. Untuk melihat lebih jelas dari tujuan, sasaran studi akan dijabarkan lagi dan prosesnya urutannya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi sistem hierarki kota-kota di wilayah Kabupaten Aceh Besar, dengan melihat kelengkapan fasilitas kota-kota dan perubahan penambahan fasilitas pertahun dari kota-kota tersebut, sehingga didapat kota-kota sebagai pusat pelayanan dengan orde hierarki I, II, III dan IV.

2. Identifikasi perubahan hierarki Kota Jantho, dari hasil identifikasi sistem kota-kota, perubahan hierarki Kota Jantho dapat dilihat dengan terjadinya penambahan fasilitas di Kota Jantho.
3. Identifikasi wilayah pengaruh Kota Jantho, dari jarak antara Kota Jantho dengan kota lain yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar akan didapat besaran wilayah pengaruh Kota Jantho, dimana akan dibandingkan dengan perubahan jumlah penduduk dan pengembangan jaringan jalan sehingga akan dilihat perubahan wilayah pengaruhnya.
4. Identifikasi pertumbuhan aktivitas perekonomian Kabupaten Aceh Besar, dari perhitungan sektor basis antar kecamatan di Kabupaten Aceh Besar didapat pertumbuhan aktivitas perekonomian di tiap kecamatan.
5. Keterkaitan antar aktivitas ekonomi antara Kota Jantho dan Kabupaten Aceh Besar dengan membandingkan hasil perbandingan sektor basis di tiap kecamatan dengan hierarki dan wilayah pengaruh Kota Jantho akan didapat keterkaitan aktivitas ekonomi di Kabupaten Aceh Besar menuju Kota Jantho.
6. Tingkat peranan Kota Jantho bagi pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar, yaitu berupa peran Kota Jantho setelah menjadi ibukota terhadap pertumbuhan wilayah di Kabupaten Aceh besar didapat dari hasil keterkaitan aktivitas perekonomian dengan dibandingkan dengan kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan akan dilihat tingkat peranan Kota Jantho, analisis ini juga akan memperhitungkan opini masyarakat dan pejabat di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Untuk memperjelas urutan analisis tersebut dapat dilihat kerangka analisis pada Gambar 3.1.



**GAMBAR 3. 1**  
**ALUR PIKIR PROSES ANALISIS DATA**

Berdasarkan pendekatan analisis, teknik analisis yang sesuai dipakai penelitian ini, yaitu dengan gabungan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk data sekunder, dilakukan teknik kuantitatif dengan alat analisis (1) skalogram, (2) titik henti, dan (3) LQ dan data primer dengan metoda kualitatif, alat analisis ini dipergunakan untuk:

### 1. Skalogram

Untuk menentukan hierarki kota-kota di Kabupaten Aceh Besar digunakan Metode Skalogram Guttman, dengan urutan sebagai berikut (Rondinelli, 1985:115):

- Membuat urutan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel kerja.
- Membuat urutan fasilitas berdasarkan pada frekuensi.
- Menggambarkan baris dan kolom sehingga membentuk matriks berdasarkan fasilitas dan kota.
- Memberikan tanda (1) pada keberadaan suatu fasilitas dan (0) untuk ketidakberadaan suatu fasilitas.
- Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi kelengkapan fasilitas suatu kota dan jumlah fasilitas yang ada pada setiap kota.
- Menyusun hierarki kota berdasarkan peringkat kelengkapan fasilitas.

Untuk menguji kelayakan penggunaan skalogram digunakan perhitungan uji reproduksi, yang meliputi uji koefisien reproduksi ( $K_r$ ). Rumus  $K_r$  adalah sebagai berikut (Singarimbun, 1995: 118):

$$K_r = \frac{\text{Jumlah Kesalahan (e)}}{\text{Jumlah observasi x jumlah variabel}}$$

Syarat  $K_r$  yang layak digunakan jika nilai  $K_r > 0,90$

## 2. Titik Henti

Untuk mengukur jangkauan wilayah pengaruh suatu kota dilakukan pengukuran jangkauan terhadap wilayah pengaruhnya atau dengan melakukan perhitungan terhadap titik henti Antara dua kota, misalnya kota j dan kota i, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Isard, 1976):

$$dkj = \frac{dij}{1 + \sqrt{Pj / Pi}}$$

Keterangan :

dkj = jangkauan wilayah pengaruh dari Kota Jantho

dij = jarak antara Kota Lambaro dan Kota Jantho

Pi = jumlah penduduk Kota Jantho

Pj = jumlah penduduk Kota Lambaro

## 3. Location Quotient

Teknik Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan di suatu daerah pada sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau sektor *leading*. Location Quotient (LQ) banyak digunakan sebagai alat yang sederhana untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah pada sektor-sektor tertentu. Data yang dapat digunakan untuk menghitung Location Quotient (LQ) tersebut adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten, data jumlah tenaga kerja kecamatan yang bekerja di setiap sektor. Apabila digunakan data PDRB/tenaga kerja maka sebaiknya data dihitung berdasarkan harga konstan yang mencerminkan pendapatan dan produksi riil. Jenis

data yang digunakan adalah data PDRB/tenaga kerja yang kita hitung dari setiap sektornya serta data PDRB wilayah acuan tempat dimana daerah yang dihitung tersebut berada.

Formula untuk perhitungan Location Quotient (LQ) tersebut adalah sebagai berikut (Warpani, 1984: 68):

$$LQ = \frac{\text{PDRB sektor i spesialisasi Aceh Besar / Total PDRB Aceh Besar}}{\text{PDRB sektor i Propinsi NAD / Total PDRB Propinsi NAD}}$$

$$LQ = \frac{\text{Tenaga Kerja sektor i spesialisasi Kec.Seulimum/TK Kec.Seulimum}}{\text{Tenaga Kerja i Kab. A Besar / T K Kab. A Besar}}$$

Dari hasil perhitungan Location Quotient (LQ) tersebut ada tiga kemungkinan hasil yang di dapat , yaitu ;

- Jika Location Quotient (LQ) > 1, maka sektor tersebut adalah sektor basis, yaitu suatu sektor di Kecamatan Seulimum yang memiliki tingkat spesialisasi tinggi dari tingkat tenaga kerja Kabupaten Aceh Besar.
- Jika Location Quotient (LQ) < 1, maka sektor tersebut adalah sektor non-basis yaitu suatu sektor di Kecamatan Seulimum yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat tenaga kerja Kabupaten Aceh Besar.
- Jika LQ = 1 maka sektor tersebut memiliki tingkat yang sama dengan tenaga kerja Kabupaten Aceh Besar.

Keunggulan dari analisis Location Quotient (LQ) adalah suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Location Quotien (LQ) dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan analisis lainnya. Sedangkan kelemahan dari analisis ini adalah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan mengakibatkan hasil perhitungan menjadi bias. Hal ini disebabkan karena adanya disagregasi PDRB Sektor i daerah hitung, pemilihan total PDRB baik wilayah acuan maupun daerah hitung, pemilihan entity yang diperbandingkan serta pemilihan tahun dan kualitas data.

Teknik wawancara untuk data primer adalah dengan tatap muka dengan narasumber, dan mempergunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Hal yang membedakan dengan wawancara biasa adalah, pewawancara selalu bertanya, narasumber selalu menjawab, tidak menjurus ke suatu jawaban (netral) dan mengikuti panduan (Nazir, 1999: 234).

### **3.3 Data yang Digunakan**

Untuk menunjang kesempurnaan analisis tulisan ini serta menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Kedua jenis data ini diambil sesuai dengan kebutuhan analisis, yaitu data-data pada wilayah yang diteliti sebagai unit analisisnya baik lingkup kabupaten dan per kecamatan. Teknik pengambilan data, yaitu:

1. Untuk data sekunder dengan cara mengutip data dari dokumen-dokumen yang ada di kantor – kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar atau Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Data primer dengan mewawancarai para aparat pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

**TABEL III. 1**  
**DATA YANG DIGUNAKAN**

No	Nama Data	Unit Data	Rentang Waktu	Jenis Data	Sumber
1.	Data PDRB Kab. Aceh Besar	Kabupaten	1980-2000	Sekunder, angka	BPS dan Bappeda
2.	Data PDRB Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	Propinsi	1980-2000	Sekunder, angka	BPS dan Bappeda
3.	Data Tenaga Kerja perkecamatan	Kecamatan	1980, 1990, 2000	Sekunder, Angka	BPS dan Bappeda
4.	Data Fasilitas Jantho dan Kota-kota lain di Kabupaten Aceh Besar	Kecamatan	1984-2000	Sekunder, angka	BPS dan Bappeda
5.	Data Kependudukan	Kecamatan	1984-2002	Sekunder, angka	BPS
6.	Pandangan mengenai kondisi Kota Jantho Terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	2003	Primer, Wawancara	Aparat (pejabat di lingkungan Pemkab Aceh Besar
7.	Preferensi Masyarakat Terhadap Aktivitas di Kota Jantho	Kecamatan	2003	Primer, Wawancara	Penduduk Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Montasik, Lhoong, Mesjid Raya
8.	Konsidisi Fasilitas dan Utilitas Prasarana Kota Jantho Serta Kondisi Umum Lainnya	Kota Jantho	2002	Sekunder dan primer, Peta dan foto	Bappeda, Hasil observasi langsung

*Sumber: Hasil Penyusunan 2003*

Data sekunder berupa data-data PDRB Kabupaten Aceh Besar, jumlah penduduk, jumlah sarana dan prasarana (fasilitas), tenaga kerja dan jarak antar kota. Keseluruhan data tersebut diperoleh dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar Aceh, Bappeda Kabupaten Aceh Besar, BPS Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bappeda Kota Banda Aceh, Bappeda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan beberapa sumber yang mempunyai data mengenai topik penelitian.

Data primer berupa data preferensi masyarakat terhadap pengaruh Kota Jantho sebagai Ibukota terhadap wilayah Kabupaten Aceh Besar diperoleh dengan teknik wawancara terhadap responden yang ada di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Karena wilayah yang diteliti luas, maka untuk menentukan koresponden dengan membagi batas alam (Singarimbun, 1995:154), yaitu Kecamatan Lhoong, Masjid Raya dan Montasiek. Ketiga kecamatan tersebut dianggap bisa mewakili beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar yang secara geografis terbagi tiga. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 30 orang, dengan perincian 5 orang masyarakat umum dan 5 orang pelaku ekonomi pada masing-masing kecamatan, jumlah responden ini diambil secara sampling acak berstrata.

Data primer berupa kebijakan umum Kabupaten Aceh Besar terutama mengenai pemindahan ibukota ke Jantho, data mengenai kondisi Jantho, pelayanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan serta pertumbuhan Kota Jantho diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dianggap dapat memberikan jawaban karena pengalaman, kesenioritasan dan pengetahuan mereka. Para aparat yang diwawancarai berasal dari pejabat di Bappeda Kabupaten Aceh Besar dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar jumlah responden ini diambil secara purposive sampling.

1001 - PUSTAKA - 100101

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat berbagai arsip dan catatan penting lainnya melalui pencatatan langsung dari instansi terkait, ketika melakukan wawancara dan data-data teoritis ketika melakukan survei. Dalam melakukan dokumentasi, pelaksanaannya langsung di tempat data diperoleh yaitu di Kota Jantho dan Kota Banda Aceh.

## **BAB IV**

### **KARAKTERISTIK WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTA JANTHO**

Pada bab ini akan dibahas kondisi real dari wilayah penelitian, yang dibagi dua sub bab. Kedua sub bab ini adalah karakteristik Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Jantho.

#### **4.1 Kajian Umum Wilayah Kabupaten Aceh Besar**

Kabupaten Aceh Besar terletak di Ujung Utara Pulau Sumatera, yaitu pada 5,2°-5,8° Lintang Utara dan 95,0°-95,8° Bujur Timur dengan batas wilayah di Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, di Timur dengan Kabupaten Pidie, Selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya (hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat), sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Aceh Besar sendiri merupakan wilayah yang menyangga Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kabupaten ini letaknya strategis karena berada dipintu masuk ke Selat Malaka sebagai jalur pelayaran perdagangan dunia. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.947,12 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 285.925 jiwa (Sensus Penduduk 2000).

Kecamatan-kecamatan yang ada sebelum pemekaran Tahun 2001 berjumlah tiga belas kecamatan yaitu, Kecamatan Lhoong, Lhoknga/Leupung, Indrapuri, Seulimum, Montasiek, Suka Makmur, Ingin Jaya, Darul Imarah, Masjid Raya, Kuta Baro, Darussalam, Peukan Bada dan Pulo Aceh. Ke-tiga belas kecamatan ini akan dijadikan gambaran terhadap kondisi Kabupaten Aceh Besar kemudian, karena alasan keseragaman data yang diambil berdasarkan time series dari tahun 1984 ke 2000, sehingga pada analisis nantinya data yang tersedia adalah data ke-tiga belas kecamatan ini, dan Kota Jantho berada pada Kecamatan Seulimum karena Kecamatan Kota Jantho baru dimekarkan Tahun 2001.

**TABEL IV. 1**  
**JARAK DARI IBUKOTA KECAMATAN MENUJU**  
**IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR DAN IBUKOTA**  
**PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

No.	Kecamatan	Kota	Jarak ke Ibukota (km)	
			Kabupaten	Propinsi
1.	Lhoong	Lhoong	106	54
2.	Lhoknga/Leupung	Lhoknga	68	16
3.	Indrapuri	Indrapuri	27	25
4.	Seulimuem	Seulimuem	12	42
5.	Mesjid Raya	Krueng Raya	40	31
6.	Darussalam	Lambaro Angan	55	13
7.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	50	12
8.	Montasik	Montasik	40	16
9.	Suka Makmur	Sibreh	37	15
10.	Darul Imarah	Lampeuneuret	48	4
11.	Ingin Jaya	Lambaro	44	8
12.	Peukan Bada	Peukan Bada	50	6
13.	Pulo Aceh	Lampuyang*	82	30
14.	Leupung	Leupung	72	24
15.	Kuta Cot Glie	Lampakuk	20	32
16.	Lembah Seulawah	Saree	49	77
17.	Baitussalam	Lambada	57	11
18.	Kuta Malaka	Samahani	33	19
19.	Simpang Tiga	Krueng Mak	40	18
20.	Darul Kamal	Peukan Bilui	45	8
21.	Krueng Barona Jaya	Cot Irie	52	8
22.	Kota Jantho	Kota Jantho**	0	52

Keterangan:

\* = Di pisah oleh laut

\*\* = Ibukota Kabupaten

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Besar

Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar yaitu 22 kecamatan hasil pemekaran Oktober 2001 dari jumlah sebelumnya yaitu 13 kecamatan hasil. Kecamatan-kecamatan dengan ibukota masing-masing adalah; Kecamatan Lhoong dengan ibukota Lhoong, Leupung (Leupung), Lhoknga (Lhoknga), Pulo Aceh (Lampuyang), Peukan Bada (Peukan Bada), Darul Imarah (Lampeneureut), Darul Kamal (Peukan Bilui), Simpang Tiga (Krueng Mak), Suka Makmur (Sibreh), Kuta Malaka (Samahani), Montasiek (Montasiek), Ingin Jaya (Lambaro), Krueng Barona Jaya (Cot Irie), Kuta Baro (Peukan Ateuk),

Darussalam (Lambaro Angan), Baitussalam (Lambada), Mesjid Raya (Krueng Raya), Indrapuri (Indrapuri), Kuta Cot Glie (Lampakuk), Seulimeum (Seulimum), Kota Jantho (Kota Jantho) dan Lembah Seulawah (Saree) dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Kota Jantho.

Kondisi alam perbukitan, dan sebagian merupakan dataran rendah dengan suhu rata-rata 26°, curah hujan rata-rata 13 hari perbulan. Dengan kondisi alam berbukitan yang merupakan jalur dari Pegunungan Bukit Barisan, Kabupaten Aceh Besar dapat dibagi sesuai dengan kondisi geografisnya menjadi tiga wilayah yang dipisahkan oleh pegunungan tadi, yaitu pesisir timur, wilayah tengah, pesisir barat, dengan satu kecamatan yang terpisah oleh laut, yaitu Pulo Aceh yang merupakan wilayah kepulauan.

Dari profil Kabupaten Aceh Besar (Kompas, 14 Juni 2002), daerah ini menonjol untuk mengembangkan wisata alam seperti air terjun Teuhom dan Peukan Bileuy, sumber air panas Ie Seum, Pantai Lhoknga dan Lampuuk, Taman Hutan Raya Seulawah dan Cagar Alam Jantho, situs sejarah Indrapatra dan lainnya. Tanah yang subur menjadi sangat potensial bagi lahan pertanian, dengan produksi padi sebagai faktor utama sektor agraris memakai luas lahan 46.231 Ha dengan hasil produksi tahun 2000 yaitu 195.189 ton diikuti palawija, juga sektor peternakan unggas, ternak besar dan kecil, dengan memasok kebutuhan ke Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya. Selain pertanian sektor ekonomi kedua terbesar adalah industri pengolahan yang masih bersifat industri kecil berupa bordir, kerajinan tangan. Industri pengolahan yang terbesar adalah Pabrik Semen Andalas yang diambil dari pertambangan di Lhoknga, dengan produksi tahun 2000 sebesar 570.000 ton dengan kebutuhan dalam propinsi 25% dan sisanya di ekspor keluar propinsi dan keluar negeri. Jumlah sarana dan prasarana pendukung cukup baik, jalan yang menghubungkan antar wilayah beraspal, dan mempunyai pelabuhan laut Malahayati di Krueng Raya (di

Kecamatan Mesjid Raya), Bandara Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang (di Kecamatan Montasik). Hal lain yang mendukung adalah menjadi wilayah penyangga dari Sabang sebagai pelabuhan bebas, menjadikan potensi dalam sektor jasa, perdagangan dan perindustrian.

Pada tahun 1999, di wilayah Kabupaten Aceh Besar terjadi konflik bersenjata sebagai akibat adanya gejolak politik di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Akibat konflik ini, aktivitas di kantor pemerintahan menjadi lumpuh, sehingga pelayanan masyarakat menjadi terganggu. Lumpuhnya aktivitas pemerintahan terlihat dengan ditutupnya kantor-kantor kecamatan, dan sebagian ada yang dibakar, bahkan aktivitas pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di Kota Jantho sempat lumpuh dan mengakibatkan kegiatan pemerintahan banyak dilakukan di rumah-rumah pegawai atau di Kota Banda Aceh. Pada tahun akhir tahun 2000 intensitas konflik agak menurun, dan aktivitas pemerintahan di Kota Jantho sudah berjalan normal, tapi hingga saat ini kantor-kantor kecamatan masih belum berfungsi secara optimal (bahkan ada yang tidak berfungsi lagi, karena terbakar atau sudah beralih tangan). Kondisi konflik di wilayah Kabupaten Besar dapat dilihat pada Peta 4.1.

#### **4.1.1 Kondisi Fisik Alam**

Kondisi topografi di Kabupaten Aceh Besar terbagi tiga yaitu daerah dataran rendah, landai berbukit-bukit dan daerah pegunungan, yang ketinggiannya bervariasi dari 0 m sampai 1.500 m di atas permukaan laut. Daerah landai/dataran terdapat di sebelah Barat wilayah kabupaten, daerah yang bergelombang terdapat di pertengahan dan sebagian sebelah Utara wilayah, sedangkan pegunungan terdapat di wilayah sebelah Selatan dan Timur Kabupaten Aceh Besar. Dari topografi tersebut maka wilayah Aceh Besar terbagi menurut tiga wilayah geografis, yaitu wilayah Tengah, wilayah Barat dan wilayah Timur

terlihat pada Gambar 1.1. Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar terletak di wilayah tengah, dan tepat di pegunungan Bukit Barisan atau di Kaki Gunung Seulawah Agam.

Kabupaten Aceh Besar mempunyai wilayah kepulauan, pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Kerisik, Pulau Bunta dan Pulau Batee yang merupakan Wilayah Kecamatan Pulo Aceh, selain itu ada juga pulau-pulau kecil di kecamatan lain.

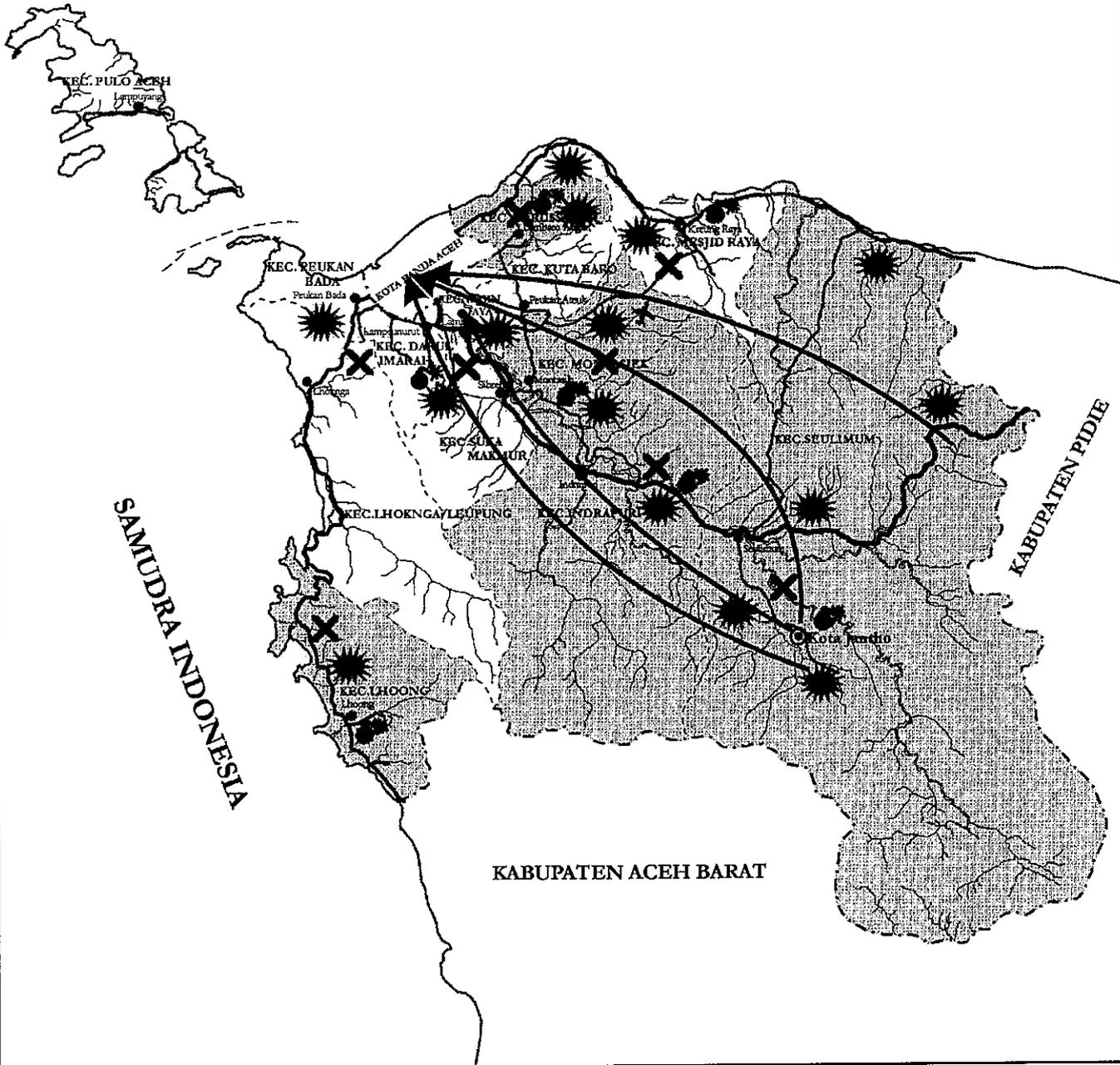
#### **4.1.2 Kependudukan**

##### **4.1.2.1 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan, dan Jenis Kelamin**

Penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut registrasi tahun 2000 berjumlah 285.925 jiwa dengan jumlah keluarga 63.444. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yaitu 38.129 jiwa (masih tergabung dengan Kecamatan Darul Kamal), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Pulo Aceh yaitu 5.777 jiwa. Penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Besar akhir tahun 2000 berjumlah 142.998 jiwa dan perempuan 142.927 jiwa dengan sex ratio penduduk 100,05, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000). Untuk melihat jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar dapat melihat Tabel IV.2.

Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Besar sebesar 96,14 penduduk perkm<sup>2</sup>. Kepadatan ini tidak tersebar merata, dengan konsentrasi penduduk terbanyak di Kecamatan Darul Imarah dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 775,77 penduduk perkm<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah Pulo Aceh 24,00 penduduk perkm<sup>2</sup> (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

# SELAT MALAKA



  
 PROGRAM PASCA SARJANA  
 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 WILAYAH DAN KOTA  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  


---

**TESIS**  


---

 PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
 KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
 WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

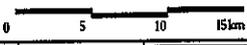
**PETA**  
**KONDISI KONFLIK TAHUN 1999-2000**

**LEGENDA**

Batas Perairan	Wilayah Kondisi Konflik Tinggi
Jalan Negara	Wilayah Kondisi Konflik Sedang
Jalan Propinsi	Wilayah Kondisi Konflik Rendah
Batas Kecamatan	Wilayah Tidak Ada Konflik
Batas Kabupaten	Arus Pengungsian Warga
Sungai	Arah Pemindahan Aktivitas Administrasi Pemerintahan
Kota	Lokasi Kontak Senjata
Ibu Kota Kecamatan	Lokasi Pencegatan/Perampokan/Penculikan
Ibu Kota Kabupaten	Lokasi Pengrusakan Fasilitas Umum

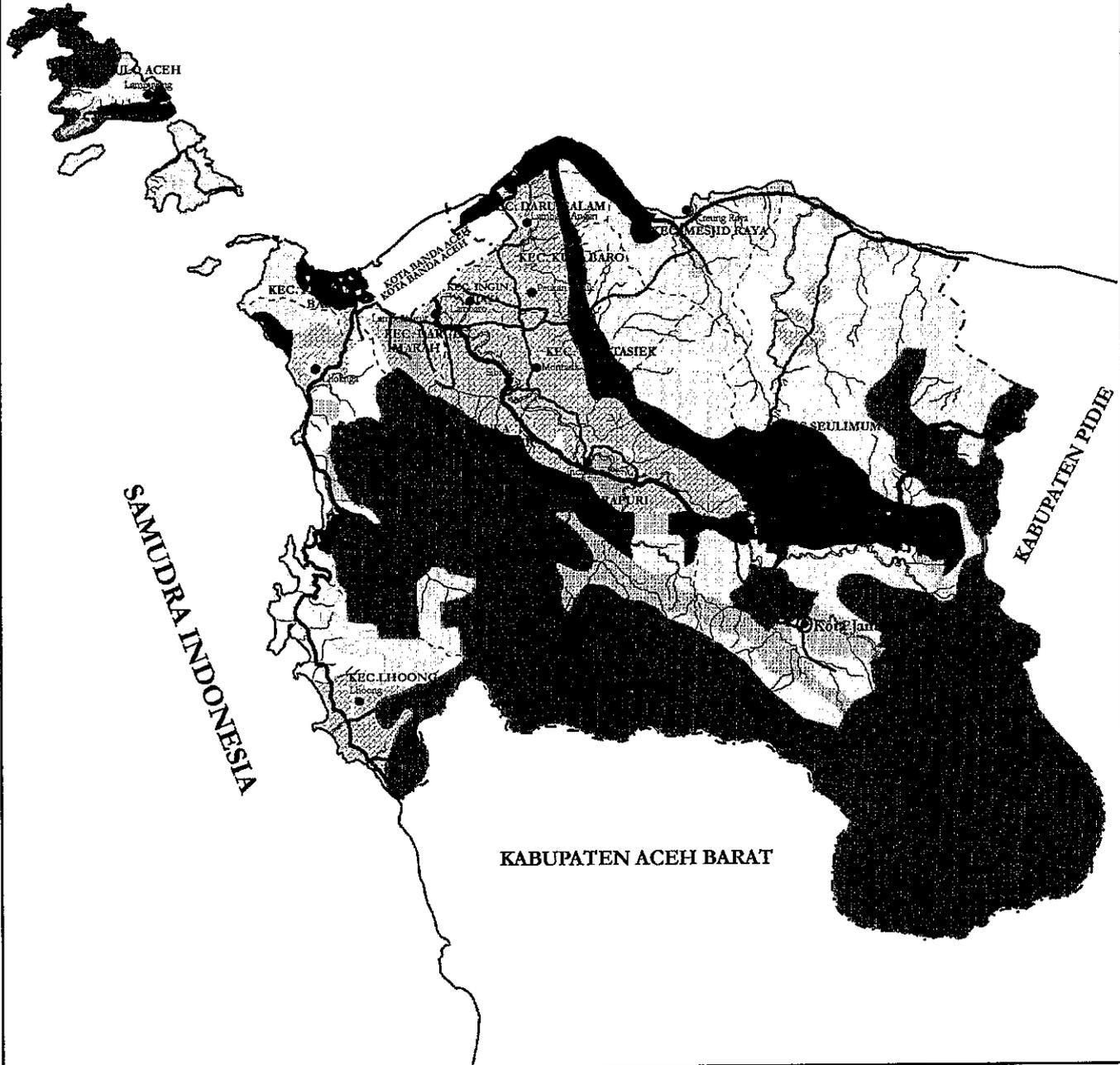
Sumber :  
 Dari Berbagai Sumber

**SKALA**

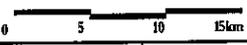
NUMERIK	GARIS
1 : 500.000	
	<b>4.1</b> <b>58</b>
UTARA	NO. PETA    HALAMAN

Tahun Pembuatan :  
 2003

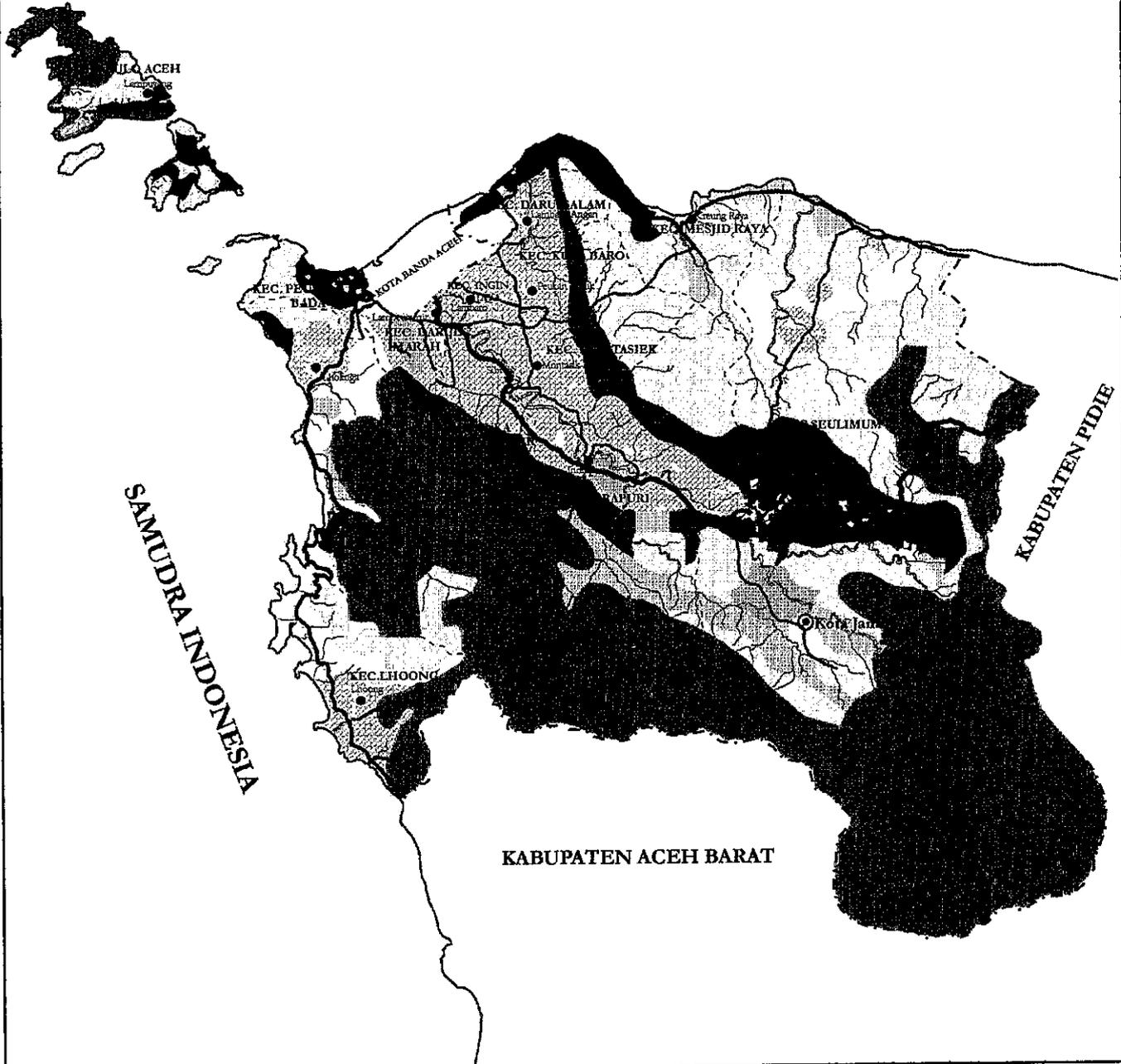
# SELAT MALAKA



KABUPATEN ACEH BESAR

 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	<b>PETA TATA GUNA LAHAN                  KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1995</b>		Sumber : <b>BAPPEDA KABUPATEN ACEH BESAR</b>	
	<b>SKALA</b>			
<b>TESIS</b>	<b>LEGENDA</b>		NUMERIK <b>1 : 500.000</b>	GARIS 
	Batas Perairan Jalan Negara Jalan Propinsi Batas Kecamatan Batas Kabupaten Sungai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kabupaten Permukiman Irigasi	Hutan Produksi Konversi Kawasan Penyangga Transmigrasi Hutan Lahan Kering Tambak Lindung Sekitar Mata Air Industri Perkebunan Rakyat Lahan Basah Peternakan	Hutan Produksi Hutan Lahan Basah Peternakan	
PERANAN PEMETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR			<b>59</b>	UTARA      NO. PETA      HALAMAN
			Tahun Pembuatan : 2003	

# SELAT MALAKA



KABUPATEN ACEH BARAT

SAMUDRA INDONESIA

KABUPATEN PIDIE

## PETA TATA GUNA LAHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2000

LEGENDA					
	Batas Perairan		Hutan Produksi Konversi		Hutan Produksi
	Jalan Negara		Pengembangan lain-lain		Kawasan Penyangga
	Jalan Propinsi		Transmigrasi		Hutan
	Batas Kecamatan		Lahan Kering		Tambak
	Batas Kabupaten		Lindung Sekitar Mata Air		Industri
	Sungai		Perkebunan Rakyat		Lahan Basah
	Kota		Irigasi		Peternakan
	Ibu Kota Kecamatan				
	Ibu Kota Kabupaten				
	Permukiman				
	Irigasi				

Sumber :  
BAPPEDA KABUPATEN ACEH BESAR

### SKALA

NUMERIK	GARIS
1 : 500.000	



4.3

60

UTARA      NO. PETA      HALAMAN

Tahun Pembuatan :  
2003



PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**TESIS**

PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PEREMBANGUNAN  
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

Jumlah kelahiran anak laki-laki sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2000 berjumlah 1.008 orang dan perempuan lebih besar yaitu 1.069 orang dengan sex ratio sebesar 94,29. Untuk jumlah kematian per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2000 lelaki lebih banyak yaitu 384 dan untuk perempuan 335 orang. Dengan kondisi ini laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,48% dengan penambahan penduduk perempuan lebih banyak (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

Jumlah penduduk di perkotaan pada Kabupaten Aceh Besar terlihat pada Tabel III.2, dengan jumlah total pada tahun 2000 sebesar 39.048 yang tersebar pada ibukota-ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten. Jumlah rata-rata penduduk perkotaan terbanyak tersebar di Kota Lambaro dan Lampeunerut

**TABEL IV. 2**  
**JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN ACEH BESAR**  
**TAHUN 1980, 1990 DAN 2000**

Kecamatan	Kota	Jumlah penduduk			Jumlah penduduk kota		
		1984	1990	2000	1984	1990	2000
Seulimum	Kota Jantho				2.098	3.272	3.772
Lhoong	Lhoong	9.562	10.238	11.472	1.129	1.212	1.359
Lhoknga/Leupung	Lhoknga	19.044	21.061	23.503	2.291	2.536	2.839
Indrapuri	Indrapuri	20.962	22.547	25.915	2.494	2.706	3.110
Seulimum	Seulimum	18.433	28.251	31.583	2.747	3.644	3.765
Mesjid Raya	Krueng Raya	5.843	8.502	10.345	760	1.037	1.241
Darussalam	Lambaro Angan	16.625	23.041	30.451	1.844	2.742	3.715
Kuta Baro	Peukan Ateuk	15.031	18.302	21.017	1.653	2.196	2.522
Montasiek	Montasiek	14.926	17.237	19.232	1.657	1.948	2.308
Sukamakmur	Sibreh	15.526	17.249	20.754	1.848	2.070	2.553
Darul Imarah	Lampeunerut	23.435	27.932	38.129	2.789	3.327	4.575
Ingin Jaya	Lambaro	21.352	25.223	29.587	2.769	3.322	3.837
Peukan Bada	Peukan Bada	11.719	15.725	18.160	1.383	1.887	2.197
Pulo Aceh	Lampuyang	4.723	5.092	5.777	520	570	659
<b>Jumlah Penduduk Kabupaten</b>		<b>197.181</b>	<b>240.400</b>	<b>285.925</b>	<b>25.981</b>	<b>32.469</b>	<b>38.452</b>

Sumber: BPS Aceh Besar

#### **4.1.2.2 Kelompok Umur**

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar tahun 2000, paling banyak adalah kelompok umur antara 5-9 tahun berjumlah 37.129 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah kelompok umur usia 75 tahun ke atas berjumlah 3.064 jiwa. Kelompok umur usia produktif antara 15-64 tahun adalah 169.737 jiwa, dengan ratio usia produktif adalah 59,36% berarti lebih besar dari usia non produktif (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000). Dengan besarnya kelompok umur usia produktif, dapat dikatakan beban tanggungan penduduk usia non produktif dapat diatasi oleh penduduk pada usia produktif.

#### **4.1.2.3 Angkatan Kerja dan Jenis Pekerjaan**

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 1999 sejumlah 148.896 orang naik menjadi 153.700 orang pada tahun 2000 diikuti pula banyaknya pencari kerja pada tahun 1999 berjumlah 23.838 orang menjadi 24.569 orang pada tahun 2000. Dengan kondisi besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian, maka suasana di Kabupaten Aceh Besar masih sebagian bercorak pedesaan yang agraris. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini masih bisa bertambah karena sistem penggunaan tenaga kerja yang masih merekrut keluarga. Di Jantho sendiri, penduduk masih didominasi oleh pegawai negeri, pelajar dan petani yang menjadi transmigran di wilayah tersebut. Untuk melihat jumlah tenaga kerja perkecamatan dapat dilihat di Tabel Tenaga Kerja Tabel IV. 3, IV.4, IV.5, IV.6.

**TABEL IV. 3**  
**JUMLAH TENAGA KERJA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN**  
**USAHA DI KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1980, 1990 DAN 2000**

No.	Lapangan Usaha	1980	1990	2000
1.	Pertanian	72.308	59.250	72.508
2.	Pertambangan dan Galian	1.959	1.744	8.390
3.	Industri Pengolahan	25.060	33.528	49.391
4.	Listrik dan Air Minum	621	802	883
5.	Bangunan Konstruksi	9.306	15.274	14.726
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21.126	23.707	18.013
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	15.216	15.968	25.085
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.315	3.646	4.303
9.	Jasa-Jasa	14.873	17.035	23.009
10.	Lainnya	3.151	2.183	1.816
	<b>Total Angkatan Kerja</b>	<b>163.260</b>	<b>169.334</b>	<b>216.247</b>

Sumber: BPS Aceh Besar

### 4.1.3 Fasilitas Sosial, Ekonomi serta Sarana dan Prasarana Perhubungan

#### 4.1.3.1 Fasilitas Peribadatan

Karena sebagian besar penduduknya beragama Islam maka di Kabupaten Aceh Besar, sarana tempat ibadah yang ada hanya tempat ibadah umat beragama Islam, pada tahun 2000 jumlah sarana berupa mesjid sebanyak 122 buah, meunasah 600 buah dan mushalla 324 buah. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar mempunyai sarana tersebut, dengan kecamatan yang terbanyak jumlah sarannya adalah Kecamatan Seulimum (masih tergabung dengan Kecamatan Lembah Seulawah dan Kecamatan Kota Jantho) yaitu 16 buah mesjid, dan Kecamatan Montasik yang paling sedikit yaitu 5 buah (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

TABEL IV. 4  
ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT WILAYAH ADMINISTRASI  
DAN LAPANGAN USAHA TAHUN 1980

NO.	LAPANGAN USAHA	Kecamatan										Tot. Kab			
		Lhoong	Lhoknga	Indrapuri	Sulitum	Mesjid Raya Darussalam	Kuta Baro	Montasiek	Sukamakmur	Darul Imarah	Ingin Jaya		Peukan Bada	Pulo Aceh	
1.	Pertanian	5.501	7.287	9.824	10.380	1.085	8.660	6.014	6.852	8.545	1.853	3.129	1.357	2.171	72.308
2.	Pertambangan dan Galian	77	196	175	98	134	136	127	108	104	226	143	148	37	1.959
3.	Industri Pengolahan	657	3.682	2.082	2.332	889	2.729	1.071	1.518	882	3.029	2.591	1.286	414	25.060
4.	Listrik dan Air Minum	22	54	57	58	16	55	37	45	52	73	71	68	13	621
5.	Bangunan Konstruksi	288	952	745	984	248	646	708	763	453	1.564	1.202	713	97	9.306
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	468	2.195	1.475	1.142	1.258	973	956	1.248	1.524	3.816	5.104	1.065	202	21.126
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	142	983	958	1.145	603	921	921	958	841	3.051	3.214	1.258	121	15.216
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	49	389	189	368	79	210	222	220	283	489	587	499	10	3.315
9.	Jasa-Jasa	64	661	713	698	367	1.441	1.124	1.136	634	3.948	2.143	2.276	112	14.873
10.	Lainnya	38	112	175	183	194	186	204	384	282	443	503	441	26	3.151
Total Angkatan Kerja		7.298	14.780	16.026	16.830	5.147	15.608	11.912	12.848	12.683	18.099	18.294	9.989	3.746	163.260
Total Jumlah Penduduk		11.987	22.401	23.112	24.321	7.461	19.986	18.434	16.483	17.631	26.596	26.213	14.832	6.957	236.414

Sumber: BPS Aceh Besar

TABEL IV. 5  
 ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT WILAYAH ADMINISTRASI  
 DAN LAPANGAN USAHA TAHUN 1990

NO	LAPANGAN USAHA	Kecamatan										Tot. Kab.			
		Lhoong	Lhoknga	Indrapuri	Selulimum	Mesjid Raya	Darusalam	Kuta Baro	Montasiek	Sukamakmur	Darul Imarah		Ingin Jaya	Peukan Bada	Pulo Aceh
1.	Pertanian	5.258	6.804	9.161	8.985	1.064	8.660	5.681	7.534	8.544	1.246	2.862	1.387	1.987	59.250
2.	Pertambangan dan Galian	67	196	136	98	134	136	127	108	104	201	123	148	28	1.744
3.	Industri Pengolahan	657	3.974	2.551	2.989	1.088	3.929	1.971	1.518	882	3.029	2.391	1.885	514	33.528
4.	Listrik dan Air Minum	29	76	83	65	22	67	64	54	68	88	95	76	15	802
5.	Bangunan Konstruksi	328	982	938	1.947	926	1.785	1.276	803	493	2.624	1.872	753	117	15.274
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	488	2.261	1.496	1.969	1.825	1.681	1.525	1.248	1.524	3.324	5.104	1.978	202	23.707
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	175	993	981	1.327	604	929	986	1.198	1.096	3.051	3.224	1.523	121	15.968
8.	Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	44	398	119	492	119	202	219	257	374	449	496	437	40	3.646
9.	Jasa-Jasa	64	817	867	2.012	487	1.936	1.358	1.524	873	3.003	2.156	2.897	168	17.035
10.	Lainnya	31	92	104	106	184	178	197	321	253	403	412	379	26	2.183
	Total Angkatan Kerja	7.092	15.162	16.270	19.813	6.153	18.175	13.287	14.074	13.808	13.287	17.693	11.034	3.528	169.394
	Total Jumlah Penduduk	10.238	21.061	22.547	28.251	8.502	23.041	18.302	17.237	17.249	27.932	25.223	15.725	5.092	240.400

Sumber: BPS Aceh Besar

TABEL IV. 6  
ANGKATAN KERJA YANG BEKERJA MENURUT WILAYAH ADMINISTRASI  
DAN LAPANGAN USAHA TAHUN 2000

NO.	LAPANGAN USAHA	Kecamatan										Tot. Kab.			
		Lhoong	Lhekaga	Indrapuri	Seulimum	Mesjid Raya	Darusalam	Kuta Baro	Montasiak	Sukamakmur	Darul Imarah		Ingin Jaya	Peukan Bada	Pulo Aceh
1.	Pertanian	5.525	7.209	9.648	10.407	1.083	8.685	6.065	6.798	8.494	2.286	2.771	1.317	2.247	72.508
2.	Pertambangan dan Galian	252	1.243	608	322	440	446	578	355	341	742	798	486	120	8.390
3.	Industri Pengolahan	1.158	6.054	3.997	4.523	1.454	5.241	2.978	2.947	1.542	3.145	1.432	1.957	879	49.391
4.	Listrik dan Air Minum	16	32	85	58	25	45	55	40	85	182	189	143	16	883
5.	Bangunan Konstruksi	497	1.444	1.220	1.652	921	1.798	1.152	1.217	747	2.461	1.882	1.141	177	14.726
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	399	2.487	1.258	1.144	1.073	830	815	1.064	1.299	3.254	4.352	1.505	172	18.013
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	527	1.421	1.590	1.900	1.001	1.528	1.528	1.590	1.396	5.063	5.334	2.068	201	25.085
8.	Keuangan, Persewaan Jasa Perusahaan	46	435	240	557	132	250	318	305	487	558	650	559	34	4.303
9.	Jasa-Jasa	134	816	904	2.518	568	2.294	1.630	2.204	981	6.111	4.987	3.523	173	23.009
10.	Lainnya	11	18	12	17	25	24	18	36	21	46	84	58	14	384
Total Angkatan Kerja		8.563	18.094	19.524	24.276	7.528	23.118	16.181	14.577	15.553	28.364	22.479	13.781	4.209	216.247
Total Jumlah Penduduk		11.472	23.503	25.915	31.583	10.345	30.451	21.017	19.232	20.754	38.129	29.587	18.160	5.777	286.925

Sumber: BPS Aceh Besar

Pondok pesantren modern/terpadu di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 berjumlah 9 buah terdapat di Kecamatan Lhoknga/Leupung (belum dimekarkan), Seulimum (belum dimekarkan, terletak di Kota Jantho) Darussalam, Sukamakmur, Darul Imarah, Ingin Jaya dan Montasik (yang terbesar, masih tahap pembangunan tapi sudah berfungsi) masing-masing 1 buah. Sementara pondok pesantren tradisional/dayah berjumlah 67 buah dan tersebar di seluruh kecamatan (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

#### **4.1.3.2 Fasilitas Pendidikan**

Pada bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, jumlah sarana dan tenaga guru mencukupi, di semua kecamatan pada tahun 2000 sudah lengkap fasilitas pada semua jenjang pendidikan umum, termasuk TK, SD, SMP dan SMU. Untuk sekolah-sekolah kejuruan, pendidikan khusus berupa SMK pertanian, perikanan, dan teknik. Untuk pendidikan agama Islam, sekolah MIN, MTSN, MAN sudah ada disemua kecamatan pada tahun 2000. Selain jenjang dasar dan menengah untuk perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Besar terdapat satu Universitas Swasta (Universitas Abulyatama) di Kecamatan Kuta Baro dan satu Akademi Kesehatan (Akademi Gizi) di Kecamatan Lhoknga/Leupung.

Jumlah sarana sekolah tahun 2000 di Kabupaten Aceh Besar berupa sekolah taman kanak-kanak (TK) sebanyak 70 buah dengan jumlah guru sebanyak 204 orang dan murid sebanyak 2.623 orang. Pada tingkat pendidikan dasar (SD) jumlah sekolah sebanyak 218 buah, dengan jumlah guru sebanyak 1.915 orang dan murid sebanyak 30.041 orang. Untuk sekolah lanjutan pertama (SLTP) sebanyak 44 buah dengan jumlah guru sebanyak 1.163 orang dan murid sebanyak 10.563 orang. Untuk tingkat sekolah menengah umum (SMU) sebanyak 20 buah, dengan jumlah guru sebanyak 715 orang dan murid sebanyak 7.169 orang. Jumlah sarana pendidikan ini juga ditambah dengan adanya sanggar kegiatan belajar

(SKB) di Kecamatan Sukamakmur, Raudathul Athfa di beberapa kecamatan, MIN di semua kecamatan, MTSN di semua kecamatan, dan MAN di hampir semua kecamatan, SMK di beberapa kecamatan (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

#### **4.1.3.3 Fasilitas Kesehatan**

Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas merupakan faktor utama dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Jumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 sebanyak 17 buah, ini berarti tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, puskesmas ini terdiri dari rawat inap, puskesmas biasa dan puskesmas pembantu. Fasilitas rumah sakit di Kabupaten Aceh Besar ada di Kota Jantho, tetapi untuk rujukan perawatan kesehatan lanjutan penduduk di Kabupaten Aceh Besar dilayani Rumah Sakit Zainal Abidin di Kota Banda Aceh.

#### **4.1.3.4 Fasilitas Pertanian dan Perikanan**

Kondisi Kabupaten Aceh Besar yang agraris fasilitas pertanian merupakan kebutuhan pokok, fasilitas pertanian ini berupa penggilingan padi pada tahun 2000 sebanyak 35 buah yang tersebar di kecamatan Seulimum, Indrapuri, Kuta Baro, Darussalam, Montasiek, Sukamakmur, Darul Imarah dan Ingin Jaya. Untuk pengolahan ubi kayu sebanyak 15 buah di Kecamatan Seulimum dan Peukan Bada.

Kondisi geografis Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari pantai dan kepulauan membuat usaha perikanan sebagai salah satu sektor yang dikembangkan. Kota-kota kecamatan di pinggir pantai seperti Lhoknga, Leupung, Masjid Raya atau desa-desa nelayan mendukung secara tradisional produksi ikan di Kabupaten Aceh Besar. Perikanan darat juga lebih berkembang pada kecamatan-kecamatan di pedalaman seperti Montasik, Seulimum, di Kota Jantho produksi perikanan darat menjadi salah satu unggulan.

Banyaknya sarana perikanan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2000 seperti TPI, PPI dan Balai Nelayan masing-masing adalah 5 buah, 13 buah dan 7 buah (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

#### **4.1.3.5 Fasilitas Perindustrian dan Perdagangan**

Nilai investasi sektor industri di Kabupaten Aceh Besar tahun 1999 berjumlah Rp 433.278,6 juta, dengan nilai investasi terbesar yaitu pada industri dasar sebesar Rp 420.185 juta atau 96,98% dari total investasi sektor industri di Kabupaten Aceh Besar (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000). Industri dasar bisa mendominasi sektor industri karena adanya Pabrik Semen Andalas di Lhoknga, dengan kapasitas produksi 570.249 ton pada tahun 2000 dan di ekspor untuk kebutuhan semen di Indonesia dan luar Indonesia.

Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Aceh Besar tahun 1999/2000 adalah sebanyak 1.685 perusahaan dengan rincian industri dasar sebanyak 1 perusahaan, industri kecil formal 512 perusahaan dan industri kecil non formal sejumlah 1.153 perusahaan. Dari sejumlah perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9.369 orang (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Deperindag Kabupaten Aceh Besar tahun 2000, dengan jenis perusahaan antara lain PT (Perseroan Terbatas) sebanyak 3 perusahaan, CV sejumlah 284 perusahaan, Koperasi sejumlah 47 perusahaan dan Perseorangan sebanyak 24 perusahaan. Untuk perusahaan perdagangan yang terdaftar di Deperindag Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 adalah sebanyak 387 perusahaan, terdiri atas golongan perusahaan besar sebanyak 7 perusahaan, menengah 25 perusahaan dan kecil sebanyak 364 perusahaan. Jumlah perusahaan di Kabupaten Aceh Besar bisa dikatakan meningkat dari tahun ke-tahun , booming perusahaan pada tahun 2000 bisa dikatakan

akibat bertambahnya jumlah tenaga kerja yang belum terserap, dan adanya peningkatan investasi pemerintah pada bidang konstruksi (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Aceh Besar tahun 2000 adalah sebesar 33 buah, sedangkan Koperasi Non KUD sebanyak 328 buah. Perkembangan KUD dan Non KUD pada tahun 1999 berjumlah 342 buah dan meningkat pada tahun 2000 menjadi 361 buah (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

#### **4.1.3.6 Fasilitas Sarana dan Prasarana**

Fasilitas sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Besar sudah cukup baik bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dukungan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut berupa armada angkutan umum, bandar udara, pelabuhan laut, listrik, air minum dan lainnya yang sudah hampir memenuhi kebutuhan warganya. Kelengkapan fasilitas ini bisa dikatakan karena Kabupaten Aceh Besar dekat dengan Kota Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga konsentrasi pembangunan sarana dan prasarana termasuk urutan prioritas.

Fasilitas prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Aceh Besar berupa jalan sepanjang 1.263,12 km, yang terdiri atas jalan negara (169,80 km), jalan propinsi (152,82km) dan jalan kabupaten (934,50 km). Jalan negara adalah jalur utama lintas Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan (Sumatera Utara), jalan ini melewati kecamatan-kecamatan dari Ingin Jaya, Sukamakmur, Indrapuri dan Seulimum. Jalan yang menuju ke arah Jantho adalah pada kilometer 40 dari Banda Aceh dan masuk lagi lewat jalan kabupaten sepanjang 12 km. Jalur lain yang menuju ke Jantho hanya jalan kecil (desa) dari Indrapuri dan jalan tanah menuju Keumala (Kab. Pidie).

Untuk sarana pengangkutan barang, terdapat 9 perusahaan dengan jumlah armada 120 unit dan satu perusahaan bis umum yang mempunyai armada sebanyak 6 unit dengan

trayek Banda Aceh-Jantho-Sigli (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000). Armada bis ini yang memenuhi angkutan menuju Jantho dari Banda Aceh, selain Labi-Labi (Angkot). Walaupun demikian aksesibilitas menuju Jantho dari Banda Aceh masih sangat terbatas, dengan bis umum yang melayani hanya pada jam-jam tertentu terutama pada jam kerja pegawai.

Untuk perhubungan udara terdapat Bandar Udara Blang Bintang di Kecamatan Kuta Baro yang melayani pesawat komersial dengan rute Banda Aceh-Medan-Jakarta, Banda Aceh-Sabang, Banda Aceh Meulaboh (Aceh Barat) dan Banda Aceh-Sinabang (Simeuleu). Untuk sarana perhubungan laut terdapat pelabuhan Malahayati berkapasitas sebagai pelabuhan antar propinsi, terletak di Kecamatan Masjid Raya yang melayani pelayaran kapal penumpang, feri penyeberangan dan kapal barang (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

Kabupaten Aceh Besar untuk prasarana telekomunikasi bisa dikatakan cukup baik. Fasilitas ini didukung dengan adanya kantor pos dan jaringan telepon. Kebutuhan akan sarana telekomunikasi sangat besar, sehingga diupayakan pengembangan layanan dari tahun-tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 terdapat 15 kantor pos yang tersebar di semua kecamatan kecuali Kecamatan Darussalam. Jaringan telekomunikasi pesawat telepon terdapat hampir di semua kecamatan, dengan fasilitas berupa kantor pelayanan telekomunikasi sebanyak 2 buah, warung telekomunikasi sebanyak 7 buah dan kios phone 1 buah (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000). Di Jantho sendiri prasarana tersebut selain adanya kantor pos dan jaringan telepon, juga sudah terpasang juga sambungan telepon seluler.

#### **4.1.3.7 Fasilitas Ekonomi**

Sarana pasar di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan tempat transaksi jual beli, masih bersifat tradisional. Status pasar juga ada yang dikelola oleh pihak kecamatan, desa dan swasta. Sifat pasar ada yang buka harian, mingguan dan ada pada hari-hari tertentu seperti hari meugang (sebelum puasa), musim hewan atau musim buah. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 terdapat pasar kecuali di Kecamatan Masjid Raya. Gedung-gedung berupa pertokoan yang menjual kebutuhan sehari-hari sampai rumah makan juga tersebar di seluruh kecamatan (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

Fasilitas lain yang mendukung perekonomian berupa bank hanya terdapat di beberapa kecamatan. Selain di Kota Jantho yang terdapat dua unit bank, kecamatan yang ada bank adalah Kecamatan Lhoknga/Leupung, Seulimum, Darussalam, Sukamakmur, Darul Imarah, dan Kecamatan Ingin Jaya yang merupakan kecamatan terbanyak jumlah fasilitas perbankan yaitu sebanyak 4 unit (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

#### **4.1.4 Perekonomian**

##### **4.1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada bidang perekonomian, kondisi daerah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya yang pada tahun 2000 belum kondusif akibat konflik dan krisis ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2000 walaupun terjadi sedikit kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dibawah 1 persen sebesar 0,60%, dibandingkan terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 sebesar minus 0,39%, dan tahun 1998 minus 2,39%.

Selama lima tahun terakhir (periode 1996-2000) rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar relatif kecil yaitu sebesar 1,88%, dibandingkan periode sebelumnya periode 1990 ke periode 1995, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar terbesar pada tahun 1994 sebagai puncaknya pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 8,81% (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000). Kondisi menurunnya perekonomian bisa dikatakan karena terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 dan juga memuncaknya konflik di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1999.

#### **4.1.4.2 Produk Domestik Regional Bruto**

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Aceh Besar tahun 2000 sebesar Rp 1.180.503,18 juta rupiah, sedangkan berdasarkan harga konstan sebesar Rp 431.266,16 juta. Sumbangan terbesar PDRB atas harga berlaku dari lapangan usaha pertanian sebesar Rp 634,462,77 juta dan atas harga konstan Rp 144.648,06 juta (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

Perekonomian di Kabupaten Aceh Besar didominasi sektor pertanian yang merupakan sektor pendapatan yang terbesar, dari PDRB Kabupaten Aceh Besar tahun 2000 berdasarkan harga konstan terlihat dalam pembentukan PDRB sektor pertanian sebesar 33,53%, diikuti sektor industri pengolahan (22,84%), sektor pengangkutan dan komunikasi (11,60%), sektor jasa-jasa (10,64%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (8,33%), sektor bangunan/konstruksi (6,81%), sektor pertambangan dan galian (3,88%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan (1,99%) dan terkecil adalah sektor listrik dan air minum (0,36%) (Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000).

**TABEL IV. 7**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT**  
**LAPANGAN USAHA ATAS HARGA KONSTAN TAHUN 1980-2000 (JUTAAN RUPIAH)**

No.	Lapangan Usaha	1980	1990	2000
1.	Pertanian	27,810.65	42,714.91	144,648.06
2.	Pertambangan dan Galian	813.65	1,904.58	16,742.70
3.	Industri Pengolahan	8,662.66	23,957.13	98,541.06
4.	Listrik dan Air Minum	39.66	157.89	1,554.04
5.	Bangunan Konstruksi	3,376.83	13,934.88	29,388.60
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,612.41	16,272.83	35,953.65
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,342.70	11,205.76	50,044.02
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,519.90	1,482.00	8,601.40
9.	Jasa-Jasa	6,467.98	13,243.04	45,921.96
<b>Total PDRB</b>		<b>63,646.44</b>	<b>124,873.02</b>	<b>431,395.49</b>

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Besar

Besarnya sektor pertanian dalam membentuk PDRB, bisa dikatakan karena penduduk Kabupaten Aceh Besar sebagian besar bekerja pada sektor pertanian sebanyak 85,97% dan didukung dengan kondisi alam dan corak pedesaan (agraris), sedangkan sektor listrik dan air minum sebagai penyumbang terkecil karena belum optimalnya penggunaan listrik dan pemakaian air minum karena sarana masih terbatas.

#### **4.2 Kajian Karakteristik Kota Jantho Sebagai Ibukota Kabupaten**

Kota Jantho merupakan Ibukota Kabupaten Aceh Besar yang berada di pedalaman atau sekitar 15 km dari jalan negara Banda Aceh-Medan dan terletak pada jalur pengunungan, dengan posisi di ujung timur Kabupaten Aceh Besar yang berjarak sekitar 52 km dari Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### 4.2.3 Sejarah Pertumbuhan Kota

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dengan Ibukota pada waktu itu adalah Kotamadya Banda Aceh. Kabupaten daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah otonom pada Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 tahun 1979, maka ditetapkan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru yaitu Jantho yang berada di Kemukiman Jantho (struktur administrasi wilayah tradisional di Aceh berada bawah wilayah kecamatan dan di atas desa di Aceh) dalam Kecamatan Seulimum. Kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Besar dari Banda Aceh untuk berkantor di Kota Jantho dimulai secara serentak pada tanggal 29 Agustus 1983, peresmiannya dilakukan oleh Mendagri RI (waktu itu) Soeparjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Adapun dasar Kota Jantho sebagai Ibukota kabupaten adalah jarak dengan ibukota lama memenuhi kriteria (di atas 40 km), oleh Bupati T.Bakhtiar Panglima Polem (waktu itu) memilih lokasi lebih ke pedalaman dengan maksud membuka terisolirnya wilayah pedalaman Kabupaten Aceh Besar. Selain itu lebih ekonomis terhadap pemanfaatan lahan yang masih terbuka, berupa hutan dan perkebunan, dengan areal yang masih tersedia untuk pengembangan kota. pemilihan lokasi ini juga melibatkan Departemen Dalam Negeri dan juga konsultan perencanaan.

Pada awalnya Kota Jantho merupakan wilayah perkebunan penduduk, hutan dan pada sekitar kawasan perencanaan sudah menjadi lokasi transmigrasi. Kawasan rencana Kota Jantho kemudian ditetapkan sebagai tanah negara seluas 700 hektar sebagai

persiapan, berbatasan dengan pemukiman penduduk di Desa Jantho dan beberapa desa di sekitarnya.

Dengan ditetapkannya lokasi Kemukiman Jantho sebagai Ibu Kota Kabupaten, maka perkembangan awal kota adalah dengan dibangunnya gedung-gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tahun 1984 di tanah negara yang sudah dibebaskan tadi, diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana seperti Mesjid, sekolah-sekolah, pasar dan jalan masuk yang diaspal sepanjang 15 km dari jalan negara. Sebagai pendukung lain dibangun juga perumahan pegawai untuk pegawai negeri, rumah bupati dan fasilitas publik lainnya. Areal tersebut yang kemudian dinamakan dengan *Desa Persiapan Kota Jantho*.

Kemudian dengan bekerja sama dengan swasta lokal dibangun perumahan (RSSK) pada beberapa lahan dan juga pertokoan yang bertujuan menghidupkan perekonomian wilayah itu di bagian Barat kota. Pada tahun 1986, kawasan selatan dipakai untuk lahan transmigrasi. Secara bergelombang para transmigran berdatangan ke Jantho, sehingga menambah perkembangan penduduknya. Wilayah lokasi transmigran tersebut menjadi satu desa tersendiri dinamakan Desa Jantho Baru.

Lokasi Kota Jantho berada di wilayah Kecamatan Seulimum, sedangkan dalam kewenangan administrasi Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Besar. Dengan pertumbuhan Kabupaten dan dirasakan perlu adanya pemekaran wilayah kecamatan, Kota Jantho dengan 8 wilayah lainnya resmi menjadi kecamatan definitif pada tanggal 1 Pebruari 2001. Wilayah kecamatan Kota Jantho meliputi Desa Baroeh, Desa Weu, Desa Jantho Baru, Desa Jantho, Desa Tereubeh, Desa Kota Jantho serta desa-desa lainnya. Tetapi karena pada penelitian ini data yang dipakai hingga Tahun 2000, maka Kota Jantho pada analisis ini tetap dianggap masih berada di dalam administrasi Kecamatan Seulimum.

#### **4.2.4 Gambaran Umum Kota Jantho**

##### **3.3.2.1 Kondisi Fisik Dasar**

Kota Jantho mempunyai topografi mulai dari datar sampai bergelombang dengan kemiringan berkisar 5-45%, ketinggian berkisar 50-100 m di atas permukaan laut dengan letaknya di jalur pegunungan Bukit Barisan. Sesuai dengan letaknya di Kecamatan Seulimum, yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh hutan lebat, semak belukar, dengan sebagian kecil lahan yang sudah dibudidayakan berupa perkebunan, sawah dan sebagainya.

Luas Kota Jantho sebagai kawasan perencanaan adalah 2.500 Ha, luas ini merupakan pengembangan dari luas fungsional sebelumnya yaitu seluas 700 Ha. Jenis penggunaan lahan pada tahun 1995 didominasi oleh penggunaan lahan tegalan yang merupakan lahan cadangan bagi pengembangan kota.

##### **4.2.4.6 Kondisi Fasilitas**

Fasilitas perkotaan di Kota Jantho lebih dikembangkan bagi keperluan pusat administrasi pemerintahan, dengan investasi pembangunan fasilitas lebih dominan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sendiri. Investasi disektor swasta dalam pengembangan prasarana masih berskala kecil, dan lebih banyak untuk pembangunan sarana perekonomian seperti bank, pertokoan dan bersifat individual untuk pembangunan perumahan.

Kondisi fisik fasilitas dalam kota pada umumnya baik, seperti prasarana jalan yang berkembang menjadi dua jalur, sarana sekolah berupa SD, SMP, SMU dan pesantren terpadu. Kondisi fasilitas perekonomian di Kota Jantho masih berskala lokal, dengan adanya satu pasar dan beberapa pertokoan namun sudah mencukupi kebutuhan masyarakat untuk sehari-hari. Untuk pelayanan kesehatan kondisi yang ada hanya cukup bagi

pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas Kota Jantho, sedangkan untuk rumah sakit umum walau fisik bangunannya sudah berdiri tapi penggunaannya belum optimal. Untuk layanan perbankan di Kota Jantho dilayani oleh dua bank yaitu BPD Aceh dan BRI.

**TABEL IV. 8**  
**JUMLAH FASILITAS YANG ADA DI KOTA JANTHO**  
**DAN TAHUN DIBANGUNNYA**

No.	Nama Fasilitas	Tahun Berfungsi	Unit
1.	Kantor Bupati dan Kantor Instansi Lainnya	1984	29
2.	Kantor Pos	1984	1
3.	Telkom	1984	1
4.	Mesjid	1984	1
5.	Pasar	1985	1
6.	Puskesmas	1982	1
7.	Bank	1996	2
8.	Rumah Sakit	1997	1
9.	Perumahan	1982	3
10.	Pesantren	1989	1
11.	SMA	1990	1
12.	SMP	1989	1
13.	SD	1989	10
14.	TK	1998	1

*Sumber: Bappeda dan Hasil Penyusunan*

## **BAB V**

### **PERANAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

Analisis peranan penetapan Jantho sebagai ibukota terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan terdiri dari tiga analisis yang dibagi dalam dua tahapan analisis. Pada tahap pertama dilakukan dua tahapan analisis yaitu analisis sistem kota-kota dan analisis keunggulan sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Besar. Tahapan selanjutnya adalah analisis peranan pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Besar ke Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Sedangkan analisis ketiga nantinya akan mempunyai keterkaitan, dengan analisis pertama dan kedua, berhubungan langsung dalam membuat analisis peranan pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Besar ke Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Output yang dihasilkan dalam analisis sistem kota-kota dan analisis keunggulan sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Besar merupakan input dalam analisis ketiga, dimana nantinya analisis ketiga akan dibantu dengan data primer berupa wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang selanjutnya akan dideskripsikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini disajikan untuk dapat mendukung analisis kuantitatif, selain untuk analisis peranan pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Besar ke Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar, analisis kualitatif akan disisipkan juga pada setiap tahapan analisis untuk membantu analisis yang lain.

#### **5.1 Perkembangan Sistem Kota-Kota**

Analisis sistem kota-kota bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kota yang ada dalam satu kesatuan wilayah di Kabupaten Aceh Besar dan memasukkan Kota Banda

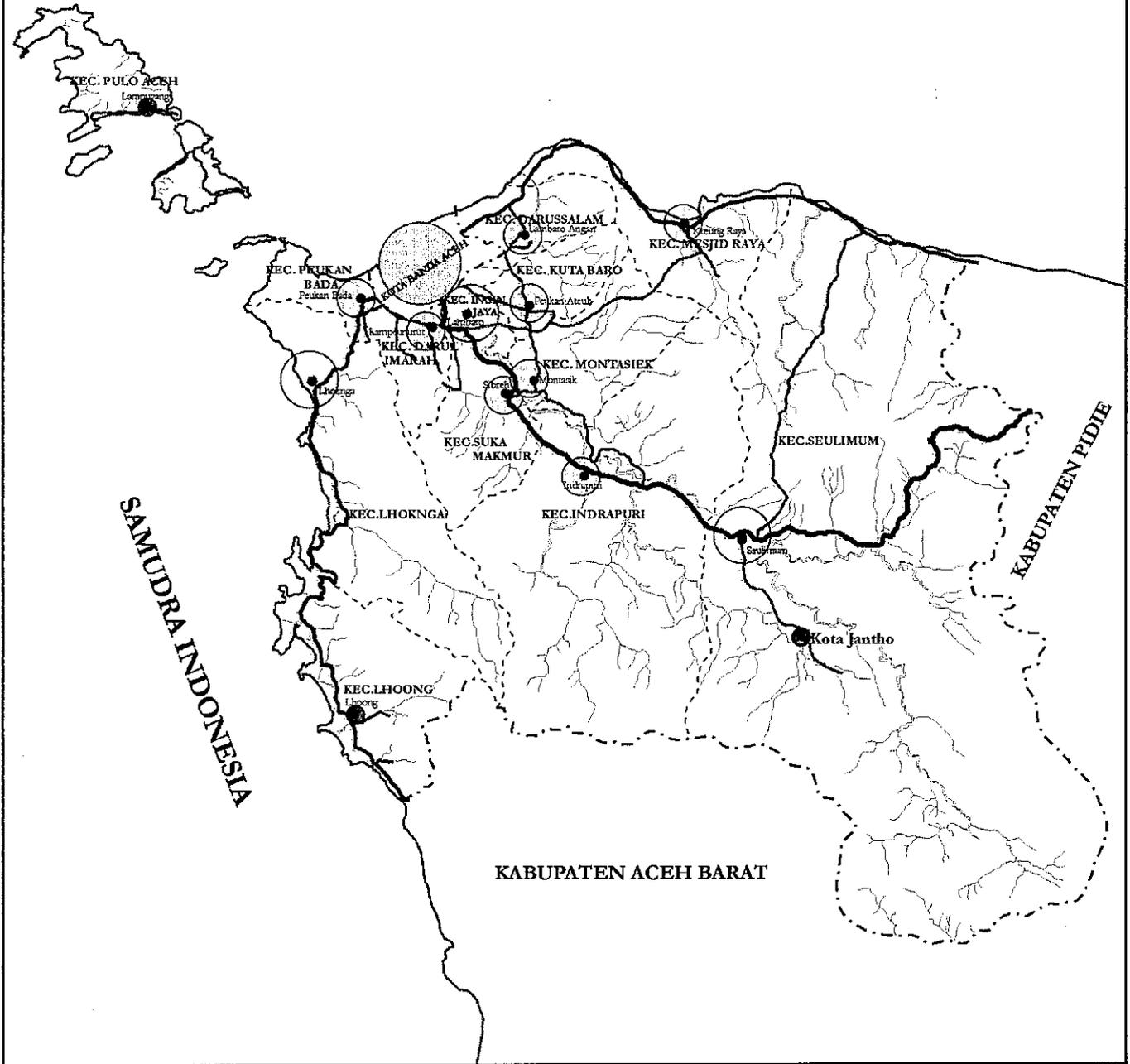
Aceh ke dalamnya untuk melihat secara keseluruhan kesatuan wilayah fungsional. Analisis sistem kota-kota diawali dengan analisis hierarki kota yang bertujuan untuk mengetahui tingkat derajat kekotaan kota-kota dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar sebagai pusat aktivitas dari masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil analisis sistem kota-kota, dapat dilihat kecenderungan perubahan hierarki Kota Jantho, setelah tahapan ini dilanjutkan dengan analisis jangkauan wilayah pengaruh Kota Jantho untuk tahun 1980, 1990 dan 2000 melalui perhitungan titik henti.

Kota-kota sebagai pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, biasanya adalah ibukota kecamatan yang merupakan sub wilayah dari Kabupaten Aceh Besar. Kota Jantho didalam analisis ini bukan merupakan ibukota kecamatan tapi merupakan kota yang berada di dalam wilayah Kecamatan Seulimum. Untuk Kota Banda Aceh sendiri dalam analisis ini tidak dipandang sebagai suatu kota dengan wilayah administratifnya, tapi dipandang sebagai suatu kota yang berada dalam sistem kota-kota dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang secara fungsional berfungsi sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

### **5.1.1 Analisis Hierarki Sistem Kota-Kota**

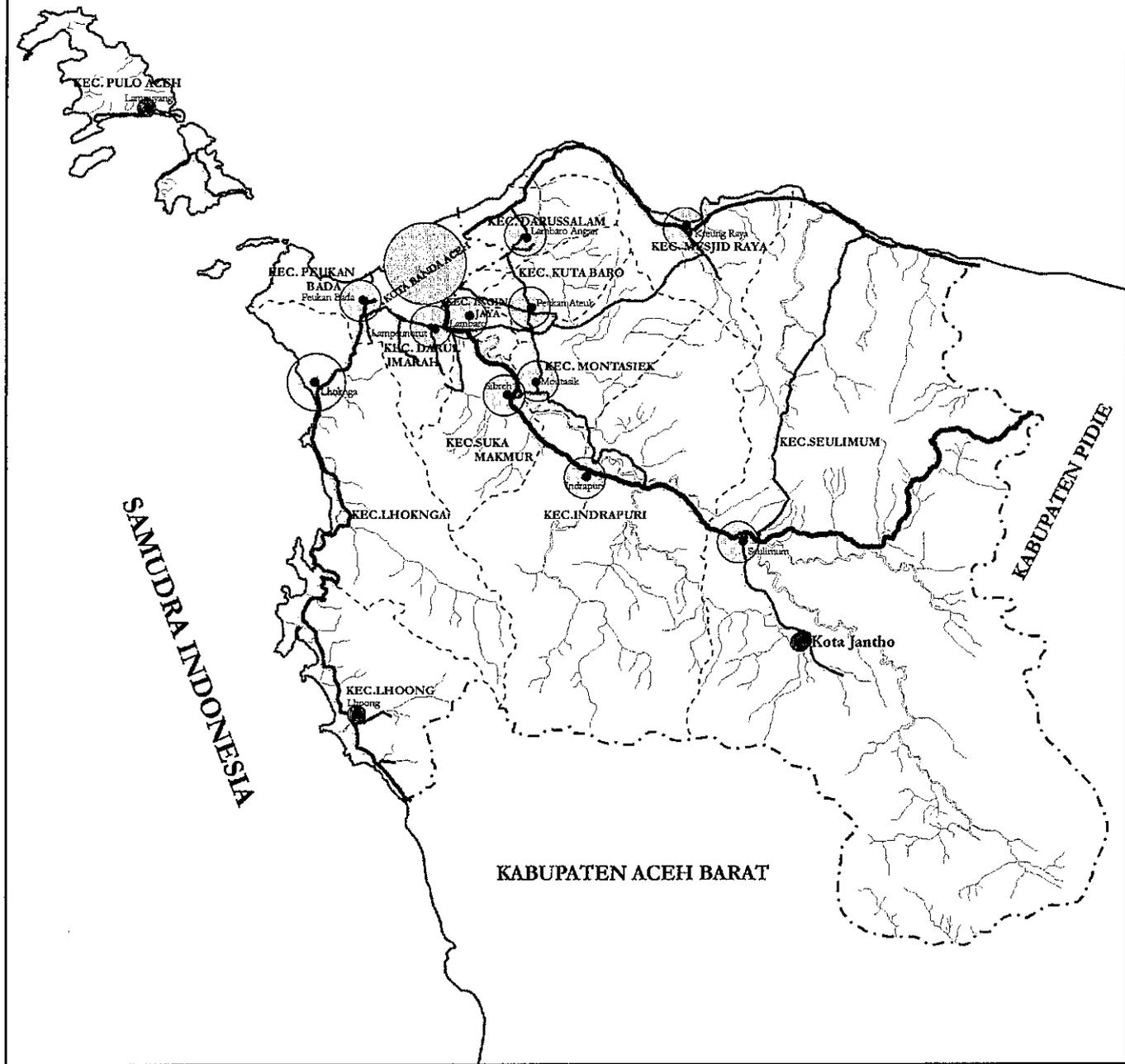
Perhitungan analisis sistem kota-kota yang menggunakan metoda skalogram dapat dilihat pada tabel Lampiran B, didapat kota dengan orde I adalah Banda Aceh yang memiliki kelengkapan fasilitas kota, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan wilayah terhadap masyarakat. Hal yang sangat mempengaruhi tingginya hierarki Kota Banda Aceh adalah karena kota ini merupakan kota otonom yang merupakan Ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga standar fasilitas kekotaan yang dibangun di Kota Banda Aceh berdasarkan skala pelayanan wilayah propinsi.

# SELAT MALAKA



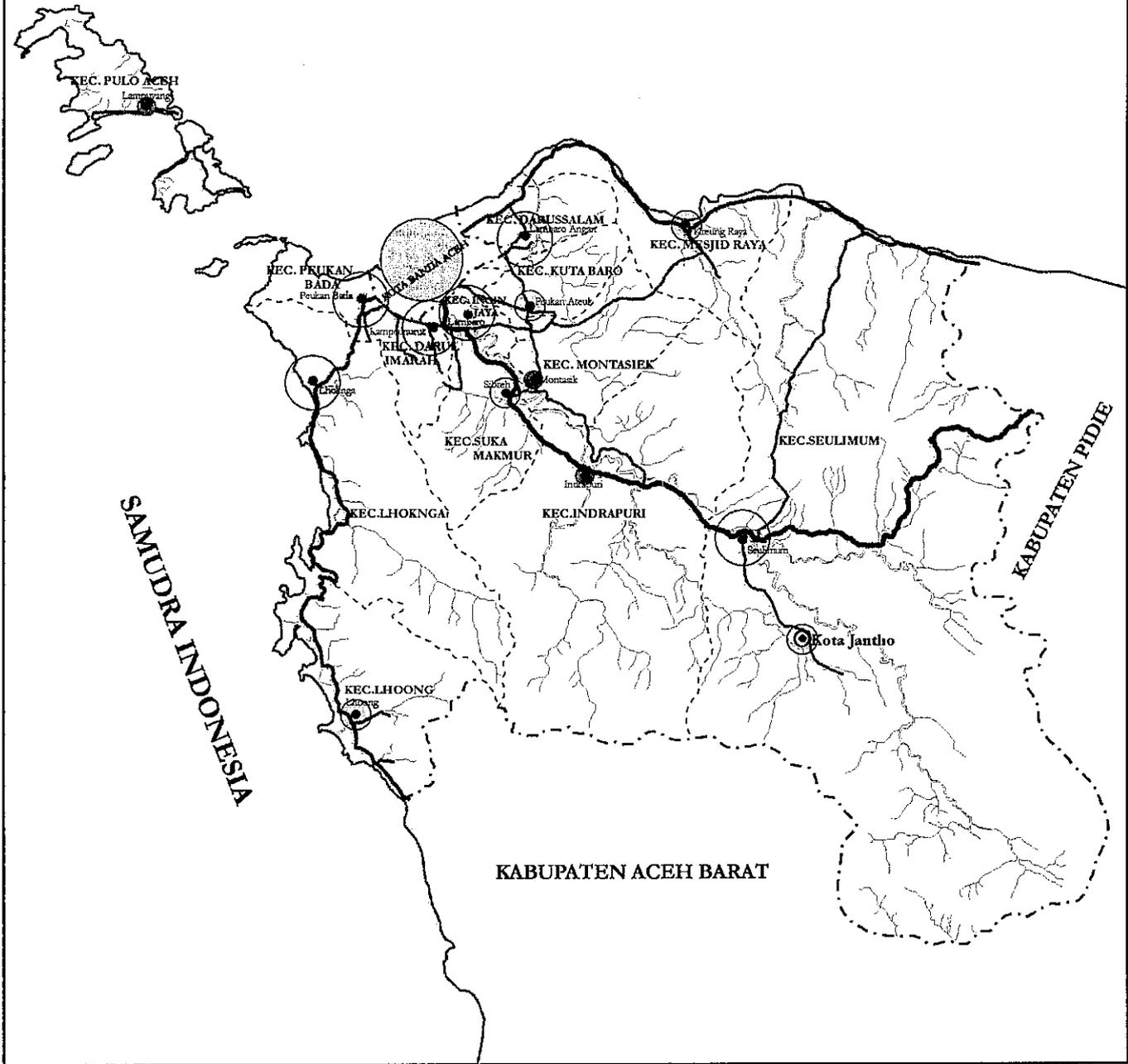
 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<b>PETA HIERAKI KOTA KECAMATAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1984</b>		Sumber : <b>HASIL ANALISIS 2003</b>																	
	<b>LEGENDA</b>		<b>SKALA</b>																	
<b>TESIS</b>	 Batas Perairan  Jalan Negara  Jalan Propinsi  Batas Kecamatan  Batas Kabupaten  Sungai  Kota  Ibu Kota Kecamatan  Ibu Kota Kabupaten	 KOTA HIERARKI I  KOTA HIERARKI II  KOTA HIERARKI III  KOTA HIERARKI IV	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">NUMERIK</th> <th colspan="2">GARIS</th> </tr> <tr> <td>1:500.000</td> <td></td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">5.1</td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">81</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UTARA</td> <td style="text-align: center;">NO. PETA</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> </table>		NUMERIK		GARIS		1:500.000						5.1	81	UTARA	NO. PETA	HALAMAN	
	NUMERIK		GARIS																	
1:500.000																				
		5.1	81																	
UTARA	NO. PETA	HALAMAN																		
PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR			Tahun Pembuatan : 2003																	

# SELAT MALAKA



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	<b>PETA HIERAKI KOTA KECAMATAN                  KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1990</b>	Sumber : HASIL ANALISIS 2003		
	<b>LEGENDA</b> [---] Batas Perairan [==] Jalan Negara [---] Jalan Propinsi [---] Batas Kecamatan [---] Batas Kabupaten [---] Sungai [●] Kota [●] Ibu Kota Kecamatan [●] Ibu Kota Kabupaten	[●] KOTA HIERARKI I [●] KOTA HIERARKI II [●] KOTA HIERARKI III [●] KOTA HIERARKI IV	<b>SKALA</b>	
			NUMERIK 1 : 500.000	GARIS 
	<b>TESIS</b>	 <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0 20px;">5.2</span> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">82</span>		
PERANAN PEMETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR	UTARA	NO. PETA	HALAMAN	
Tahun Pembuatan : 2003				

# SELAT MALAKA



 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<b>PETA HIERAKI KOTA KECAMATAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2000</b>		Sumber : <b>HASIL ANALISIS 2003</b>																																								
	<p><b>LEGENDA</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Batas Perairan</td> <td></td> <td>KOTA HIERARKI I</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Negara</td> <td></td> <td>KOTA HIERARKI II</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Propinsi</td> <td></td> <td>KOTA HIERARKI III</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> <td></td> <td>KOTA HIERARKI IV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kabupaten</td> <td></td> <td>Kota</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sungai</td> <td></td> <td>Ibu Kota Kecamatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kota</td> <td></td> <td>Ibu Kota Kabupaten</td> </tr> </table>			Batas Perairan		KOTA HIERARKI I		Jalan Negara		KOTA HIERARKI II		Jalan Propinsi		KOTA HIERARKI III		Batas Kecamatan		KOTA HIERARKI IV		Batas Kabupaten		Kota		Sungai		Ibu Kota Kecamatan		Kota		Ibu Kota Kabupaten	<p style="text-align: center;"><b>SKALA</b></p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">NUMERIK</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">GARIS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 : 500.000</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>5.3</b></td> <td style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>83</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UTARA</td> <td style="text-align: center;">NO. PETA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> </table>		NUMERIK	GARIS		1 : 500.000				<b>5.3</b>	<b>83</b>	UTARA	NO. PETA
	Batas Perairan		KOTA HIERARKI I																																								
	Jalan Negara		KOTA HIERARKI II																																								
	Jalan Propinsi		KOTA HIERARKI III																																								
	Batas Kecamatan		KOTA HIERARKI IV																																								
	Batas Kabupaten		Kota																																								
	Sungai		Ibu Kota Kecamatan																																								
	Kota		Ibu Kota Kabupaten																																								
NUMERIK	GARIS																																										
1 : 500.000																																											
	<b>5.3</b>	<b>83</b>																																									
UTARA	NO. PETA	HALAMAN																																									
<b>TESIS</b>	PERAWAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR		Tahun Pembuatan : 2003																																								

**TABEL V. 1**  
**HIERARKI KOTA-KOTA TAHUN 1984, 1990 DAN 2000**

No.	Hierarki	Tahun		
		1984	1990	2000
1.	I	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
2.	II	Lhoknga, Seulimum, Lambaro	Lhoknga, Seulimum, Lambaro	Lhoknga, Seulimum, Lambaro Angan, Lampeunerut, Lambaro, Peukan Bada
3.	III	Lhoong, Indarpuri, Krueng Raya, Lambaro Angan, Peukan Ateuk, Montasiek, Sibreh, Lampeunerut, Peukan Bada	Indarpuri, Krueng Raya, Lambaro Angan, Peukan Ateuk, Montasiek, Sibreh, Lampeunerut, Peukan Bada	<b>Jantho</b> , Lhoong, Krueng Raya, Peukan Ateuk, Montasiek, Sibreh,
4.	IV	<b>Jantho</b> , Lampuyang	<b>Jantho</b> , Lhoong, Lampuyang	Indrapuri, Montasiek, Lampuyang

*Sumber: Hasil Analisis 2003*

Kota lain yang berskala pelayanan tingkat lokal (kecamatan) adalah Kota Lhoknga (Kecamatan Lhoknga) yang selalu ber-orde II, Kota Lambaro (Kecamatan Ingin Jaya), Kota Seulimum (Kecamatan Seulimum), Lampeunerut (Darul Imarah) dan Peukan Bada kota-kota tersebut dari perkembangan hierarki kota-kota selalu ber-orde II dan III. Untuk kota-kota hampir selalu berhierarki III adalah Lambaro Angan, Jantho, Peukan Ateuk dan Krueng Raya. Kota-kota dengan perkembangan hierarki dengan orde III dan IV adalah Montasik, Sibreh, dan Lhoong, sedangkan Lampuyang selalu ber-orde IV.

Untuk Kota Lambaro kelengkapan fasilitas tinggi dikarenakan kota tersebut merupakan kota satelit dari Kota Banda Aceh sehingga masuk dalam wilayah pengaruh ke Kota Banda Aceh. Kelengkapan fasilitas ini bisa memenuhi standar kota besar, dengan perkembangan lebih banyak ke arah melengkapi pelayanan ke tingkat kecamatan dan ke wilayah Kota Banda Aceh serta merupakan daerah perluasan Kota Banda Aceh secara fungsional. Kota Peukan Bada dan Lampeuneurut juga bisa dikatakan mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kota Lambaro. Keunggulan Kota Lambaro dibandingkan kedua kota tersebut adalah dikarenakan Kota Lambaro memiliki tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi, karena lokasinya yang strategis merupakan persimpangan

dari jalur utama jalan Banda Aceh ke Medan dan kota-kota lain di pantai timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jalur Banda Aceh ke Meulaboh dan Banda Aceh ke Bandara Blang Bintang.

Kota Lhoknga merupakan kota yang dilewati jalur lintas barat, dan mempunyai kelebihan dengan fasilitas pendidikan berupa Akademi Gizi, fasilitas hiburan berupa kawasan pariwisata, selain itu industri dan pertambangan semen ada di kecamatan ini. Kondisi tersebut tentu saja dapat menarik masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan fasilitas ( terutama pendidikan dan pariwisata) ke Kota Lhoknga.

Kota Seulimum bisa dikatakan kota yang secara tradisional merupakan pusat aktivitas di Kabupaten Aceh Besar dan terletak di jalur jalan nasional utama Banda Aceh ke Medan. Kota ini mempunyai wilayah yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pidie, sehingga dapat memotong aksesibilitas untuk transit, setelah melewati pegunungan Seulawah. Letak yang cukup strategis ini tentu saja dapat menjadikan daya tarik untuk pengembangan berbagai aktivitas bagi masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Aceh Besar, kecenderungan wilayah perkotaan lebih berkembang di wilayah tengah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Aceh Besar memiliki kecenderungan lebih berkembang mengikuti jalur transportasi arteri yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan kabupaten-kabupaten lain di pesisir timur pantai Sumatera dan akses jalan menuju ke Kota Medan di Propinsi Sumatera Utara sebagai kota utama di Pulau Sumatera. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah barat dengan jalur jalan menuju kabupaten-kabupaten di pantai barat Sumatera (menuju Meulaboh) dan kota-kota wilayah di pantai timur yang memiliki jaringan jalan baru yaitu adanya pembukaan akses jalan antara Banda Aceh - Krueng Raya menuju Batee - Sigli di

Kabupaten Pidie perkembangan wilayah tengah Kabupaten Aceh Besar tentu saja lebih pesat. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keberadaan jalan arteri yang menghubungkan Kota Banda Aceh ke Kota Medan bersifat pelayanan skala nasional, dengan akses antar propinsi. Jalur ini yang melayani pergerakan barang dan manusia antar propinsi, sehingga aktivitas lebih besar volumenya dibandingkan wilayah lainnya.

Kota-kota di wilayah barat lebih melayani aktivitas aksesibilitas antar kabupaten, terutama kabupaten-kabupaten yang terletak di pantai barat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk wilayah timur walaupun sebagai jalur alternatif menuju kabupaten lain di pantai timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, akan tetapi karena jalur ini baru dibuka dan kondisinya masih belum memadai (belum teraspal) sehingga belum maksimal dalam melayani pergerakan barang dan manusia. Jika dilihat kota-kota untuk kedua wilayah ini, kota-kota yang memiliki hierarki tinggi adalah kota yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh, sehingga wilayah mereka menjadi daerah perluasan kota yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas perkotaan.

Kota-kota seperti Lhoong dan Lampuyang menjadi tidak berkembang bisa disebabkan karena aksesibilitas antar wilayah yang kurang. Selain itu Kota Lampuyang terletak di wilayah yang terpencil karena wilayahnya berupa kepulauan, sedangkan Kota Lhoong memiliki kendala fisik akibat adanya pegunungan sehingga kurang memiliki aksesibilitas dengan wilayah lain di Kabupaten Aceh Besar, walaupun sebenarnya kota ini dilewati akses lintas Barat Aceh.

Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1984 berada pada hierarki IV, dengan kecenderungan naik ke hierarki III pada tahun 1991 hingga ke tahun 2000. Pembangunan sarana dan prasarana di Kota Jantho pada awal tahun 1984 masih berupa sarana pemerintahan berupa gedung-gedung perkantoran untuk kegiatan pusat

adminstrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 1991 (III), terjadi kenaikan hierarki karena peningkatan prasarana yang bertujuan untuk melengkapi pengembangan Kota Jantho sebagai kota baru untuk pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hal lain yang meningkatkan jumlah fasilitas di Kota Jantho adalah penambahan penduduk di sekitar kota tersebut karena adanya pergerakan penduduk yang bukan petani seperti pegawai, pedagang dan lainnya.

Keberadaan Kota Jantho jika dilihat dari hierarki kota-kota di Kabupaten Aceh Besar seharusnya memiliki hierarki I, artinya sebagai pusat pemerintahan (Ibukota Kabupaten Aceh Besar) tentu saja pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat dari kota-kota lain di Kabupaten Aceh Besar. Kondisi yang terjadi adalah Jantho hanya berada pada orde III hal ini tentu saja menunjukkan keberadaan fasilitas-fasilitas masih kurang memadai, kecuali tentu saja fasilitas pemerintahan. Kondisi lainnya yang menjadikan wilayah ini kurang berkembang terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pertumbuhan adalah lokasinya yang kurang strategis, letak Jantho yang berada di wilayah selatan Kabupaten Aceh Besar seringkali dianggap kurang strategis. Hal ini juga ditunjang dari aksesibilitas yang masih sangat rendah, terutama keberadaan jaringan jalan-jalan utama yang menghubungkan Jantho dengan kota-kota di sekitarnya (hanya terdapat 1 akses jalur utama). Terbatasnya jumlah sarana transportasi umum juga menyebabkan masyarakat kurang tertarik melakukan aktivitas di Kota Jantho ini.

### **5.1.2 Kecenderungan Perubahan Hierarki Kota Jantho**

Pertumbuhan Kota Jantho dapat dilihat dari meningkatnya hierarki kota tersebut dalam analisis sistem kota-kota. Kecenderungan perubahan fisik kota terutama terlihat dari adanya pengembangan fasilitas perkotaan dan perubahan tata guna lahan yang dikaitkan

dengan bertambahnya kawasan terbangun. Analisis ini dilakukan secara deskriptif, yang juga didukung dengan metoda kualitatif dari hasil wawancara.

Jika dilihat dari analisis sistem kota-kota, hierarki Kota Jantho dari tahun 1984 pada orde IV kemudian naik pada tahun 1991 ke orde III, dan kemudian pada tahun 2000 berada pada orde III, maka dapat dikatakan ada kecenderungan perubahan fisik Kota Jantho menjadi lebih tinggi tingkat kekotaannya, karena adanya penambahan fasilitas.

Kecenderungan peningkatan hierarki ini lebih karena investasi pemerintah secara besar-besaran dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pembangunan Kota Jantho bagi kebutuhan fasilitas kota baru sebagai pusat administratif pemerintahan. Pembangunan fasilitas pemerintahan otomatis juga harus membangun fasilitas lain, seperti parasarana jalan, listrik, sarana sosial untuk ibadah, dan sarana pendukung seperti perumahan pegawai, fasilitas olah raga dan gedung lainnya.

Pada tahun 1984, fasilitas kota berupa gedung-gedung pemerintahan, kantor pos, masjid, jaringan listrik, jaringan telepon dan sarana lain untuk keperluan pusat administrasi pemerintahan telah mulai dibangun. Pembangunan Kota Jantho terutama ditujukan sebagai suatu konsep perencanaan kota baru bersifat kota yang dikategorikan kota mandiri untuk pusat pemerintahan. Pembangunan fasilitas pada awalnya lebih ditujukan bagi kegiatan-kegiatan tersebut (pemerintahan). Dengan tersedianya fasilitas sebagai pusat administrasi pemerintahan, maka aktivitas yang ada di Kota Jantho masih berupa aktivitas yang ada keterkaitannya dengan administrasi pemerintahan dan layanan publik dibidang pemerintahan, sedangkan aktivitas lainnya masih bercorak pedesaan berupa aktivitas pertanian karena adanya penempatan transmigran sejak tahun 1982.

Pada tahun 1985 di Kota Jantho mulai dibangun perumahan melalui Perum Perumnas, untuk menarik perpindahan penduduk ke Kota Jantho. Fasilitas perumahan ini

lebih ditujukan bagi pegawai negeri Kabupaten Aceh Besar, dengan maksud agar mereka menetap di Kota Jantho. Selain penempatan penduduk, dimulai juga pembangunan fasilitas sebagai sarana perkotaan seperti pasar, puskesmas dan lainnya. Pembangunan fasilitas perkotaan ini masih dengan investasi pemerintah yang dimaksud mendorong pertumbuhan Kota Jantho.

Pada tahun 1990, pembangunan fasilitas sudah memasuki fasilitas penunjang kota baru lainnya seperti sekolah, perumahan umum, bank, pesantren, pertokoan dan lainnya. Fasilitas ini dapat menunjang aktivitas ekonomi skala kecil dan sosial. Pada tahun 2000, Kota Jantho direncanakan sebagai pusat pendidikan, dengan penambahan fasilitas pendidikan berupa SMK, Bapelkes, dan Pesantren Terpadu (Modern). Pengembangan sebagai pusat pendidikan dalam usaha agar dapat menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun ini aktivitas kota sudah mulai lebih bercirikan perkotaan, dengan adanya aktivitas pendidikan, perdagangan skala kecil, dan jasa-jasa.

Dari hasil wawancara didapat Kota Jantho sebagai pusat pertumbuhan belum kelihatan karena aktivitas sosial dan ekonomi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Permasalahan sebagai pusat pertumbuhan antara lain dari sisi aksesibilitas dilihat jalur masuk ke Kota Jantho hanya satu akses dari jalan nasional, sehingga hanya lebih mudah diakses oleh kecamatan-kecamatan di wilayah tengah, sedangkan untuk kecamatan-kecamatan di wilayah timur dan barat lebih mudah mengakses ke Kota Banda Aceh, selain itu jika melihat standar PBB, fasilitas sebagai kota distrik yang melayani wilayah pedesaan belum memenuhi standar maksimal, karena belum ada fasilitas seperti terminal bis, industri menengah dan lainnya.

Dari kondisi diatas terlihat bahwa dalam periode 1984-2000 perubahan fungsi Jantho dari awalnya kemukiman (beberapa desa) menjadi ibukota kabupaten. Berbagai

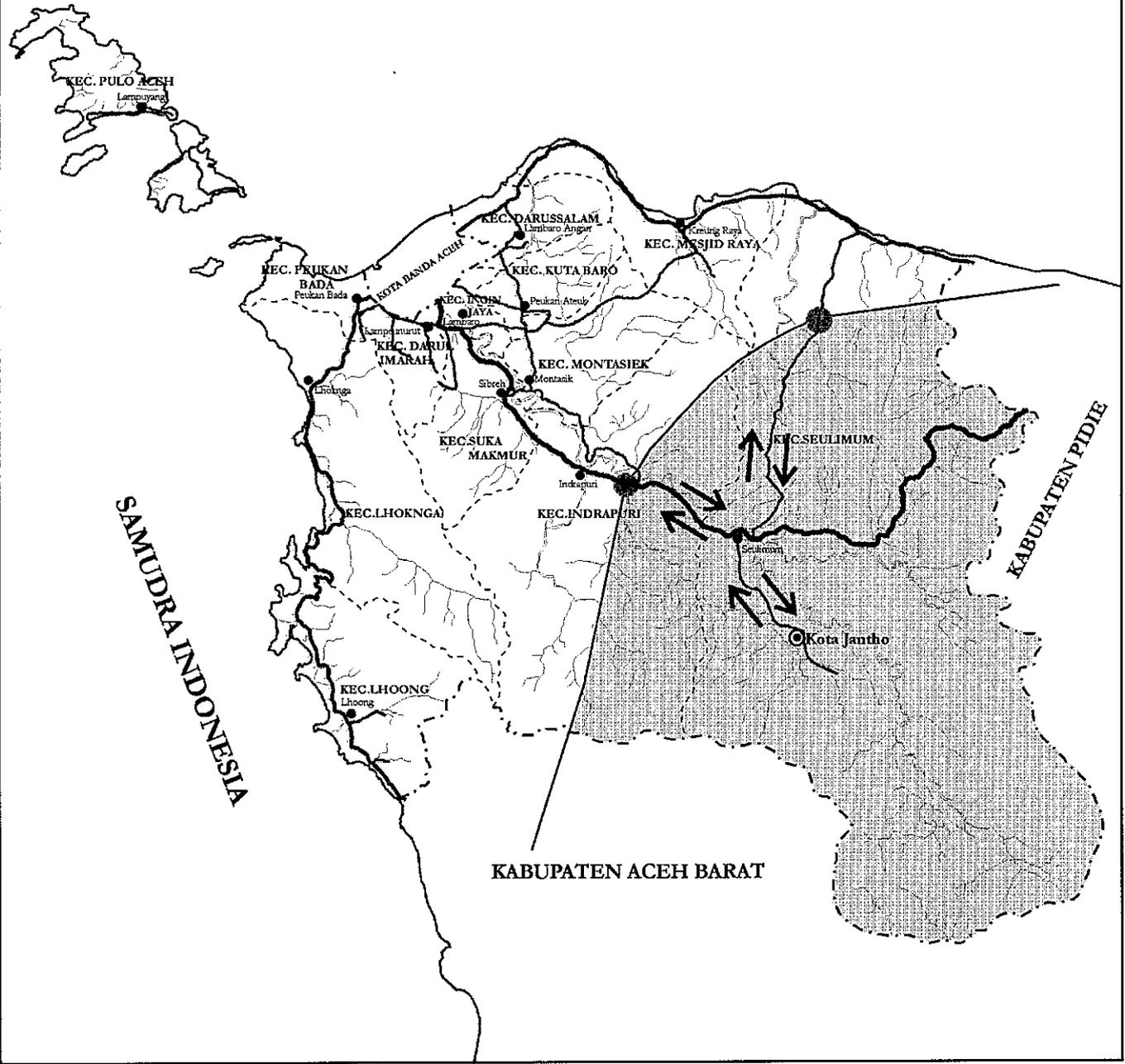
pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana ternyata masih kurang dapat menarik aktivitas ke wilayah ini. Fungsi pemerintahan tentu saja dapat berjalan dengan optimal walaupun pada awalnya banyak mengalami masalah terutama dari para pegawai pemerintahan yang merasa bahwa lokasi Jantho terlalu jauh dan kurang strategis. Sedangkan fungsi pusat pertumbuhan ternyata tidak dapat berjalan hal ini terlihat bahwa Kota Jantho hanya mengalami perubahan hierarki kota dari orde IV menuju orde III saja.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa faktor-faktor internal Kota Jantho ternyata belum dapat mempengaruhi pertumbuhan wilayah sekitarnya (terutama jika melayani wilayah Kabupaten Aceh Besar). Jika dilihat berdasarkan Teori Tahap (Perroux, 1967) dapat digambarkan bahwa Kota Jantho masih berada pada tahapan pertama yaitu tahap perekonomian subsistem swasembada dimana investasi masih sedikit dan didominasi oleh sektor pertanian. Dimana dalam tahap ini suatu wilayah sangat membutuhkan dukungan terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana serta infrastruktur untuk dapat menarik investasi ke wilayah tersebut.

### **5.1.3 Analisis Wilayah Pengaruh Kota Jantho**

Analisis wilayah pengaruh kota ini dilakukan untuk mendapatkan wilayah pengaruh dari Kota Jantho terhadap wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Pengaruh dalam hal ini berupa pengaruh secara keruangan, yaitu pengaruh kota-kota pusat pelayanan terhadap wilayah belakangnya atau pengaruh Kota Jantho terhadap wilayah Kabupaten Aceh Besar, lebih dilihat dari peran kota ini sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan. Perhitungan wilayah pengaruh ini lebih dilihat dari sisi aksesibilitas berupa jarak tempuh dari wilayah pengaruh ke pusat pelayanan, yaitu jarak antar kota yang dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah kecamatan, dengan memperhitungkan titik henti. Analisis dengan titik henti akan mendapatkan panjangnya jangkauan wilayah pelayanan.

# SELAT MALAKA



  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH DAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  


---

**TESIS**  


---

**PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA**  
**KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN**  
**WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**PETA WILAYAH KOTA JANTHO TERHADAP  
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1984**

**LEGENDA**

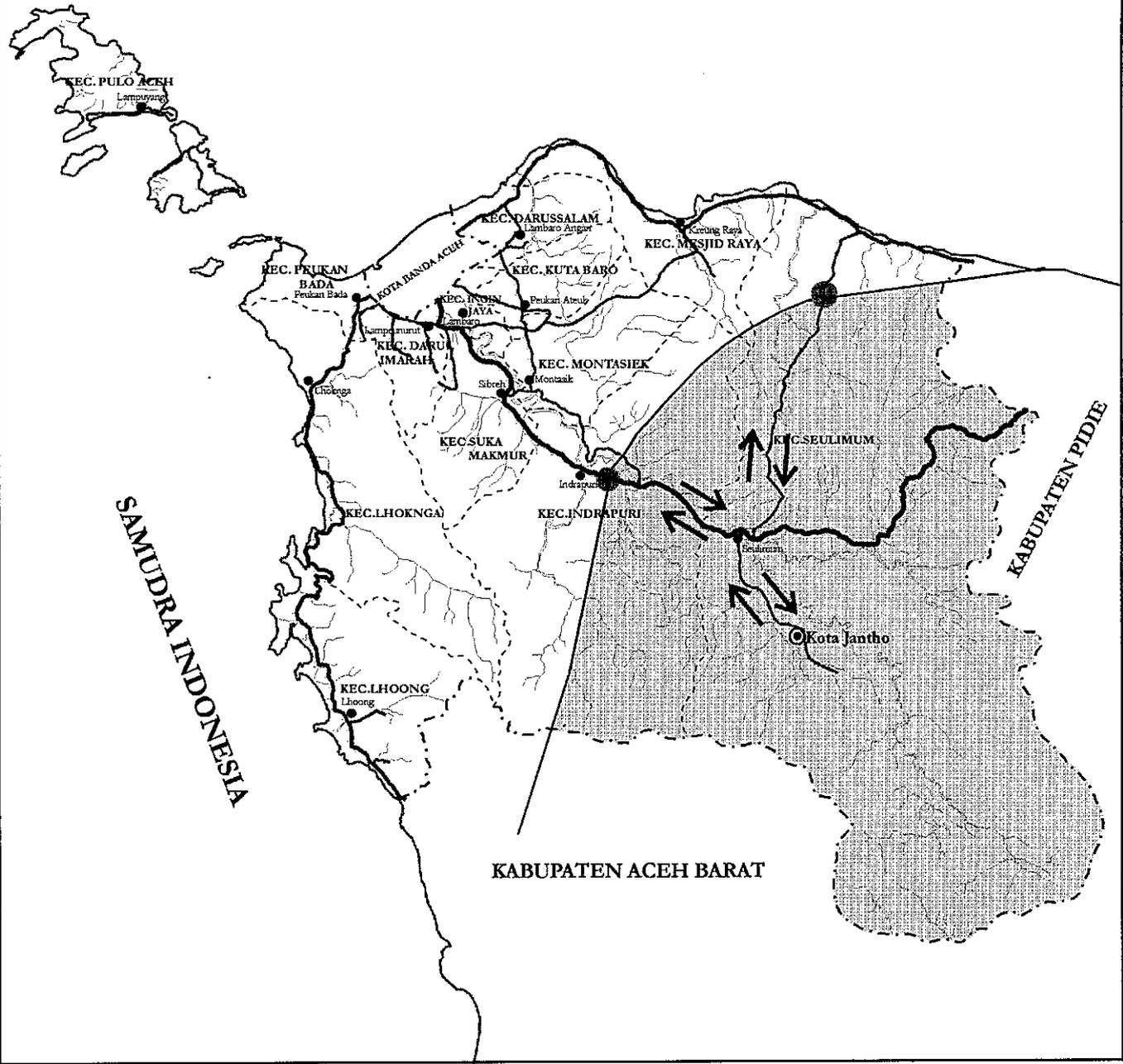
Batas Perairan	Titik Henti
Jalan Negara	Wilayah Pengaruh Kota Jantho
Jalan Propinsi	Jalur Aksesibilitas Menuju Kota Jantho
Batas Kecamatan	Jalur Aksesibilitas Keluar Kota Jantho
Batas Kabupaten	
Sungai	
Kota	
Ibu Kota Kecamatan	
Ibu Kota Kabupaten	

Sumber :  
HASIL ANALISIS 2003

**SKALA**

NUMERIK	GARIS	
1 : 500.000		
	5.4	91
UTARA	NO. PETA	HALAMAN
Tahun Pembuatan : 2003		

# SELAT MALAKA



  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH DAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

**TESIS**

---

**PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA**  
**KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN**  
**WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

**PETA WILAYAH KOTA JANTHO TERHADAP**  
**KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1990**

**LEGENDA**

Batas Perairan	Titik Henti
Jalan Negara	Wilayah Pengaruh Kota Jantho
Jalan Propinsi	Jalur Aksesibilitas Menuju Kota Jantho
Batas Kecamatan	Jalur Aksesibilitas Keluar Kota Jantho
Batas Kabupaten	
Sungai	
Kota	
Ibu Kota Kecamatan	
Ibu Kota Kabupaten	

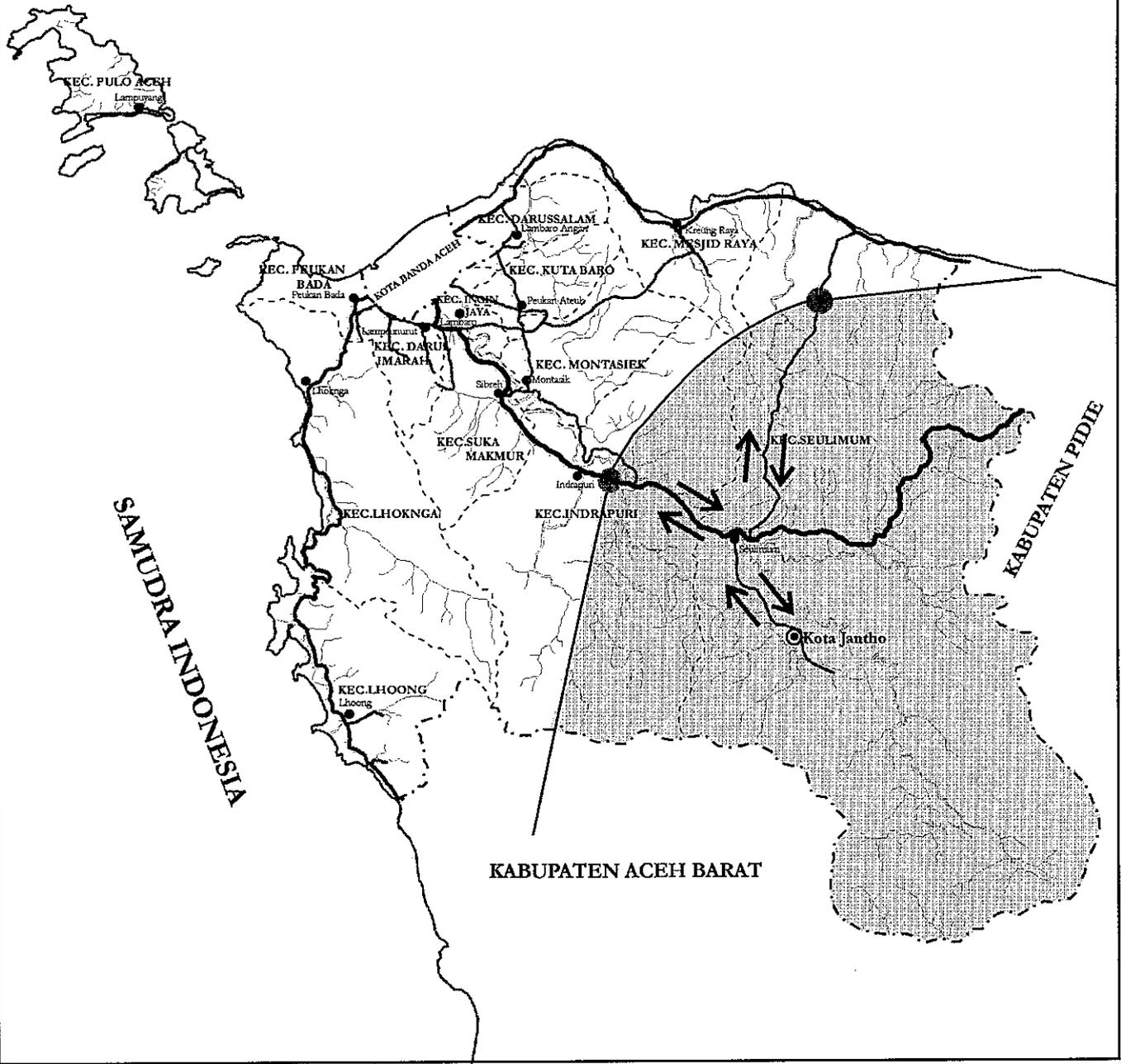
**Sumber :**  
**HASIL ANALISIS 2003**

**SKALA**

NUMERIK	GARIS	
1 : 500.000	0	15km
	5.5	92
UTARA	NO. PETA	HALAMAN

**Tahun Pembuatan :**  
**2003**

# SELAT MALAKA



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	<b>PETA WILAYAH KOTA JANTHO TERHADAP                  KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2000</b>		Sumber : HASIL ANALISIS 2003																														
	<b>LEGENDA</b> <table border="0"> <tr> <td> Batas Perairan</td> <td> Titik Henti</td> </tr> <tr> <td> Jalan Negara</td> <td> Wilayah Pengaruh Kota Jantho</td> </tr> <tr> <td> Jalan Propinsi</td> <td> Jalur Aksesibilitas Menuju Kota Jantho</td> </tr> <tr> <td> Batas Kecamatan</td> <td> Jalur Aksesibilitas Keluar Kota Jantho</td> </tr> <tr> <td> Batas Kabupaten</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sungai</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Kota</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ibu Kota Kecamatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Ibu Kota Kabupaten</td> <td></td> </tr> </table>		Batas Perairan	Titik Henti	Jalan Negara	Wilayah Pengaruh Kota Jantho	Jalan Propinsi	Jalur Aksesibilitas Menuju Kota Jantho	Batas Kecamatan	Jalur Aksesibilitas Keluar Kota Jantho	Batas Kabupaten		Sungai		Kota		Ibu Kota Kecamatan		Ibu Kota Kabupaten		<b>SKALA</b> <table border="1"> <tr> <td>NUMERIK</td> <td colspan="2">GARIS</td> </tr> <tr> <td>1 : 500.000</td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 24pt;">5.6</td> <td style="text-align: center; font-size: 24pt;">93</td> </tr> <tr> <td>UTARA</td> <td>NO. PETA</td> <td>HALAMAN</td> </tr> </table>		NUMERIK	GARIS		1 : 500.000				5.6	93	UTARA	NO. PETA
Batas Perairan	Titik Henti																																
Jalan Negara	Wilayah Pengaruh Kota Jantho																																
Jalan Propinsi	Jalur Aksesibilitas Menuju Kota Jantho																																
Batas Kecamatan	Jalur Aksesibilitas Keluar Kota Jantho																																
Batas Kabupaten																																	
Sungai																																	
Kota																																	
Ibu Kota Kecamatan																																	
Ibu Kota Kabupaten																																	
NUMERIK	GARIS																																
1 : 500.000																																	
	5.6	93																															
UTARA	NO. PETA	HALAMAN																															
TESIS			Tahun Pembuatan : 2003																														
PERAWAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR																																	

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil perhitungan untuk wilayah pengaruh tahun 1984, 1990, 2000 wilayah jangkauan pelayanan Kota Jantho terhadap wilayah-wilayah yang dilayaninya bertambah (Gambar 4.4, 4.5 dan 4.6). Jika melihat pertambahan wilayah pengaruh dipastikan karena adanya perubahan penduduk dan penambahan aksesibilitas, tapi perubahan wilayah pengaruh Kota Jantho tidak besar karena kondisi aksesibilitas yang tidak ada perubahan, karena jaringan jalan yang menuju ke Kota Jantho tidak ada penambahan.

Hal ini menurut Daldjoeni (1998), menunjukkan lingkup pasar yaitu jarak pasar maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk menuju suatu pusat pelayanan, jika diluar jarak tersebut maka penduduk akan mencari pusat pelayanan lain. Lingkup pasar ini akan menjadi batas pengaruh suatu pusat pelayanan dengan wilayah pelayanannya, jika dikaitkan peranan kota dalam pengembangan wilayah tidak dapat dilihat dari besaran (jumlah) penduduk atau ukuran kota tersebut. Peran kota ditentukan oleh karakteristik fungsi kota yang diembannya, yaitu aksesibilitas yang dimiliki terhadap wilayah pinggirannya (Rondinelli, 1984).

Pernyataan diatas bisa dikaitkan dengan pendapat masyarakat Kabupaten Aceh Besar dari hasil kesimpulan wawancara dengan masyarakat umum dan pelaku ekonomi di Kecamatan Lhoong yang menyatakan mengenai kondisi aksesibilitas Kota Jantho "untuk akses ke Jantho dari Lhoong harus memutar dahulu ke arah Lambaro baru bisa melanjutkan perjalanan ke Jantho, sedangkan kendaraan umum sangat sulit didapatkan karena terbatas dan pelayanan publik di Kota Jantho waktunya terbatas karena pegawai cepat pulang". Untuk melihat pengaruh kota lainnya "Kota Banda Aceh bisa dikatakan lebih mudah dijangkau karena jarak tempuh lebih pendek dari Lhoong dan sarana angkutan

mudah didapat, atau kalau kebutuhan yang diperlukan ada di Lhoknga, cukup ke kota itu saja”.

Sedangkan hasil kesimpulan wawancara masyarakat Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Montasiek menyatakan bahwa kondisi aksesibilitas ”untuk akses ke Jantho hanya sekali jalan dan kondisi prasarana jalan sudah baik, tapi kendaraan umum terbatas pada jam-jam tertentu, sehingga jika tidak ada urusan khusus maka lebih baik ke kota lain”. Untuk melihat pengaruh kota lainnya “lebih banyak melakukan aktivitas di Kota Banda Aceh dan Kota Lambaro karena selain akses angkutan umum lebih mudah dan fasilitas lebih lengkap”.

Hasil kesimpulan wawancara masyarakat Kabupaten Aceh Besar di Kecamatan Masjid Raya menyatakan bahwa kondisi aksesibilitas ”*untuk akses ke Jantho dari Krueng Raya harus memutar dahulu ke arah Banda Aceh, sedangkan kendaraan umum sangat sulit didapatkan karena terbatas dan pelayanan publik di Kota Jantho waktunya terbatas karena pegawai cepat pulang*”. Untuk melihat pengaruh kota lainnya “*lebih baik ke Kota Banda Aceh karena lebih dekat, sarana angkutan umum lebih mudah dan memang ketersediaan fasilitas lebih lengkap*”.

Berdasarkan pernyataan masyarakat dapat dikatakan kondisi aksesibilitas ke Kota Jantho sangat terbatas baik dari segi akses terdekat maupun sarana angkutan umum, sehingga wilayah pengaruh dari Kota Jantho terlihat kecil karena kondisi aksesibilitasnya dan kalau dihubungkan dengan kondisi pelayanan kota dan akses terpendek, pengaruh kota-kota lain seperti Banda Aceh, Lhoknga dan Lambaro lebih dominan dibandingkan Jantho. Jika dibandingkan hierarki kota, maka tingkat pengaruh besar kecilnya skala pelayanan tergantung hierarkinya, sehingga Kota Jantho mempunyai skala pelayanan kecil dibandingkan ketiga kota tersebut.

Dari pernyataan di atas, analisis hierarki kota dan wilayah pengaruh, dapat disimpulkan Kota Jantho hanya memberikan pelayanan berskala lebih kecil dibandingkan Kota Banda Aceh, Lambaro dan Lhoknga. Kondisi kecilnya wilayah pengaruh Kota Jantho lebih dikarenakan ketersediaan fasilitas yang belum lengkap, akses jalan yang sangat terbatas sehingga masyarakat lebih memilih wilayah lainnya yang lebih mudah untuk dijangkau.

## **5.2 Keunggulan Sektor Ekonomi Wilayah dan Sub Wilayah di Kabupaten Aceh Besar**

Analisis ini dilakukan guna mengetahui keunggulan sektor atau aktivitas ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Seulimum yang didalam wilayahnya terdapat Kota Jantho, analisis ini ditinjau dari tingkat pendapatan regional Kabupaten Aceh Besar dan jumlah tenaga kerja di Kecamatan Seulimum. Dengan melihat tipologi perekonomian wilayah maka suatu pertumbuhan wilayah dapat dilihat, karena kemajuan ekonomi merupakan komponen utama bagi pengembangan wilayah (Alkadri et al., 1999: 17).

Tahapan analisis ini akan mencari keunggulan ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar pada sektor tertentu yang hasilnya akan dijadikan acuan bagi perhitungan keunggulan ekonomi pada wilayah kecamatan. Jika dari hasil analisis didapat keunggulan sektor ekonomi yang sama akan dapat ditentukan korelasi tipologi ekonomi antara Kabupaten Aceh Besar dan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Tingkat keunggulan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh klasifikasi sektor basis dan non basis, yang ditentukan dari perbandingan tingkat pendapatan regional atau jumlah tenaga kerja persektor wilayah terhadap wilayah acuan. Dalam tahapan analisis ini dilakukan perhitungan LQ dengan pembobotan bagi sektor unggulan dan yang bukan unggulan, sehingga dapat dilihat tipologi ekonomi wilayah.

### 5.2.1 Tipologi Ekonomi Wilayah Kabupaten Aceh Besar

Suatu wilayah memiliki keunggulan pada suatu sektor ekonomi, dimana untuk mengetahui keunggulan ekonomi harus diidentifikasi PDRB Kabupaten Aceh Besar yang akan dibandingkan dengan wilayah acuan yaitu PDRB Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan analisa LQ untuk mengetahui sektor basis dan non basis serta pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diketahui tipologi ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Aceh Besar tahun 1980, 1990, dan 2000 dan PDRB Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan tahun yang sama mewakili setiap sepuluh tahun sekali.

**TABEL V. 2**  
**LQ KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1980 HINGGA 1990**

No.	Sektor Ekonomi	Data Daerah			Data Wilayah Acuan			LQ 1980	LQ 1990	LQ 2000
		Kab. Aceh Besar			Prop. NAD					
		PDRBd '80	PDRBd '90	PDRBd '00	PDRBw '80	PDRBw '90	PDRBw '00			
1.	Pertanian	27810.65	42,714.91	144,648.06	130,316.02	789,439.09	2,525,972.34	1.793	2.476	1.212
2.	Pertambangan	813.65	1,904.58	16,742.70	282,208.01	3,951,136.28	1,949,428.32	0.024	0.022	0.182
3.	Industri Pengolahan	8662.66	23,957.13	98,541.06	11,525.11	197,318.84	1,910,341.54	6.316	5.557	1.092
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	39.66	157.89	1,554.04	537.91	8,588.32	27,843.99	0.620	0.841	1.181
5.	Bangunan	3376.83	13,934.88	29,388.60	16,220.46	91,414.04	369,634.13	1.749	6.977	1.683
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9612.41	16,272.83	35,953.65	29,687.53	283,291.52	654,654.33	2.721	2.629	1.162
7.	Angkutan dan Komunikasi	5342.7	11,205.76	50,044.02	23,733.49	159,852.32	906,466.13	1.892	3.208	1.168
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1519.9	1,482.00	8,601.40	7332.68	43,947.57	138,323.59	1.742	1.543	1.316
9.	Jasa-Jasa	6467.98	13,243.04	45,921.96	33,293.46	190,214.52	646,693.47	1.633	3.186	1.503
10.	Jumlah PDRB	63,646.44	124,873.02	431,395.49	534,854.67	5,715,202.50	9,129,357.84			
	Pertumbuhan PDRB (%)		6.97	13.20		26.73	4.80			

Sumber: Hasil Analisis 2003

Perhitungan LQ dapat dilihat pada Tabel V.1 untuk tahun 1980, 1990 dan tahun 2000. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis, dapat dilihat nilai LQ persektor yang nilainya  $> 1$  merupakan sektor basis dan nilai LQ  $< 1$  adalah sektor non basis.

Dari hasil perhitungan LQ didapat hasil bahwa sektor basis  $>1$  untuk tahun 1980 adalah pada sektor pertanian (1,793), sektor industri pengolahan (6,316), sektor bangunan konstruksi (1,749), sektor perdagangan , hotel dan restoran (2,721), sektor angkutan dan komunikasi (1,892), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,742) serta sektor jasa-jasa (1,633). Untuk sektor non basis di Kabupaten Aceh Besar adalah sektor pertambangan dan galian (0,024) serta sektor listrik, gas dan air bersih (0,62). Untuk nilai LQ tertinggi adalah sektor industri pengolahan, dan nilai LQ terendah adalah sektor pertambangan.

Pada perhitungan LQ untuk tahun 1990 didapat sektor basis pada sektor pertanian (2,476), sektor industri pengolahan (5,557), sektor bangunan konstruksi (6,977), sektor perdagangan, hotel dan restoran (2,629), sektor angkutan dan komunikasi (3,208), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,543) serta sektor jasa-jasa (3,186). Pada tahun yang sama sektor non basis adalah sektor pertambangan dan galian (0,022) serta sektor listrik, gas dan air bersih (0,841). Untuk nilai LQ tertinggi adalah sektor bangunan konstruksi dan nilai LQ terendah untuk sektor pertambangan.

Untuk perhitungan LQ terakhir yaitu tahun 2000 diidentifikasi sektor basis untuk Kabupaten Aceh Besar adalah sektor pertanian (1,212), sektor industri pengolahan (1,092), sektor listrik, gas dan air bersih (1,181), sektor bangunan konstruksi (1,683), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,162), sektor angkutan dan komunikasi (1,168), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,316) serta sektor jasa-jasa (1,503). Untuk sektor non basis untuk tahun ini adalah sektor pertambangan dan galian (0,182).

Untuk nilai LQ tertinggi kedua tahun tersebut adalah sektor bangunan konstruksi dan nilai LQ terendah adalah pada sektor pertambangan.

Pada perhitungan LQ pada tahun 1980 dan 1990 terdapat kesamaan yaitu mempunyai dua sektor non basis, bisa dikatakan pada tahun-tahun tersebut pemakaian listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Aceh Besar belum menjadi prioritas, dimana pemakaian gas bisa saja belum tersosialisasi, sedangkan untuk pemakaian air bersih/air minum instalasi yang ada belum terpasang maksimal, di sektor ini hanya pemakaian listriklah yang agak tinggi. Untuk sektor pertambangan, walaupun di Kabupaten Aceh Besar ada lokasi pabrik semen Lhoknga, tapi secara umum untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih mendapat masukan pada sektor migas dengan adanya pertambangan gas di Lhokseumawe sehingga menutup peranan sektor pertambangan umum lainnya (lihat tabel PDRB Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sektor pertambangan sub sektor minyak dan gas pada Lampiran C).

Pada tahun 2000, terdapat satu sektor non basis yaitu sektor pertambangan dan galian. Penyebabnya adalah peningkatan pemakaian listrik karena penambahan penduduk dan ketersediaan instalasi air minum di beberapa kecamatan, dan dengan berpindahnya penduduk perkotaan Kota Banda Aceh ke pinggiran wilayah Aceh Besar, sehingga ciri perkotaan umum untuk penggunaan fasilitas listrik, gas dan air minum merupakan kebutuhan yang termasuk prioritas.

Dalam distribusi pembentuk PDRB Kabupaten Aceh Besar, sektor yang paling dominan adalah sektor pertanian untuk semua tahun walaupun menjadi sektor basis tapi jika melihat nilai LQ dengan sektor pertanian masih di bawah sektor bangunan konstruksi serta sektor jasa-jasa. Sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar masih berperan adalah subsektor pertanian bahan makanan dan peternakan yang jika dibandingkan dengan sub

sektor lain. Jika perbandingan nilai harga tidak terlalu besar dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan, hal ini untuk mengacu pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nilai LQ bisa lebih rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang mengandalkan sub sektor perkebunan seperti Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Barat (lihat tabel PDRB Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Lampiran C).

Jika melihat sektor bangunan konstruksi yang nilainya lebih tinggi dari pada sektor-sektor lain kecuali untuk tahun 1980 (sektor tertinggi adalah sektor industri pengolahan), maka bisa dikatakan karena faktor kedekatan wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh yang merupakan kota terbesar di Aceh dan ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan hubungan kedekatan jarak ini, investasi pada sektor ini bisa lebih berkembang pada perumahan, bangunan perdagangan (toko), dan bangunan-bangunan lainnya. Peran investasi pemerintah untuk prasarana umum seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah dan proyek-proyek lainnya yang sangat besar untuk Kota Banda Aceh dan wilayah-wilayah penyangganya, bisa menyebabkan dominasi besarnya nilai LQ Kabupaten Aceh Besar pada sektor bangunan konstruksi jika dibandingkan dengan wilayah acuannya. Jika dilihat antara tahun 1980 hingga 1990 yang merupakan masa pengembangan Kota Jantho, maka bisa dikatakan sebagai penyebab besar peranannya sektor ini.

Sektor industri pengolahan pada tahun 1980 menjadi terbesar nilai LQ nya disebabkan adanya peranan industri dasar, yaitu pabrik semen di Lhoknga, besaran nilai industri dasar ini sangat berpengaruh karena nilai ekspor yang besar dibandingkan industri lainnya. Industri lain yang punya peranan adalah industri kecil dan menengah yang mengolah hasil-hasil bumi dan kerajinan rakyat. Tahun 1990 sektor ini menjadi sektor non basis diakibatkan dimasukkan industri migas di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, walaupun demikian sektor ini tetap menjadi sektor basis di tahun berikutnya.

Melihat peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran, dapat dikatakan sub sektor perdagangan yang menyumbangkan peranan ini. Jenis perdagangan ini lebih banyak berkisar perdagangan tradisional yang menjual hasil-hasil pertanian dan retail. Sebagai wilayah yang memiliki potensi pariwisata Kabupaten Aceh Besar belum dapat mengoptimalkan sektor hotel dan restoran, walaupun di wilayah ini terdapat banyak restoran tapi hanya bersifat lokal bagi konsumsi penduduk di sekitarnya dan juga warung-warung kopi yang menjadi tradisi bagi masyarakat di daerah ini. Hotel yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar hanya berskala losmen atau rumah penginapan sederhana berlokasi di sekitar pantai Lhoknga dan Lampuuk.

Sektor pengangkutan dan telekomunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan bisa menjadi sektor basis karena kedekatan wilayah ini dengan Kota Banda Aceh. Kedua sektor ini lebih berkembang di wilayah-wilayah pinggiran Kota Banda Aceh yang menjadi daerah sub urban.

Sektor basis lain adalah sektor jasa-jasa umum, peranan sektor ini jika dilihat PDRB Kabupaten Aceh Besar yang lebih berperan adalah sub sektor pemerintahan umum. Dengan melihat dominasi sub sektor pemerintahan umum dan nilai LQ sektor jasa yang lebih dari tiga di setiap tahunnya, ini memberikan gambaran bahwa peranan investasi pemerintah masih kuat dibandingkan sektor swasta.

Secara umum dapat digambarkan sektor-sektor basis di Kabupaten Aceh Besar lebih banyak dari sektor non basis, ini lebih mengacu dengan kondisi perekonomian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sebenarnya belum terlalu besar pada sektor-sektor basis yang bernilai LQ diatas dua di Kabupaten Aceh Besar. Untuk sektor unggulan adalah sektor pertanian yang lebih mendominasi PDRB, walaupun nilai LQ lebih kecil dari sektor-sektor basis lainnya seperti sektor bangunan konstruksi dan sektor jasa-jasa. Jika

mengacu pada nilai LQ dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu wilayah kabupaten yang maju tingkat perekonomiannya.

### 5.2.2 Tipologi Ekonomi Sub Wilayah di Kabupaten Aceh Besar

Kondisi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Besar mempunyai karakteristik berbeda-beda, dimana tiap kecamatan juga memiliki keunggulan ekonomi pada suatu sektor yang sama atau berbeda-beda. Masing-masing kecamatan ini juga berbeda tingkat ekonomi, dimana ada wilayah maju dan tertinggal yang akan diidentifikasi dari tingkat keunggulan ekonomi masing-masing kecamatan. Kondisi kecamatan maju diidentifikasi dengan dominasi sektor ekonomi yang paling unggul (basis). Untuk Kota Jantho karena masih tergabung dengan Kecamatan Seulimum, maka tipologinya akan dilihat tipologi untuk Kecamatan Seulimum.

Analisis ini menggunakan perhitungan LQ dengan data angkatan kerja Kabupaten Aceh Besar persektor dan kecamatan tahun 1980, 1990 dan 2000. Data tenaga kerja ini berdasarkan sensus yang dilakukan untuk 10 tahun sekali. Berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ) terhadap jumlah tenaga kerja tiap sektor pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, maka diperoleh sektor-sektor basis sebagai berikut:

**TABEL V. 3**  
**SEKTOR-SEKTOR BASIS TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH BESAR**

No.	Kecamatan	Sektor Basis		
		1980	1990	2000
1.	Lhoong	1. Pertanian	1. Pertanian	1. Pertanian
2.	Lhoknga/Leupung	1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Bangunan 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Bangunan 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

No.	Kecamatan	Sektor Basis		
		1980	1990	2000
3.	Indrapuri	1. Pertanian	1. Pertanian 2. Listrik, Gas dan Air Bersih	1. Pertanian 2. Listrik, Gas dan Air Bersih
4.	Seulimeum	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4. Jasa-Jasa	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4. Jasa-Jasa
5.	Mesjid Raya	1. Pertambangan 2. Industri Pengolahan 3. Perdagangan, Hotel dan restoran 4. Angkutan dan Komunikasi	1. Pertambangan 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan restoran 4. Angkutan dan Komunikasi	1. Pertambangan 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan restoran 4. Angkutan dan Komunikasi
6.	Darussalam	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Jasa-Jasa	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Bangunan 4. Jasa-Jasa	1. Pertanian 2. Industri Pengolahan 3. Bangunan 4. Jasa-Jasa
7.	Kuta Baro	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Jasa-Jasa	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Jasa-Jasa	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4. Jasa-Jasa
8.	Montasiek	1. Pertanian 2. Bangunan	1. Pertanian 2. Jasa-Jasa	1. Pertanian 2. Bangunan 3. Jasa-Jasa
9.	Suka Makmur	1. Pertanian 2. Listrik, Gas dan Air Minum 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1. Pertanian 2. Listrik, Gas dan Air Minum 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1. Pertanian 2. Listrik, Gas dan Air Minum 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
10.	Darul Imarah	1. Pertambangan 2. Industri Pengolahan 3. Listrik, Gas dan Air Minum 4. Bangunan 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran 6. Angkutan dan Komunikasi 7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 8. Jasa-Jasa	1. Pertambangan 2. Listrik, Gas dan Air Minum 3. Bangunan 4. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5. Angkutan dan Komunikasi 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7. Jasa-Jasa	1. Listrik, Gas dan Air Minum 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa
11.	Ingin Jaya	1. Listrik, Gas dan Air Minum 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1. Listrik, Gas dan Air Minum 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1. Listrik, Gas dan Air Minum 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran

No.	Kecamatan	Sektor Basis		
		1980	1990	2000
		4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa	4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa	4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa
12.	Peukan Bada	1. Pertambangan 2. Listrik, Gas dan Air Minum 3. Bangunan 4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa	1. Pertambangan 2. Listrik, Gas dan Air Minum 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa	1. Listrik, Gas dan Air Minum 2. Bangunan 3. Perdagangan, Hotel dan Restoran 4. Angkutan dan Komunikasi 5. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6. Jasa-Jasa
13.	Pulo Aceh	1. Pertanian	1. Pertanian	1. Pertanian

Sumber: Hasil Analisis 2003

Kecamatan-kecamatan yang mempunyai sektor basis terbanyak adalah Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Peukan Bada, ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan ini paling maju perekonomiannya di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan-kecamatan yang paling sedikit sektor basisnya adalah Kecamatan Lhoong dan Pulo Aceh, berarti kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang paling mundur tingkat perekonomiannya. Untuk Kecamatan Seulimum, didapat tiga sektor basis tahun 1980 dan empat sektor basis tahun 1990 dan tahun 2000, dengan jumlah sektor basis seperti ini menunjukkan kedudukan ekonomi Kecamatan Seulimum masih dibawah Kecamatan Darul Imarah, Ingin Jaya dan Peukan Bada. Pada tahun 1990 bertambahnya sektor basis di sektor jasa-jasa menunjukkan dimulainya aktivitas pemerintahan di Kota Jantho.

Jika dilihat perbandingan sektor basis antar kecamatan, wilayah kecamatan-kecamatan di bagian utara Kabupaten Aceh Besar kurang maju karena posisinya berbatasan dengan Kota Banda Aceh, lebih maju, terutama di sektor-sektor sekunder.

Kondisi kecamatan-kecamatan di selatan wilayah Kabupaten Aceh Besar lebih mengandalkan sektor primer (pertanian), terutama kecamatan yang posisinya dekat dengan Kota Jantho (Indrapuri, Montasiek dan Suka Makmur). Kecamatan-kecamatan yang paling mundur yaitu Lhoong dan Pulo Aceh hanya mengandalkan sektor pertanian (primer), juga dikarenakan kondisi aksesibilitas Kecamatan Lhoong yang letaknya di barat dan melewati pegunungan, sedangkan Kecamatan Pulo Aceh merupakan wilayah kepulauan.

**TABEL V. 4**  
**KLASIFIKASI SEKTOR BASIS DI KECAMATAN-KECAMATAN PADA**  
**KABUPATEN ACEH BESAR**

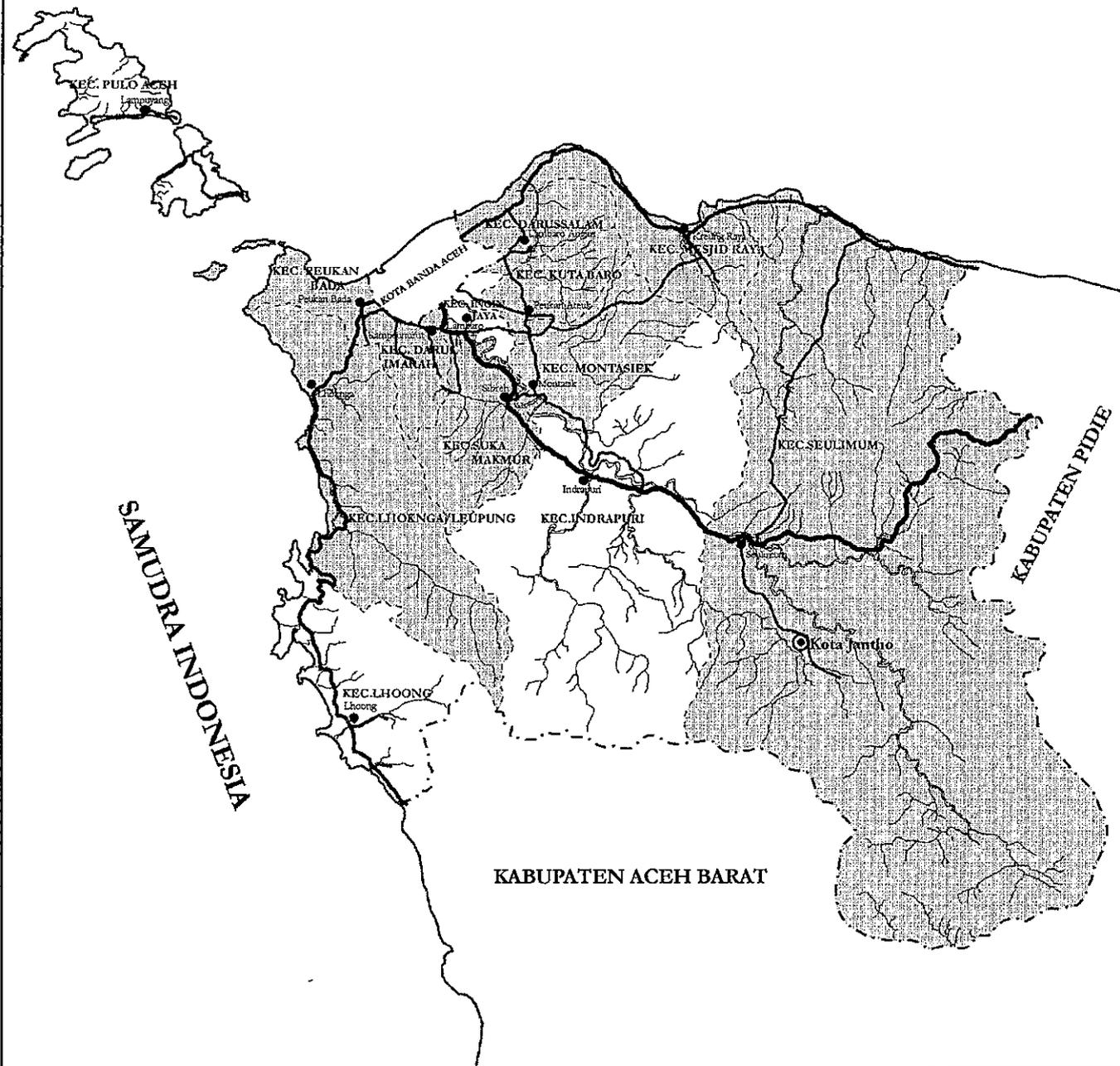
No	Sektor Unggulan	Kecamatan		
		1980	1990	2000
1.	Pertanian (Primer)	Lhoong, Lhoknga/Leupung, Indrapuri, Seulimum, Darussalam, Kuta Baro, Montasiek, Suka Makmur, Pulo Aceh ( 9 )	Lhoong, Lhoknga/Leupung, Indrapuri, Seulimum, Darussalam, Kuta Baro, Montasiek, Suka Makmur, Pulo Aceh ( 9 )	Lhoong, Lhoknga/Leupung, Indrapuri, Seulimum, Darussalam, Kuta Baro, Montasiek, Suka Makmur, Pulo Aceh ( 9 )
2.	Pertambangan (Primer)	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya, Darul Imarah, Peukan Bada ( 4 )	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya, Peukan Bada ( 3 )	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya ( 2 )
3.	Industri Pengolahan (Sekunder)	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya, Darussalam, Darul Imarah ( 4 )	Lhoknga/Leupung, Darussalam ( 2 )	Lhoknga/Leupung, Darussalam ( 2 )
4.	Listrik, Gas dan Air bersih (Sekunder)	Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 4 )	Indrapuri, Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 5 )	Indrapuri, Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 5 )
5.	Bangunan Konstruksi (Sekunder)	Lhoknga/Leupung, Seulimum, Kuta Baro, Montasiek, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 7 )	Seulimum, Mesjid Raya, Darussalam, Kuta Baro, Darul Imarah, Ingin Jaya ( 6 )	Lhoknga/Leupung, Seulimum, Mesjid Raya, Darussalam, Kuta Baro, Montasiek, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 9 )
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran (Tersier)	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya ( 4 )	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 5 )	Lhoknga/Leupung, Mesjid Raya, Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 6 )
7.	Angkutan dan Komunikasi (Tersier)	Mesjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 4 )	Mesjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 4 )	Mesjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 4 )

No	Sektor Unggulan	Kecamatan		
		1980	1990	2000
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan (Tersier)	Lhoknga/Leupung, Seulimum, Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 6 )	Lhoknga/Leupung, Seulimum, Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 6 )	Lhoknga/Leupung, Seulimum, Kuta Baro, Suka Makmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 7 )
9.	Jasa-jasa (Tersier)	Darussalam, Kuta Baro, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 5 )	Seulimum, Darussalam, Kuta Baro, Montasiek, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 7 )	Seulimum, Darussalam, Kuta Baro, Montasiek, Darul Imarah, Ingin Jaya, Peukan Bada ( 7 )

*Sumber: Hasil Analisis 2003*

Dari hasil tabel di atas, didapat sektor pertanian merupakan sektor yang terbanyak menghasilkan produksi dilihat, dari banyaknya kecamatan-kecamatan yang mempunyai sektor basis di sektor pertanian. Untuk sektor lain yaitu sektor bangunan konstruksi, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, sektor keuangan, sektor pengangkutan, sektor listrik, gas dan air bersih. Untuk sektor terkecil dari jumlah kecamatan yang mempunyai sektor basisnya adalah sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam membentuk ekonomi di Kabupaten Aceh Besar, dan diikuti sektor bangunan konstruksi dan sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan hanya ada di beberapa kecamatan, berarti peranan sektor ini sangat kecil dan lebih bisa memenuhi kebutuhan lokal.

# SELAT MALAKA



  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**WILAYAH DAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

**TESIS**

---

**PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA**  
**KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN**  
**WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR**

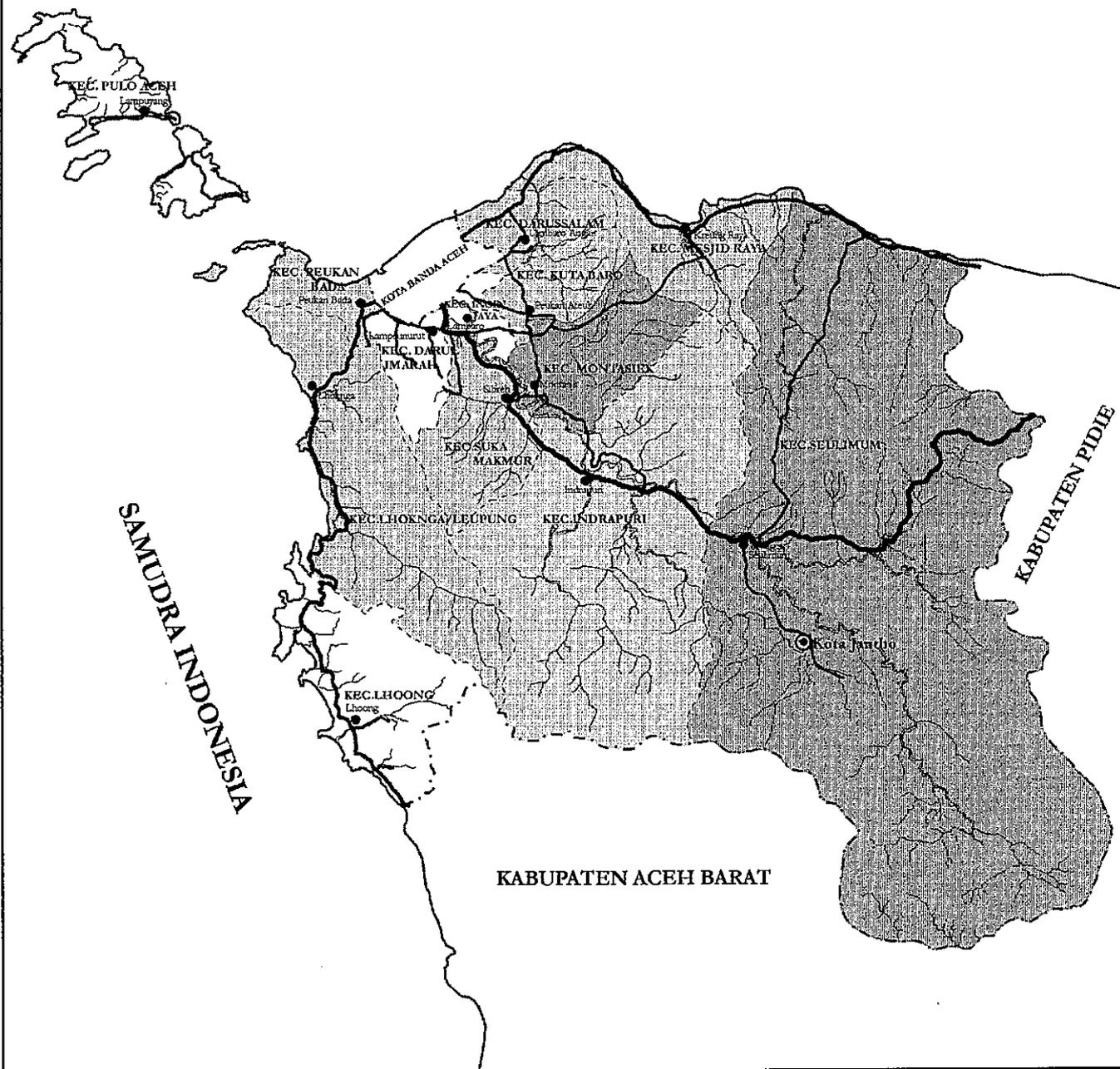
**PETA**  
**SEKTOR BASIS TAHUN 1980**  
**KABUPATEN ACEH BESAR**

LEGENDA	KETERANGAN:
Batas Perairan	Primer, Sekunder, & Tersier
Jalan Negara	Primer & Sekunder
Jalan Propinsi	Sekunder & Tersier
Batas Kecamatan	Primer
Batas Kabupaten	
Sungai	
Kota	
Ibu Kota Kecamatan	
Ibu Kota Kabupaten	

Sumber :  
HASIL ANALISIS 2003

SKALA		
NUMERIK	GARIS	
1 : 500.000		
	<b>5.7</b>	<b>107</b>
UTARA	NO. PETA	HALAMAN
Tahun Pembuatan : 2003		

# SELAT MALAKA



KABUPATEN ACEH BESAR

## PETA SEKTOR BASIS TAHUN 1990 KABUPATEN ACEH BESAR

Sumber :  
HASIL ANALISIS 2003

### LEGENDA

- Batas Perairan
- Jalan Negara
- Jalan Propinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kabupaten

### KETERANGAN:

- Primer, Sekunder, & Tersier
- Primer & Sekunder
- Primer & Tersier
- Sekunder & Tersier
- Primer

### SKALA

NUMERIK	GARIS
1 : 500.000	



5.8

108

UTARA NO. PETA HALAMAN

Tahun Pembuatan :  
2003

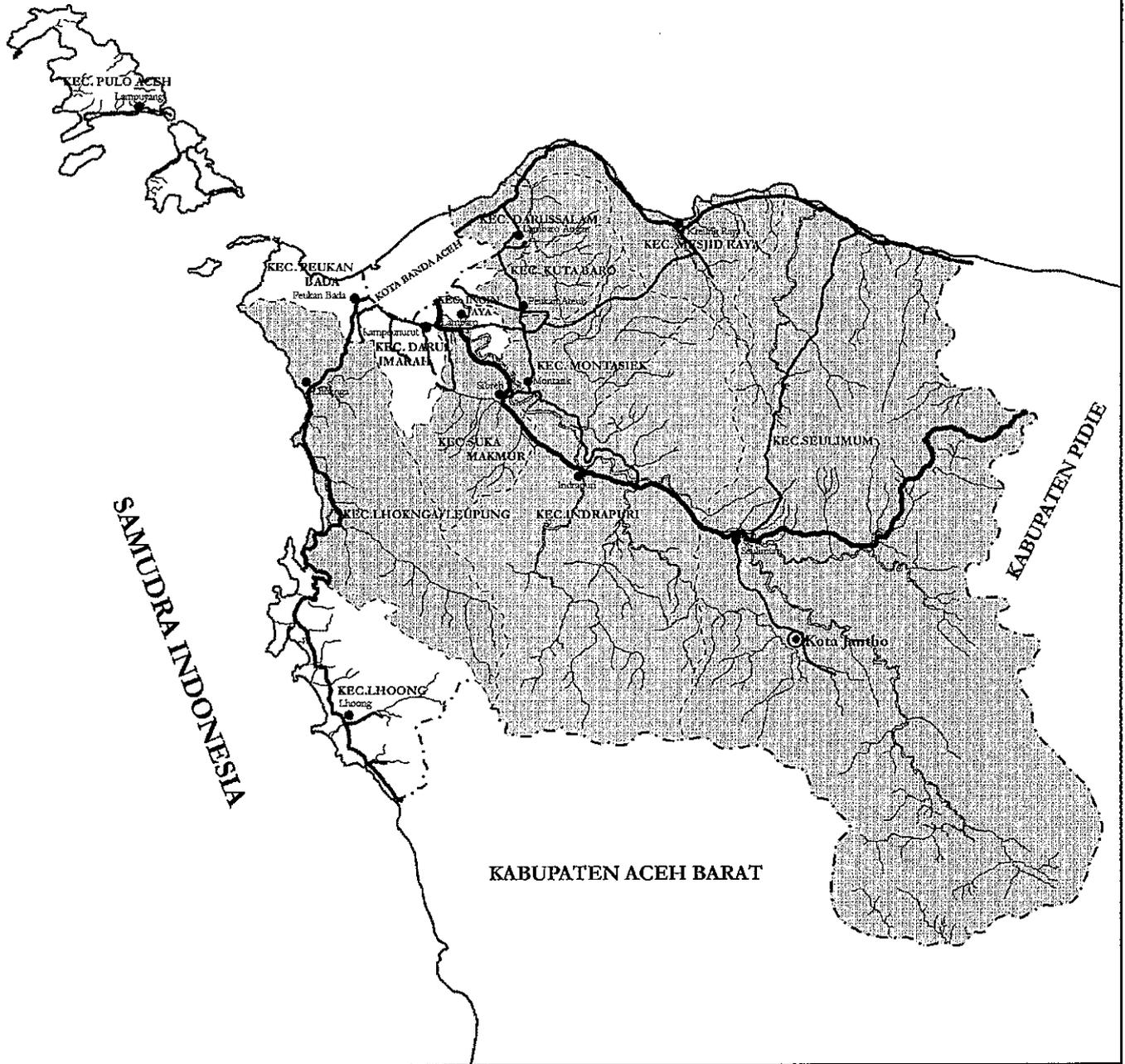


PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**TESIS**

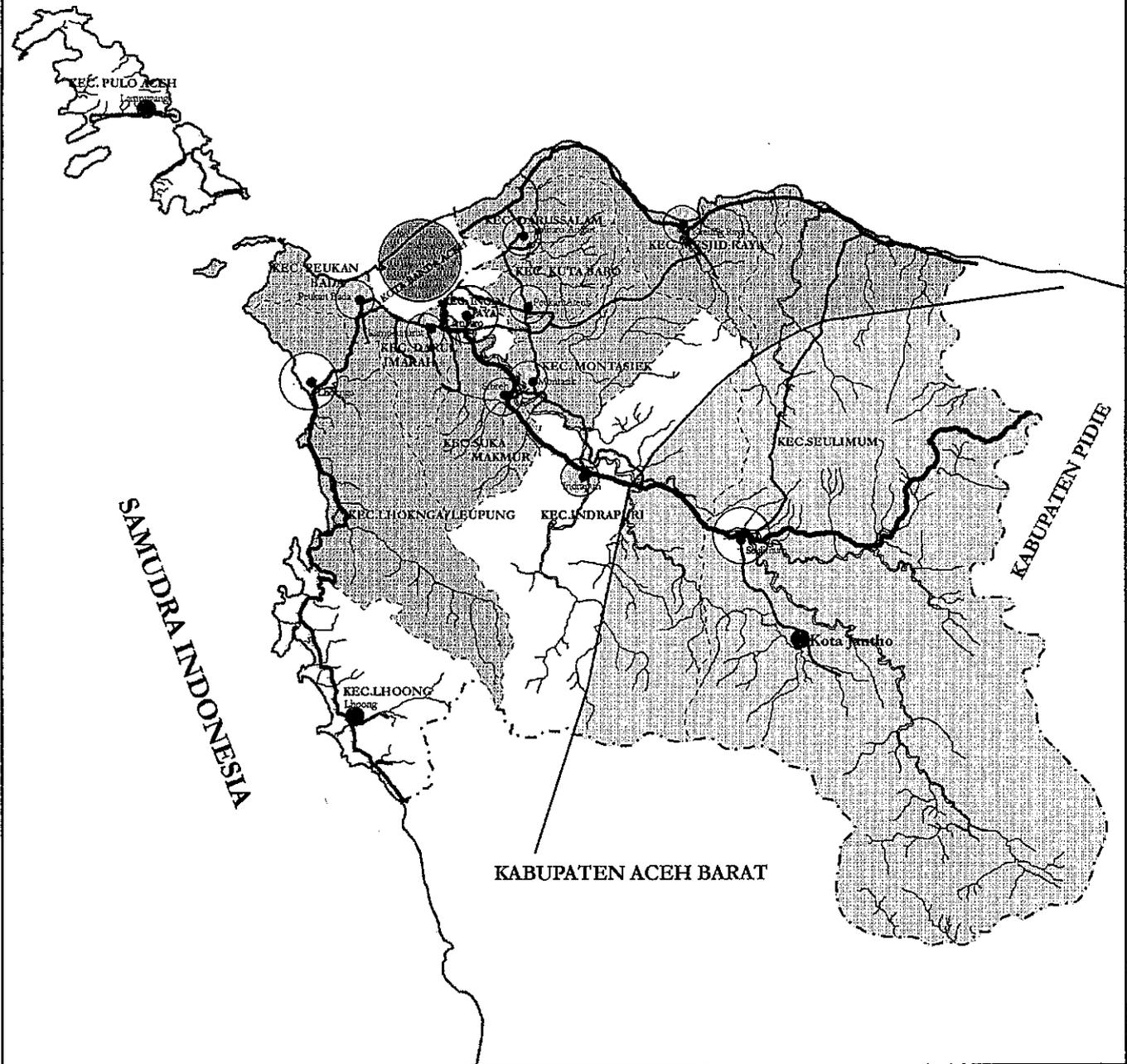
PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

# SELAT MALAKA



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	<b>PETA</b> <b>SEKTOR BASIS TAHUN 2000</b> <b>KABUPATEN ACEH BESAR</b>		Sumber : HASIL ANALISIS 2003		
	<b>LEGENDA</b> [---] Batas Perairan [==] Jalan Negara [---] Jalan Propinsi [---] Batas Kecamatan [---] Batas Kabupaten [---] Sungai [•] Kota [•] Ibu Kota Kecamatan [•] Ibu Kota Kabupaten		<b>KETERANGAN:</b> [---] Primer, Sekunder, & Tersier [---] Primer & Sekunder [---] Sekunder & Tersier [---] Primer		
<b>TESIS</b>			<b>SKALA</b>		
		NUMERIK 1 : 500.000		GARIS 	
				5.9	109
PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR				UTARA NO. PETA	HALAMAN
		Tahun Pembuatan : 2003			

# SELAT MALAKA



## PETA ANALISIS KETERKAITAN ANTAR AKTIVITAS EKONOMI KOTA JANTHO DAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1980

Sumber :  
HASIL ANALISIS 2003

- LEGENDA**
- Batas Perairan
  - Jalan Negara
  - Jalan Propinsi
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kabupaten
  - Sungai
  - Kota
  - Ibu Kota Kecamatan
  - Ibu Kota Kabupaten
  - Primer, Sekunder, & Tersier
  - Primer & Sekunder
  - Sekunder & Tersier
  - Primer
  - Kota Hierarki I
  - Kota Hierarki II
  - Kota Hierarki III
  - Kota Hierarki IV
  - Wilayah Pengaruh Kota Jantho

### SKALA

NUMERIK	GARIS
1 : 500.000	



5.10

110

UTARA	NO. PETA	HALAMAN
-------	----------	---------

Tahun Pembuatan :  
2003

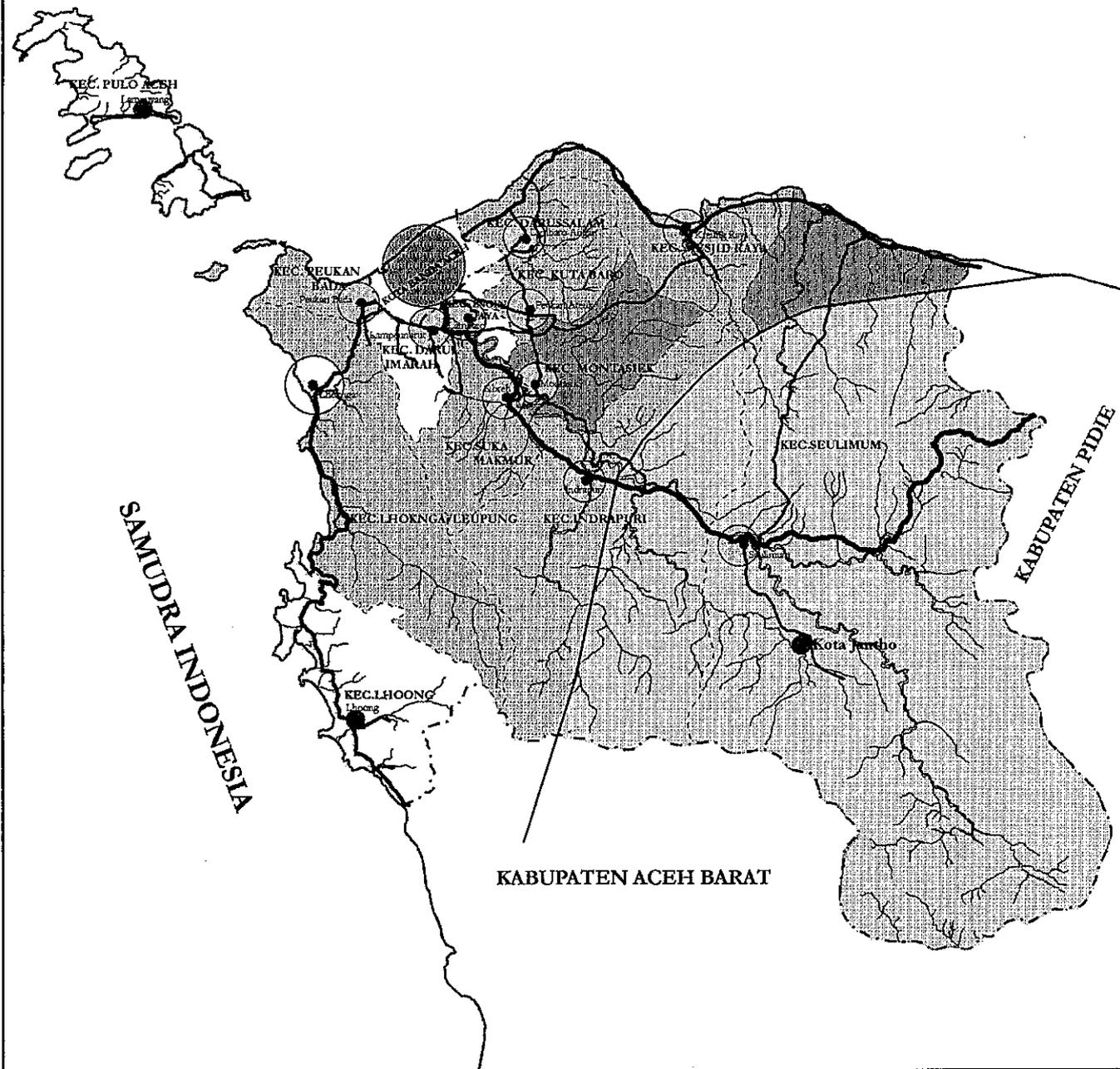


PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

### TESIS

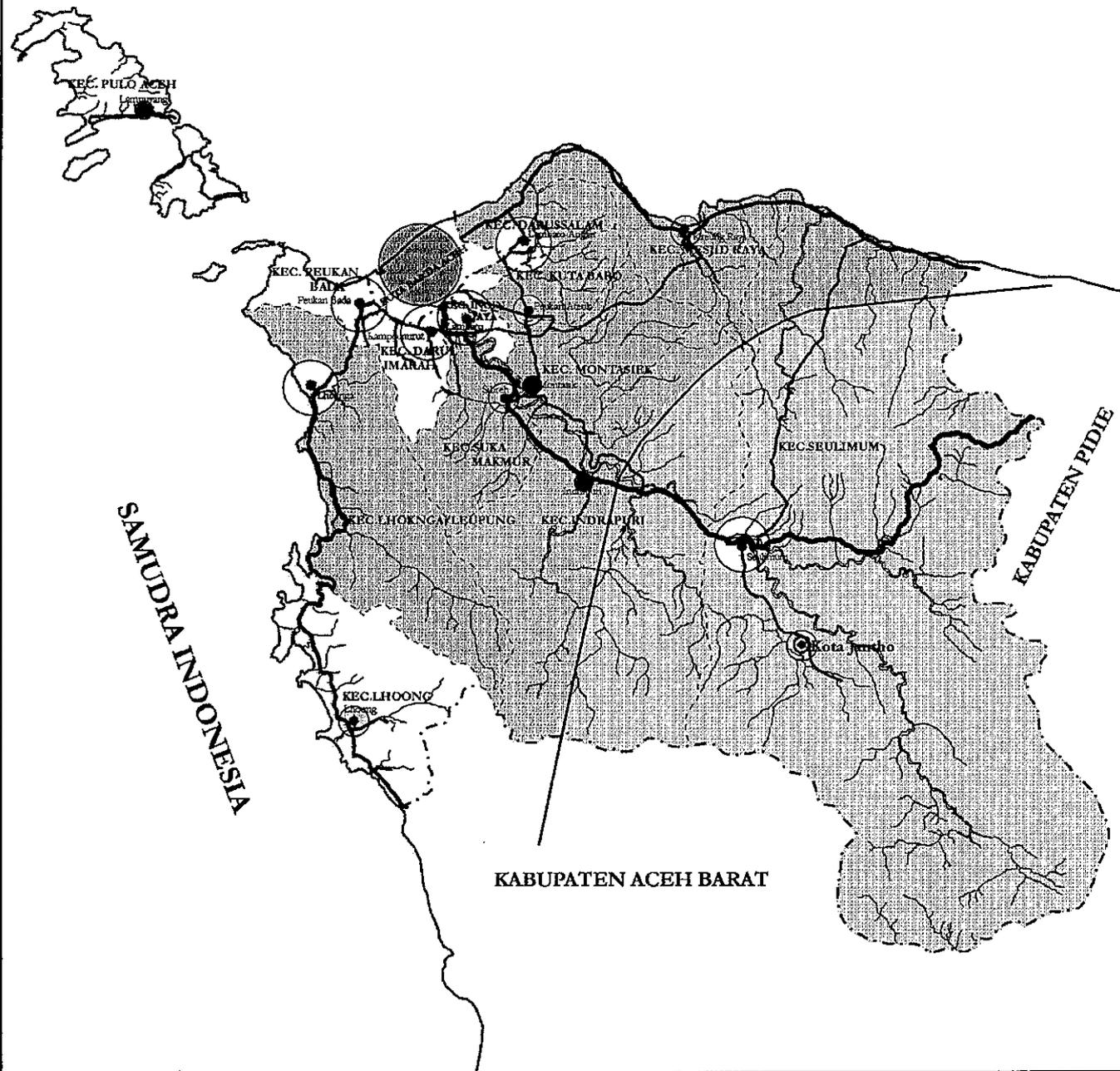
PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

# SELAT MALAKA



 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO	<b>PETA ANALISIS KETERKAITAN ANTAR AKTIVITAS EKONOMI                  KOTA JANTHO DAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 1990</b>		Sumber : HASIL ANALISIS 2003											
	<b>LEGENDA</b>		<b>SKALA</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Perairan</li> <li> Jalan Negara</li> <li> Jalan Propinsi</li> <li> Batas Kecamatan</li> <li> Batas Kabupaten</li> <li> Sungai</li> <li> Kota</li> <li> Ibu Kota Kecamatan</li> <li> Ibu Kota Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Primer, Sekunder, &amp; Tersier</li> <li> Primer &amp; Sekunder</li> <li> Primer &amp; Tersier</li> <li> Sekunder &amp; Tersier</li> <li> Primer</li> <li> Kota Hierarki I</li> <li> Kota Hierarki II</li> <li> Kota Hierarki III</li> <li> Kota Hierarki IV</li> <li> Wilayah Pengaruh Kota Jantho</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">NUMERIK</th> <th style="width: 50%;">GARIS</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 : 500.000</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	NUMERIK	GARIS	1 : 500.000		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">  </td> <td style="text-align: center; width: 33%; font-size: 24px;"> <b>5.11</b> </td> <td style="text-align: center; width: 33%; font-size: 24px;"> <b>111</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">UTARA</td> <td style="text-align: center;">NO. PETA</td> <td style="text-align: center;">HALAMAN</td> </tr> </table>		<b>5.11</b>	<b>111</b>	UTARA	NO. PETA	HALAMAN
	NUMERIK	GARIS												
1 : 500.000														
	<b>5.11</b>	<b>111</b>												
UTARA	NO. PETA	HALAMAN												
PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR		Tahun Pembuatan : 2003												

# SELAT MALAKA



 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p><b>PETA ANALISIS KETERKAITAN ANTAR AKTIVITAS EKONOMI KOTA JANTHO DAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2000</b></p>		<p>Sumber : HASIL ANALISIS 2003</p>																																																
	<p><b>LEGENDA</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Batas Perairan</td> <td></td> <td>Primer, Sekunder, &amp; Tersier</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Negara</td> <td></td> <td>Primer &amp; Sekunder</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Propinsi</td> <td></td> <td>Sekunder &amp; Tersier</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> <td></td> <td>Primer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kabupaten</td> <td></td> <td>Kota Hierarki I</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sungai</td> <td></td> <td>Kota Hierarki II</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kota</td> <td></td> <td>Kota Hierarki III</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ibu Kota Kecamatan</td> <td></td> <td>Kota Hierarki IV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ibu Kota Kabupaten</td> <td></td> <td>Wilayah Pengaruh Kota Jantho</td> </tr> </table>			Batas Perairan		Primer, Sekunder, & Tersier		Jalan Negara		Primer & Sekunder		Jalan Propinsi		Sekunder & Tersier		Batas Kecamatan		Primer		Batas Kabupaten		Kota Hierarki I		Sungai		Kota Hierarki II		Kota		Kota Hierarki III		Ibu Kota Kecamatan		Kota Hierarki IV		Ibu Kota Kabupaten		Wilayah Pengaruh Kota Jantho	<p><b>SKALA</b></p> <table border="1"> <tr> <td>NUMERIK</td> <td colspan="2">GARIS</td> </tr> <tr> <td>1 : 500.000</td> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.12</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>UTARA</td> <td>NO. PETA</td> <td>HALAMAN</td> </tr> </table>		NUMERIK	GARIS		1 : 500.000				5.12	112	UTARA	NO. PETA
	Batas Perairan		Primer, Sekunder, & Tersier																																																
	Jalan Negara		Primer & Sekunder																																																
	Jalan Propinsi		Sekunder & Tersier																																																
	Batas Kecamatan		Primer																																																
	Batas Kabupaten		Kota Hierarki I																																																
	Sungai		Kota Hierarki II																																																
	Kota		Kota Hierarki III																																																
	Ibu Kota Kecamatan		Kota Hierarki IV																																																
	Ibu Kota Kabupaten		Wilayah Pengaruh Kota Jantho																																																
NUMERIK	GARIS																																																		
1 : 500.000																																																			
	5.12	112																																																	
UTARA	NO. PETA	HALAMAN																																																	
<p><b>TESIS</b></p> <p>PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR</p>	<p>Tahun Pembuatan : 2003</p>																																																		

### 5.2.3 Analisis Keterkaitan Antar Aktivitas Ekonomi Kota Jantho dan Kabupaten Aceh Besar

Analisis ini bersifat deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta dari analisis tipologi ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar dan membandingkan dengan tipologi ekonomi wilayah Kecamatan Seulimum. Dengan membandingkan hasil LQ ekonomi Kabupaten Aceh Besar dan hasil LQ di kecamatan-kecamatan sebagai untuk melihat hubungan besaran keunggulan ekonomi di kecamatan-kecamatan tersebut, maka kesesuaian ini akan lebih menunjukkan tingkat keterkaitan antar aktivitas perekonomian keduanya, yang kemudian digabungkan dengan aspek keruangan untuk melihat kota-kota pusat pertumbuhan dengan melihat orde hierarki kota dan pengaruh dari Kota Jantho sendiri dengan melihat wilayah pengaruhnya.

Dengan membandingkan hasil LQ ekonomi Kabupaten Aceh Besar dan hasil LQ di kecamatan-kecamatan dapat digunakan untuk melihat hubungan besaran keunggulan ekonomi di kecamatan-kecamatan tersebut, maka kesesuaian ini akan lebih menunjukkan tingkat keterkaitan antar aktivitas perekonomian keduanya, yang kemudian digabungkan dengan aspek keruangan untuk melihat kota-kota pusat pertumbuhan dengan melihat orde hierarki kota dan pengaruh dari Kota Jantho sendiri dengan melihat wilayah pengaruhnya.

**TABEL V. 5**  
**KONDISI TAHUN 1980 DAN 1984**

No.	Kecamatan	Kota	Hierarki Kota	Sektor Basis
1.	Lhoknga/Leupung	Lhoknga	II	- Pertanian - Pertambangan - Industri Pengolahan - Bangunan - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

No.	Kecamatan	Kota	Hierarki Kota	Sektor Basis
2.	Seulimum	Seulimum Jantho	II IV	- Pertanian - Industri pengolahan - Bangunan
3.	Ingin Jaya	Lambaro	II	- Listrik, Gas dan Air Minum - Bangunan - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Angkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
4.	Peukan Bada	Peukan Bada	II	- Pertambangan - Listrik, Gas dan Air Minum - Bangunan - Angkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
5.	Montasiek	Montasiek	II	- Pertanian - Bangunan
6.	Darussalam	Lambaro Angan	II	- Pertanian - Industri Pengolahan - Jasa-Jasa
7.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	III	- Pertanian - Bangunan - Jasa-Jasa
8.	Suka Makmur	Sibreh	III	- Pertanian - Listrik, Gas dan Air Minum - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9.	Darul Imarah	Lampeunerut	III	- Pertambangan - Industri Pengolahan - Listrik, Gas dan Air Minum - Bangunan - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Angkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
10.	Mesjid Raya	Krueng Raya	III	- Pertambangan - Industri Pengolahan - Perdagangan, Hotel dan restoran - Angkutan dan Komunikasi
11.	Indrapuri	Indrapuri	III	- Pertanian
12.	Lhoong	Lhoong	III	- Pertanian
13.	Pulo Aceh	Lampuyang	IV	- Pertanian

Sumber: Hasil Analisis 2003

Pada Peta 5.10 dan Tabel V.5, terlihat keunggulan kecamatan Lhoknga/Leupung, Masjid Raya, Darul Imarah, Ingin Jaya dan Peukan Bada (lima kecamatan) dibandingkan Kecamatan Seulimum pada tahun 1980, sedangkan melihat hierarki Kota Jantho pada tahun 1984 berada pada hierarki IV dan wilayah pengaruh pada tahun 1984 yang hanya menyebar pada Kecamatan Seulimum, Indrapuri, Suka Makmur dan Montasiek dapat dikatakan pada saat penetapan menjadi ibukota Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Seulimum pada saat itu belum terlalu berkembang dan keunggulan pada sektor pertanian, bangunan konstruksi dan keuangan.

**TABEL V. 6**  
**KONDISI TAHUN 1990**

No.	Kecamatan	Kota	Hierarki Kota	Sektor Basis
1.	Lhoknga/Leupung	Lhoknga	II	- Pertanian - Pertambangan - Industri Pengolahan - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
2.	Seulimum	Seulimum Jantho	III IV	- Pertanian - Bangunan - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
3.	Ingin Jaya	Lambaro	III	- Listrik, Gas dan Air Minum - Bangunan - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Angkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
4.	Peukan Bada	Peukan Bada	III	- Pertambangan - Listrik, Gas dan Air Minum - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Angkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
5.	Suka Makmur	Sibreh	III	- Pertanian - Listrik, Gas dan Air Minum - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

No.	Kecamatan	Kota	Hierarki Kota	Sektor Basis
6.	Darul Imarah	Lampeunerut	III	- Pertambangan - Listrik, Gas dan Air Minum - Bangunan - Perdagangan, Hotel dan Restoran - Angkutan dan Komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-Jasa
7.	Montasiek	Montasiek	III	- Pertanian - Jasa-Jasa
8.	Mesjid Raya	Krueng Raya	III	- Pertambangan - Bangunan - Perdagangan, Hotel dan restoran - Angkutan dan Komunikasi
9.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	III	- Pertanian - Bangunan - Jasa-Jasa
10.	Darussalam	Lambaro Angan	III	- Pertanian - Industri Pengolahan - Bangunan - Jasa-Jasa
11.	Indrapuri	Indrapuri	III	- Pertanian - Listrik, Gas dan Air Bersih
12.	Lhoong	Lhoong	IV	- Pertanian
13.	Pulo Aceh	Lampuyang	IV	- Pertanian

Sumber: Hasil Analisis 2003

Pada Gambar 5.11 dan Tabel V.6, terlihat ada penambahan sektor basis di Kecamatan Seulimum yaitu pada sektor jasa-jasa dan kecamatan lain yang lebih unggul adalah kecamatan Lhoknga/Leupung, Darul Imarah, Ingin Jaya dan Peukan Bada (4 kecamatan) pada tahun 1990. Hierarki Kota Jantho pada tahun ini masih berada di orde IV dan wilayah pengaruhnya tetap pada kecamatan-kecamatan yang sama seperti tahun 1984. Dapat dikatakan pada tahun ini terdapat pengaruh Kota Jantho terhadap Kecamatan Seulimum pada sektor jasa-jasa dan perubahan terhadap sektor basis yang membuat kecamatan ini naik keunggulan ekonominya dibandingkan Kecamatan Mesjid Raya.

**TABEL V. 7**  
**KONDISI TAHUN 2000**

No.	Kecamatan	Kota	Hierarki Kota	Sektor Basis
1.	Lhoknga/Leupung	Lhoknga	II	- Pertanian - Pertambangan - Industri pengolahan - Bangunan - Perdagangan, hotel dan restoran - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
2.	Darussalam	Lambaro Angan	II	- Pertanian - Industri pengolahan - Bangunan - Jasa-jasa
3.	Darul Imarah	Lampeunerut	II	- Listrik, gas dan air bersih - Bangunan - Perdagangan, hotel dan restoran - Angkutan dan komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa
4.	Peukan Bada	Peukan Bada	II	- Listrik, gas dan air bersih - Bangunan - Perdagangan, hotel dan restoran - Angkutan dan komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa
5.	Seulimum	Seulimum Jantho	II III	- Pertanian - Bangunan - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa
6.	Ingin Jaya		II	- Listrik, gas dan air bersih - Bangunan - Perdagangan, hotel dan restoran - Angkutan dan komunikasi - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan - Jasa-jasa
7.	Lhoong	Lhoong	III	- Pertanian
8.	Mesjid Raya	Krueng Raya	III	- Pertanian - Bangunan - Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - Jasa-jasa

No.	Kecamatan	Kota	Hierarki Kota	Sektor Basis
9.	Kuta Baro	Peukan Ateuk	III	- Pertanian - Bangunan - Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - Jasa-jasa
10.	Sukamakmur	Sibreh	III	- Pertanian - Listrik, gas dan air minum - Perdagangan, hotel dan restoran - Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
11.	Indrapuri	Indrapuri	IV	- Pertanian - Listrik, gas dan air bersih
12.	Montasiek	Montasiek	IV	- Pertanian - Bangunan - Jasa-jasa
13.	Pulo Aceh	Lampuyang	IV	- Pertanian

*Sumber: Hasil Analisis 2003*

Pada tahun 2000 (Gambar 5.12 dan Tabel V.7), sektor basis di Kecamatan Seulimum tetap mempunyai 4 keunggulan yaitu pertanian, bangunan, keuangan dan jasa-jasa, pada tahun ini empat kecamatan yang lebih maju. Hierarki Kota Jantho pada tahun ini sudah berada di orde III, dan wilayah pengaruhnya tetap. Dapat dikatakan pada tahun ini perubahan hanya terjadi pada hierarki Kota Jantho tapi pada sektor ekonomi unggulan tidak ada perubahan.

Dari temuan di atas dapat dikatakan, perubahan yang terjadi akibat dipindahkan ibukota ke Jantho pada tahun 1984 hanya adanya penambahan sektor basis di Kecamatan Seulimum pada 1990 dan perubahan hierarki Kota Jantho pada tahun 2000, dan tidak adanya perubahan wilayah pengaruh dari ketiga tahun tersebut. Dengan demikian, peranan Kota Jantho terhadap aktivitas perekonomian Kabupaten Aceh Besar tidak menunjukkan adanya perubahan yang besar, karena hanya meningkatkan sektor jasa-jasa saja dan jika melihat hierarki kota walaupun ada perubahan pada tahun 1991 dari orde IV ke orde III karena penambahan fasilitas yang disediakan pemerintah tapi tetap kota lain mempunyai fasilitas yang lebih unggul, serta wilayah pengaruh belum adanya perubahan besar karena

dari sisi aksesibilitas tidak ada pengembangan, sehingga Kota Jantho belum mempunyai daya saing sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar. Jika melihat dari perbandingan sektor basis di kecamatan, orde kota dapat dikatakan pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar berada di Kota Lhoknga, Lambaro, Lampeuneruet, Peukan Bada dan Seulimum (Ibukota Kecamatan Seulimum, dan Kota Jantho pada saat itu masih di Kecamatan Seulimum).

Aktivitas masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yang terjadi di Kota Jantho adalah aktivitas jasa pemerintahan karena perubahan sektor basis di Kecamatan Seulimum adalah sektor jasa-jasa, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan penduduk Kabupaten Aceh Besar di bawah ini.

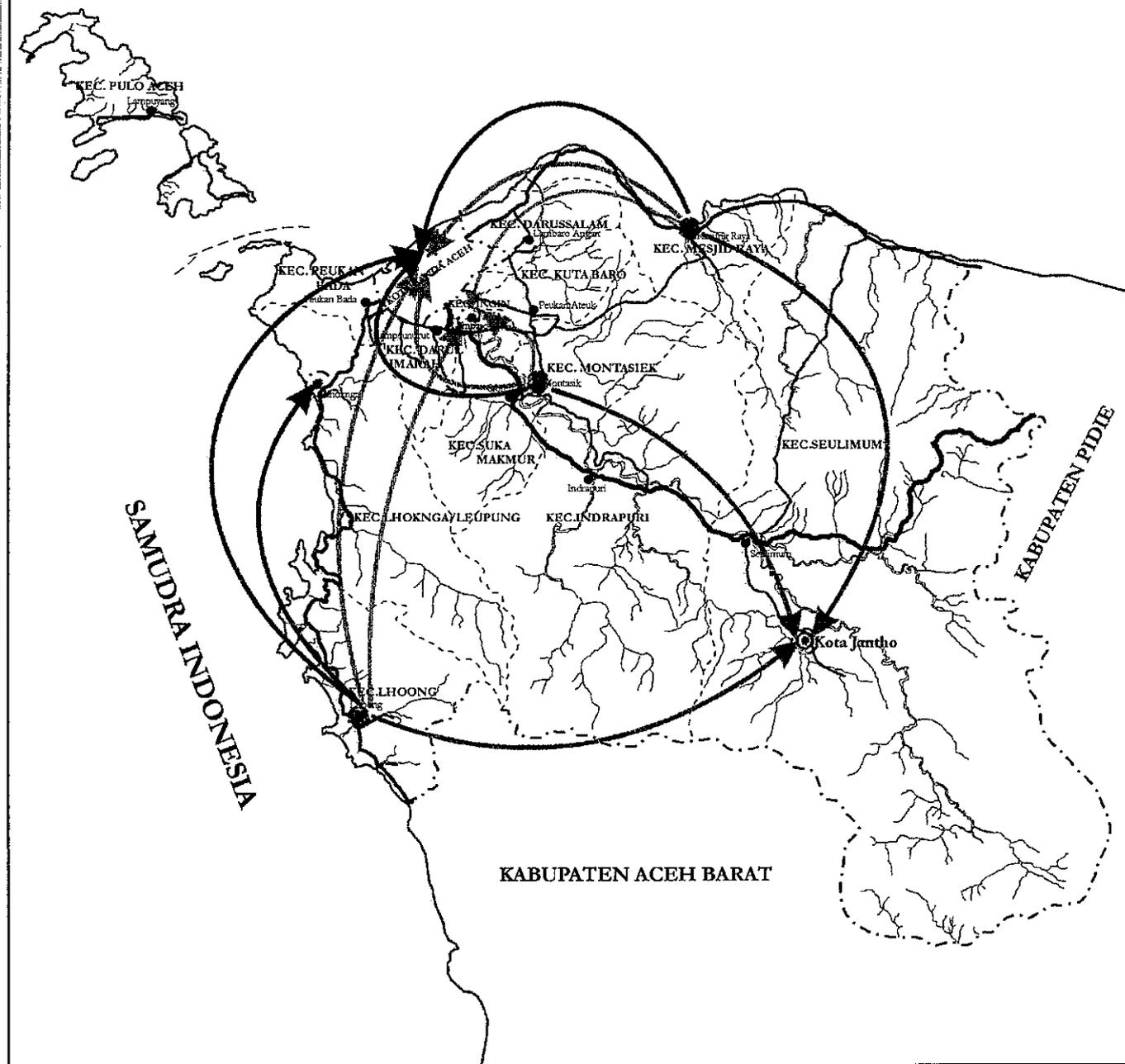
Dari hasil wawancara untuk Kecamatan Montasiek, Mesjid Raya dan Lhoong responden mempunyai pendapat yang sama yaitu "aktivitas mereka di Kota Jantho, hanya sebatas urusan perizinan dan administrasi lain yang berhubungan dengan proyek-proyek dari pemerintah, sedangkan untuk aktivitas perdagangan mereka lakukan di Lambaro, Lhoknga atau Banda Aceh". Dari hasil wawancara dapat disimpulkan aktivitas yang mereka lakukan di Jantho adalah untuk urusan: perizinan usaha (SKJTU, dll), administrasi proyek dari pemerintah, pekerjaan (jika pegawai negeri), dan perdagangan yang memang lokasi di Jantho seperti memasok barang berupa retail skala kecil, hasil pertanian di lokasi transmigrasi dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan (aktivitas organisasi, kemasyarakatan, hukum dan agama). Untuk aktivitas perdagangan lebih banyak dilakukan di Banda Aceh, seperti membeli barang kebutuhan pokok skala besar (pakaian, makanan, obat-obatan), kesehatan (rumah sakit, praktek dokter), barang-barang sekunder (motor, suku cadang, bahan bangunan), perizinan kendaraan bermotor, serta pembuatan akte notaris. Kondisi ini didukung dengan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di

Kabupaten Aceh Besar tapi melakukan usaha di Banda Aceh seperti jualan di Pasar Aceh, membuka kantor perusahaan di Luengbata dan Peunayong, bekerja di instansi swasta dan pemerintahan dan lainnya.

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, keterkaitan aktivitas di Kota Jantho dengan masyarakat Kabupaten Aceh Besar, lebih mengarah ke sektor jasa-jasa atau urusan jasa pemerintahan yang memang membutuhkan urusan dengan aparat pemerintahan, aktivitas lain hanya bersifat lokal seperti memasok kebutuhan pokok berupa retail, pembelian hasil produksi pertanian para transmigran di kawasan sekeliling Kota Jantho dan urusan organisasi kemasyarakatan. Dapat dikatakan pengaruh Kota Jantho memang tidak besar dibandingkan kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar yaitu Lambaro, Lhoknga, Lampeunluet dan bahkan pengaruh kuat dari Kota Banda Aceh masih terasa dengan dominannya masyarakat yang diwawancara melakukan aktivitas di Kota Banda Aceh.

Kota Jantho jika berdasarkan analisis, dapat disimpulkan tidak menunjukkan adanya aktivitas perekonomian yang besar di Kabupaten Aceh Besar, karena aktivitas yang berlangsung di Kota Jantho hanya sebatas aktivitas di sektor jasa-jasa terutama pelayanan urusan pemerintahan. Hal ini lebih diakibatkan adanya pengembangan fasilitas kota yang lebih mengarah ke fasilitas pemerintahan. Kota Jantho tidak dapat dikatakan sebagai pusat aktivitas ekonomi lebih dikarenakan belum adanya pengembangan aksesibilitas berupa adanya akses terdekat dari wilayah lain, tidak adanya produk unggulan yang dapat menjadi daya tarik aktivitas perdagangan dan lebih dominannya kota-kota lain sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar. Dari Peta 5.13 terlihat bahwa aktivitas masyarakat di tiga kecamatan tersebut ke Kota Jantho hanya sebatas jasa pemerintahan, sedangkan pemenuhan kebutuhan lainnya (perdagangan, perbankan, jasa sosial) lebih memilih ke Kota Banda Aceh, Lhoknga dan Lambaro.

# SELAT MALAKA



 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p> <p><b>TESIS</b></p> <p>PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR</p>	<p><b>PETA</b> <b>ARAH PERGERAKAN AKTIVITAS KABUPATEN ACEH BESAR</b> <b>KE KOTA-KOTA PUSAT PERTUMBUHAN</b></p>		<p>Sumber : <b>BAPPEDA KABUPATEN ACEH BESAR</b></p>																																											
	<p><b>LEGENDA</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Batas Perairan</td> <td></td> <td>Asal Responden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Negara</td> <td></td> <td>Tujuan Responden</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Propinsi</td> <td></td> <td>Perbankan, Perdagangan, Jasa Sosial</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> <td></td> <td>Jasa Pemerintahan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Batas Kabupaten</td> <td></td> <td>Perbankan, Perdagangan, Jasa Sosial</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sungai</td> <td></td> <td>Perdagangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kota</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ibu Kota Kecamatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ibu Kota Kabupaten</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Batas Perairan		Asal Responden		Jalan Negara		Tujuan Responden		Jalan Propinsi		Perbankan, Perdagangan, Jasa Sosial		Batas Kecamatan		Jasa Pemerintahan		Batas Kabupaten		Perbankan, Perdagangan, Jasa Sosial		Sungai		Perdagangan		Kota				Ibu Kota Kecamatan				Ibu Kota Kabupaten			<p style="text-align: center;"><b>SKALA</b></p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">NUMERIK</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">GARIS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 : 500.000</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>		NUMERIK	GARIS		1 : 500.000		
		Batas Perairan		Asal Responden																																										
		Jalan Negara		Tujuan Responden																																										
	Jalan Propinsi		Perbankan, Perdagangan, Jasa Sosial																																											
	Batas Kecamatan		Jasa Pemerintahan																																											
	Batas Kabupaten		Perbankan, Perdagangan, Jasa Sosial																																											
	Sungai		Perdagangan																																											
	Kota																																													
	Ibu Kota Kecamatan																																													
	Ibu Kota Kabupaten																																													
NUMERIK	GARIS																																													
1 : 500.000																																														
			<b>5.13</b>	<b>121</b>																																										
		UTARA	NO. PETA	HALAMAN																																										

Tahun Pembuatan :  
2003

### **5.3 Analisis Peranan Pemindahan Ibukota ke Jantho Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Aceh Besar**

Analisis ini akan mendeskripsikan hasil-hasil dari dua tahapan analisis di atas, dan dengan mencari terlebih dahulu pertumbuhan sistem kota-kota, besaran wilayah pengaruh Kota Jantho, yang kemudian melihat keterkaitan antar aktivitas ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan sub wilayahnya berupa kecamatan, dari hasil tersebut baru mendapatkan pembuktian pengaruh Kota Jantho terhadap wilayah Kabupaten Aceh Besar, sehingga hasil ini merupakan analisis penggabungan antara aspek keruangan dan ekonomi, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan hasil ini akan dibandingkan dengan analisis kualitatif dari data hasil wawancara.

Analisis pengaruh pemindahan ibukota ke Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar akan membandingkan temuan-temuan dari hasil analisis hierarki kota-kota, keterkaitan antar aktivitas ekonomi, dan analisis wilayah pengaruh Kabupaten Aceh Besar. Kemudian dari perbandingan temuan-temuan hasil analisis di atas akan dibandingkan dengan analisis kualitatif dari hasil wawancara dengan tujuan untuk mendukung kekuatan analisis ini.

Jika melihat hasil temuan dari analisis hierarki kota-kota, didapat bahwa Kota Jantho berada di bawah hierarki kota-kota lain, termasuk kota-kota yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Orde hiraki Kota Jantho pada tahun 1984 berada di hierarki III dan naik pada tahun 1991 tapi tetap berada di hierarki III pada tahun 2000, sedangkan kota lain seperti Lambaro, Seulimum dan Lhoknga berada pada hierarki II sehingga dapat dikatakan ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar, jika dibandingkan dengan Banda Aceh maka jenjang hierarki Kota Jantho sangat jauh, karena itu dapat dikatakan Kota Banda Aceh tetap menjadi pusat pertumbuhan utama secara

fungsional di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Tingkatan hierarki ini dapat mencerminkan ketertarikan penduduk untuk melakukan aktivitas di ketiga kota tersebut karena penyediaan fasilitas yang lebih lengkap dan aksesibilitas yang lebih baik. Daldjoeni (1998: 101-104) Hierarki, sebagai tingkat pelayanan dimulai dari pelayanan paling rendah di kota-kota kecil, sampai pelayanan paling besar di kota-kota besar. Adanya hierarki ini akan menunjukkan bermacam kelengkapan fasilitas, dari yang paling kecil ketersediaannya dan yang paling besar jumlah fasilitasnya.

Jika melihat jangkauan wilayah pengaruh Kota Jantho dilihat dari hasil titik henti, maka Kota Jantho hanya dapat melayani empat kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Wilayah-wilayah kecamatan yang dilayaninya tidak menjangkau wilayah kecamatan-kecamatan di pantai timur dan wilayah pantai barat karena kondisi aksesibilitas. Dari kenyataan itu, jangkauan pelayanan untuk Kota Jantho lebih bersifat melayani kecamatan-kecamatan di wilayah tengah Kabupaten Aceh Besar.

Jika melihat dari hasil keterkaitan antar aktivitas ekonomi Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Jantho, dapat dilihat hasil yang dikaitkan dari melihat LQ ada keunggulan yang sama antara LQ Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Seulimeum pada sektor pertanian, sektor bangunan konstruksi dan sektor keuangan pada tahun 1984 dan bertambah sektor jasa-jasa pada tahun 1990 dan 2000. Dengan kenyataan tersebut jika melihat tipologi ekonomi Kecamatan Seulimeum dan kondisi hierarki Kota Jantho, tidak didapat keunggulan Kota Jantho, karena aktivitas ekonomi di Kecamatan Seulimeum lebih banyak dihasilkan oleh wilayah-wilayah lain di sekitar Kota Jantho kecuali untuk sektor jasa-jasa. Keterkaitan ini hanya terlihat kuat dari sektor ekonomi jasa-jasa, ini lebih dikarenakan Kota Jantho sebagai ibukota kabupaten.

Hal ini dapat dilihat jika dibandingkan kecamatan-kecamatan lain seperti Lhoknga/Leupung, Darul Imarah, Ingin Jaya dan Peukan Bada yang kondisi persamaan tipologi ekonomi dengan tipologi Kabupaten Aceh Besar lebih banyak daripada Kecamatan Seulimum. Orde kota-kota di wilayah kecamatan tersebut lebih tinggi dari orde Kota Jantho, sehingga dapat dikatakan kota-kota tersebut lebih berpengaruh sebagai pusat pertumbuhan dibandingkan dengan Kota Jantho. Secara umum jika melihat dari hierarki tersebut di atas kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Lambaro (Ingin Jaya), Lhoknga (Lhoknga/Leupung), Peukan Bada (Peukan Bada), Lampeunerut (Darul Imarah), dan Seulimum (Seulimum) dengan didukung tipologi pada kecamatan mereka masing-masing.

Untuk mengacu pada sektor ekonomi lain selain jasa-jasa, Kota Jantho tidak bisa dianggap dapat mendistribusikan produksi atau menarik aktivitas perekonomian karena fasilitas kota hanya terbatas pada sektor pemerintahan dan perekonomian lokal, hal lain yang menyebabkan keterkaitan aktivitas ekonomi ini tidak kuat karena kondisi aksesibilitas antara Kota Jantho dengan kota-kota lain tidak kuat ditandai dengan melihat wilayah pengaruh Kota Jantho yang hanya berpengaruh sedikit di wilayah-wilayah kecamatan lain dan orde hierarki Kota Jantho yang masih dibawah orde kota lain.

Dari kenyataan diatas kota-kota lain seperti Lambaro (Kecamatan Ingin Jaya), Lhoknga (Kecamatan Lhoknga/Leupung), Peukan Bada (Kecamatan Peukan Bada) dan Lampeunerut (Kecamatan Darul Imarah), terlihat bahwa aktivitas perekonomian Kabupaten Aceh Besar lebih mengarah pada wilayah tersebut, dan dapat dipastikan kota-kota tersebut merupakan kota pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Besar, karena kondisi perekonomian wilayah dan fasilitas kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Jantho. Dengan memperhatikan perbandingan ini, tingkat pengaruh Kota Jantho terhadap

perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar tidak sebesar peranan dari kota-kota lain yang menjadi pusat pertumbuhan tadi.

Jika melihat pendapat Kostof (1992) keberadaan pusat pemerintahan dan perkembangannya selalu diiringi dengan perkembangan kota sebagai pusat perdagangan (CBD), bahkan pada beberapa kasus, pusat pemerintahan merupakan bagian dari pusat perdagangan. Hal ini disebabkan pada umumnya pusat pemerintahan dan perdagangan terletak pada satu lokasi yang memiliki keuntungan sama dan keduanya menjadi karakteristik keberadaan suatu kota, serta dikaitkan dengan teori Pusat pertumbuhan, dimana Kota sebagai pusat pertumbuhan tidak saja merupakan tempat pemusatan fasilitas namun lebih dari itu kota merupakan pemukiman yang menyediakan pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat di wilayah-wilayah belakangnya (Christaller dalam Glasson, 1990: 133).

Untuk melihat pengaruh pemindahan ibukota ke Kota Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar analisis ini juga memperhitungkan preferensi masyarakat di wilayah-wilayah kecamatan pada Kabupaten Aceh Besar dan juga wawancara terhadap aparat sebagai opini mereka terhadap ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota kabupaten. Wawancara kepada masyarakat yang kecamatannya dianggap mewakili beberapa wilayah di Kabupaten Aceh Besar yang terbagi atas tiga wilayah secara geografis. Analisis dari hasil wawancara ini merupakan analisis kualitatif yang akan mendeskripsikan suatu pembuktian pengaruh Kota Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar dari hasil analisis kuantitatif di atas, yang sifatnya lebih ke arah pendukung permasalahan penelitian.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan masyarakat di tiga kecamatan, didapat bahwa: keberadaan Kota Jantho tidak membuat pengaruh yang kuat terhadap

pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, karena secara posisi kondisinya tidak berada tepat di tengah wilayah kabupaten, sehingga pengembangan prasarana di Kota Jantho hanya untuk kebutuhan internal kota saja. Aktivitas yang terjadi di Kota Jantho sangat terbatas dalam kegiatan pemerintahan, sehingga tidak ada daya tarik untuk membuat investasi di sana dan kondisi ini tidak adanya perkembangan perekonomian di Jantho, sehingga perekonomian di Kabupaten Aceh Besar lebih terfokus di kota-kota yang lain, terutama kota yang posisinya berada di pinggiran Kota Banda Aceh.

Dari hasil wawancara dengan Yusri Yahya, Asisten I (Tata Pemerintahan) Sekdakab Aceh Besar didapat, sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan *“selain pusat administrasi pemerintahan telah berjalan optimal, Kota Jantho akan dikembangkan sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Aceh Besar, masyarakat Aceh Besar dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi memang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, terlebih dengan adanya konflik”*. *“Untuk kondisi aksesibilitas ke Kota Jantho semua jurusan baik ke wilayah barat maupun wilayah timur sudah baik, dengan jarak tempuh memadai, hal ini dapat dilihat misalnya dari Jantho ke Lhoong paling lama jarak tempuh sekitar 2 jam”* untuk posisi geografis *“kondisi geografis Kota Jantho tidak begitu bermasalah, apalagi ditunjang dengan prasarana jalan yang baik, walaupun sarana angkutan umum masih terbatas”*.

Dari hasil wawancara dengan Muzhar, Kepala Bidang PP III Bappedakab Aceh Besar didapat mengenai perkembangan Kota Jantho *“Kota Jantho secara fisik ada perkembangan, jika dilihat dari jumlah fasilitas yang ada, tapi jika dilihat dari segi perekonomian tidak menguntungkan karena jauh dari jalan raya”* mengenai peranan Jantho sebagai Ibukota *“sebagai pusat administrasi pemerintahan Jantho sudah optimal”* dan mengenai pusat pertumbuhan *“jika melihat dari pusat pertumbuhan cenderung tidak*

*berkembang*". Mengenai aktivitas ekonomi dan sosial, aksesibilitas dan Kondisi geografis *"aktivitas masyarakat di Kota Jantho tidak menunjukkan aktivitas yang tinggi, dengan kondisi aksesibilitas sangat sulit dijangkau dan letak geografis kurang strategis"*. Mengenai pengaruh terhadap pertumbuhan Kabupaten Aceh Besar *"kurang berperan karena kondisi akses ke Jantho sulit, prasarana pendukung pertumbuhan tidak ada dan tidak mempunyai komoditi andalan yang bisa diekspor"*.

Dari hasil wawancara dengan Syamsuddin, Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Besar didapat mengenai perkembangan Kota Jantho *"Kondisi Ibukota Jantho saat ini kurang efektif karena tidak dilintasi jalur utama jalan lintas propinsi dan berada jauh di daerah perbukitan, jika dilihat dari segi perekonomian perkembangannya belum terlalu meningkat untuk pemanfaatan masyarakat, disebabkan oleh karena areal pertanian terbatas dan tidak ada kegiatan industri"* mengenai peranan Jantho sebagai Ibukota *"sebagai pusat administrasi pemerintahan Jantho sudah maksimal karena para pekerja sudah tinggal di Kota Jantho"* dan mengenai pusat pertumbuhan *"jika melihat sebagai pusat pertumbuhan tidak seperti harapan karena aktivitas diluar pemerintahan tidak mendukung"*. Mengenai aktivitas ekonomi dan sosial, aksesibilitas dan Kondisi geografis *"masyarakat Kabupaten Aceh Besar di kota Jantho dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial kurang terlihat signifikan karena kecilnya volume perdagangan di pasar dan kurangnya pelayanan sosial seperti kebutuhan tenaga medis. Jika melihat kondisi aksesibilitas maka masyarakat di pantai timur dan barat mendapatkan kesulitan karena harus melalui jalan memutar dulu"*. Mengenai pengaruh terhadap pertumbuhan Kabupaten Aceh Besar *"Kurang berperan karena kondisi tidak didukung prasarana infrastruktur, letak yang tidak strategis, tidak adanya industri, serta kurangnya aktivitas perdagangan"*.

Kesimpulan hasil wawancara dengan responden sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Kota Jantho dari tahun 1984 hingga sekarang kondisinya tidak ada perubahan yang besar.
2. Peranan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sudah optimal
3. Peranan sebagai pusat pertumbuhan tidak optimal
4. Aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat Kabupaten Aceh Besar di Kota Jantho tidak terlihat besar karena tidak didukung sarana dan prasarananya
5. Kondisi aksesibilitas sangat terbatas, karena letak geografis lebih jauh dari kecamatan-kecamatan yang berada di pantai timur dan barat
6. Pengaruh terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar tidak maksimal terlihat kurangnya aktivitas lain selain aktivitas administrasi pemerintahan

Dengan pernyataan-pernyataan di atas dan temuan dari hasil analisis hierarki kota, perekonomian dan wilayah pengaruh, bisa diambil pendapat bahwa Kota Jantho hanya berfungsi sebagai kota pusat administrasi pemerintahan dan tidak maksimal sebagai pusat pertumbuhan karena fungsi pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Aceh Besar lebih didominasi kota-kota lain seperti Lambaro, Lhoknga, Seulimum, Peukan Bada dan Lampeuneurut, bahkan secara fungsional Kota Banda Aceh masih berperan sebagai pusat pertumbuhan utama di Kabupaten Aceh Besar. Jika mengacu pada konsep bahwa pusat pemerintahan akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan akan memenuhi kebutuhan terhadap wilayah di belakangnya, maka Kota Jantho tidak bisa dikatakan kota pusat administrasi pemerintahan yang secara otomatis menjadi pusat pertumbuhan karena kecilnya pengaruh terhadap wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Hal lainnya yang patut menjadi pertimbangan adalah keberadaan konflik multi dimensional yang terjadi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang semula hanya terjadi di tiga kabupaten, tapi mulai tahun 1999 sudah menjalar hampir ke seluruh propinsi,

termasuk Kabupaten Aceh Besar. Hal ini tentu saja akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan dan perkembangan Kota Jantho pada khususnya dan Aceh Besar pada umumnya. Jantho sebagai ibukota kabupaten tentu saja memiliki nilai politis yang strategis untuk dijadikan sebagai sasaran konflik, hal ini karena keberadaan aktivitas pemerintahan. Adanya pengaruh konflik terhadap aktivitas pemerintahan, aktivitas perekonomian dan aktivitas lainnya di Kota Jantho, terjadi akibat gangguan keamanan berupa: kontak senjata, teror, pengrusakan fasilitas umum dan lainnya.

Berdasarkan kondisi di atas dapat dilihat bahwa keberadaan Kota Jantho sudah cukup efektif sebagai pusat pemerintahan kondisi ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Aceh Besar memang harus melakukan urusan administrasi pemerintahan di Kota Jantho, hal ini karena Jantho merupakan Ibukota kabupaten Aceh Besar. Sedangkan jika dilihat fungsinya sebagai pusat pertumbuhan wilayah, Kota Jantho masih kurang dapat memerankan fungsi tersebut, kondisi ini terutama disebabkan oleh :

1. Letak Kota Jantho disatu sisi memang kurang tepat dalam arti berada di wilayah selatan Kabupaten Aceh Besar pertumbuhannya relatif kurang maju jika dibandingkan dengan wilayah utara Kabupaten Aceh Besar, serta jauh dari pusat aktivitas masyarakat karena kondisi aksesibilitas dan letak geografisnya. Tetapi jika dilihat lebih seksama pemilihan Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan tentunya ditujukan untuk lebih mengembangkan wilayah selatan Kabupaten Aceh Besar, karena di bagian utara wilayah Kabupaten Aceh Besar pertumbuhannya relatif sudah lebih bagus dikarenakan lokasinya yang dekat dengan Kota Banda Aceh.
2. Pertumbuhan aktivitas jasa-jasa pemerintahan di wilayah Kota Jantho ternyata tidak cukup untuk dapat menarik penduduk terutama investasi ke wilayah Jantho, hal ini dikarenakan aksesibilitas Jantho masih sangat rendah, terutama keberadaan

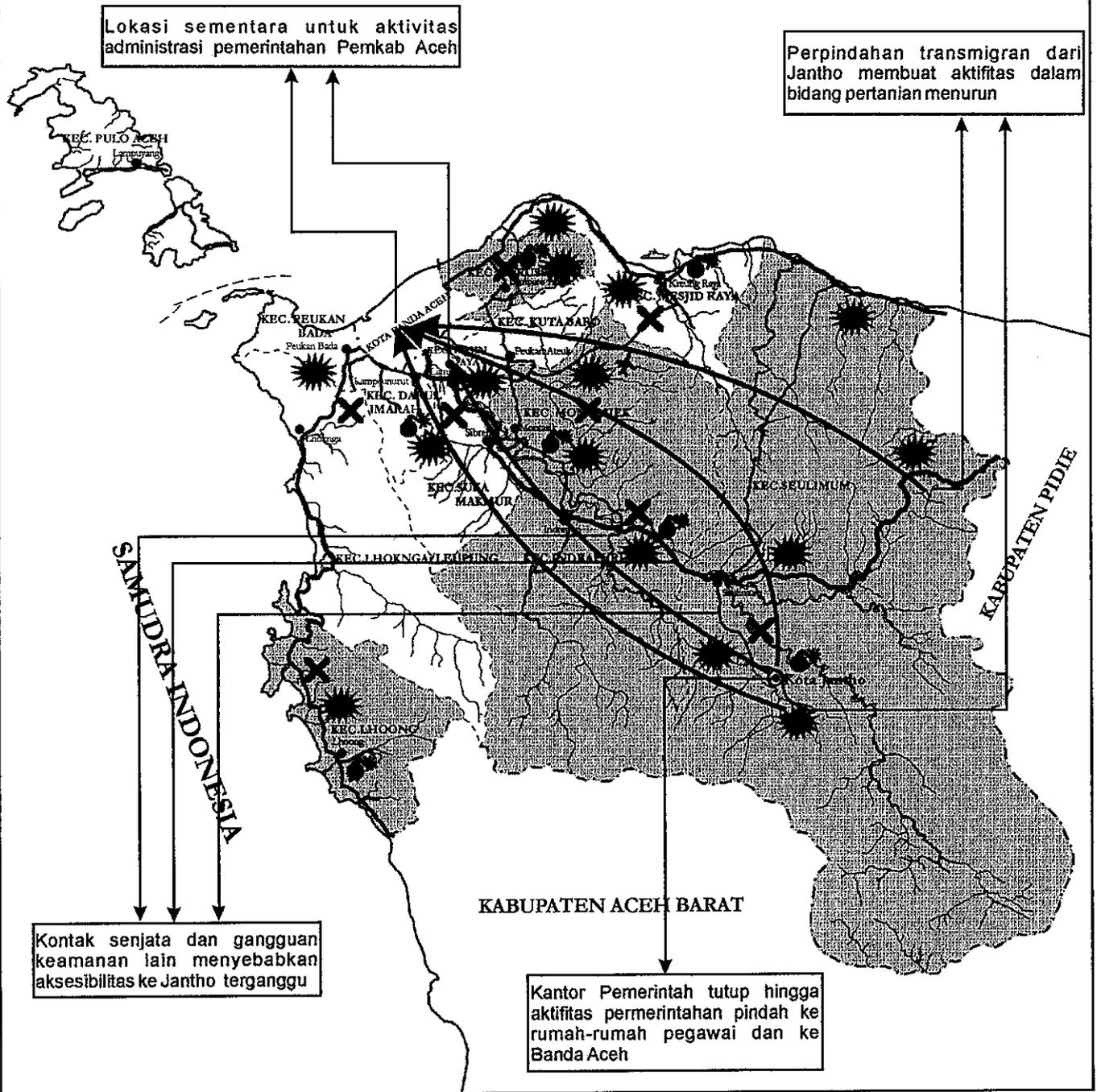
jaringan jalan yang menghubungkan Jantho dengan kota-kota kecamatan lainnya di wilayah Aceh Besar serta keberadaan sarana transportasi umum. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dengan lingkup pelayanan regional ini tentu saja akan sangat terkait bagi fungsi penghubung antara pusat pertumbuhan (Jantho) dengan daerah-daerah belakangnya. Sehingga dengan keberadaan sarana dan prasarana ini selain dapat lebih mempermudah mobilitas masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi daya tarik masuknya investasi di Kota Jantho.

3. Penambahan fasilitas yang ada hanya merupakan fasilitas-fasilitas dengan tingkat pelayanan kecamatan (kecuali fasilitas pemerintahan) hal ini tentu saja kurang menarik bagi masyarakat karena tingkat kelengkapan dan kualitasnya sama dengan fasilitas yang ada di kota – kota kecamatan lainnya.
4. Kurangnya aktivitas-aktivitas perekonomian yang sifatnya strategis yang dapat menarik investasi maupun tenaga kerja, hal ini terlihat dari data-data PDRB Kecamatan Seulimeum dimana sektor-sektor yang sifatnya strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, angkutan dan komunikasi bukan merupakan sektor basis.
5. Keberadaan konflik di wilayah Kabupaten Aceh Besar secara umum memberikan dampak yang cukup berarti. Karena sebagai ibukota Kabupaten, kota Jantho secara politis memiliki nilai strategis yang tinggi bagi pemerintah, sehingga wilayah ini cukup rawan terhadap terjadinya konflik. Konflik pada awal tahun 1999 hingga akhir tahun 2000 membuat keadaan kondisi keamanan di kabupaten Aceh Besar tidak kondusif, sehingga membuat terganggunya aktivitas ekonomi, sosial dan aktivitas lainnya bagi penduduk Aceh Besar. Keadaan ini juga mempengaruhi aktivitas administrasi pemerintahan dan aktivitas lainnya di Kota Jantho, hal ini

disebabkan jalur antara Jantho menuju kota-kota yang lain melewati lokasi kontak senjata dan lokasi gangguan keamanan lainnya.

Dengan kondisi konflik pada waktu itu, aktivitas administrasi pemerintahan menjadi vakum di Kota Jantho dan kegiatannya pindah ke rumah pegawai, Kota Banda Aceh dan ke Lambaro, hal ini ditandai dengan tutupnya kantor-kantor pemerintahan di Kota Jantho. Aktivitas lain yang berlangsung di Jantho, seperti aktivitas pertanian dan peternakan dari kegiatan bercocok tanam/beternak hingga menjual produksi pertanian skala kecil yang dilakukan oleh para transmigran di Desa Jantho Baru juga terkena dampak. Aktivitas di bidang pertanian terganggu akibat teror terhadap petani, hingga menyebabkan sebagian dari mereka melakukan eksodus ke luar Aceh atau sekedar pindah sementara ke Banda Aceh.

# SELAT MALAKA



 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<b>PETA</b> <b>KONDISI YANG TERJADI AKIBAT KONFLIK TAHUN 1999-2000</b>		Sumber : Dari Berbagai Sumber		
	<b>LEGENDA</b>		<b>SKALA</b>		
	Batas Perairan Jalan Negara Jalan Propinsi Batas Kecamatan Batas Kabupaten Sungai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kabupaten	Wilayah Kondisi Konflik Tinggi Wilayah Kondisi Konflik Sedang Wilayah Kondisi Konflik Rendah Wilayah Tidak Ada Konflik Arus Pengungsian Warga Arah Pemindahan Aktivitas Administrasi Pemerintahan Lokasi Kontak Senjata Lokasi Pencegatan/Perampokan/Penculikan Lokasi Pengrusakan Fasilitas Umum	NUMERIK 1 : 500.000	GARIS 	
	<b>TESIS</b> PERANAN PENETAPAN JANTHO SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR			<b>5.14</b>	<b>132</b>
		TAHUN PEMBUATAN : 2003		UTARA      NO. PETA      HALAMAN	

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kota Jantho dalam perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar belum terlihat besar, hal ini karena hierarki yang masih dibawah kota lain dan jangkauan wilayah pengaruh yang kecil. Terjadi peningkatan orde hierarki Kota Jantho jika dilihat dari tahun 1984 hingga tahun 2000, peningkatan ini dapat dilihat dari perubahan hierarki kota yang berarti terjadinya penambahan jumlah fasilitas pelayanan di dalam Kota Jantho. Walaupun begitu peningkatan hierarki Kota Jantho masih tetap berada di bawah hierarki kota lain di wilayah Kabupaten Aceh Besar, dikarenakan kondisi sebagai kota orde III dan IV diperkuat dengan jangkauan wilayah pengaruh yang relatif tidak melayani semua wilayah di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dari perkembangan kota-kota di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh menjadi dominan sebagai kota berorde I, ini karena skala pelayanan kota lebih tinggi dibandingkan Kota Jantho, karena kelengkapan fasilitas yang mempunyai skala pelayanan tingkat propinsi. Sedangkan kota-kota lainnya di wilayah Aceh Besar yaitu Lhoknga, Peukan Bada, Lambaro Angan, Lambaro, memiliki hierarki yang lebih tinggi dari Kota Jantho. Hal ini disebabkan, tingkat aksesibilitas yang bagus dan letaknya yang strategis berada di sekitar wilayah Kota Banda Aceh.
2. Dalam perkembangannya keberadaan Kota Jantho pada tahun 1984 hanya berpengaruh dalam sektor jasa-jasa, dengan perbandingan keterkaitan aktivitas ekonomi antara Kota Jantho dan Kabupaten Aceh Besar, aktivitas masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang

berlangsung di Kota Jantho sebatas urusan administrasi pemerintahan, sedangkan aktivitas lainnya tidak begitu menonjol. Sedangkan jika dilihat dari sektor basis di Kabupaten Aceh Besar sektor pertanian lebih mendominasi PDRB, walaupun nilai LQ lebih kecil dari sektor-sektor basis lainnya seperti sektor industri pengolahan, sektor bangunan konstruksi, sektor listrik gas dan air bersih, sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, sektor angkutan dan sektor keuangan. Untuk Kecamatan Seulimum sektor basis pada tahun 1980 hanya ada tiga sektor dan empat sektor pada tahun 1990 dan 2000 dengan penambahan sektor jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keberadaan pengaruh Kota Jantho pada tahun tersebut, karena aktivitas pemerintahan mulai berpusat di kota tersebut. Untuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Aceh Besar seperti Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Lhoknga/Leupung, Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Peukan Bada sektor basis lebih banyak dibandingkan dengan Kecamatan Seulimum. Sedangkan jika dilihat dari hierarki/orde Kota Lhoknga, Lambaro, Peukan Bada, Lampeuneurut, dan Seulimum mempunyai hierarki lebih tinggi dari Kota Jantho. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Kota Jantho mempunyai wilayah pengaruh yang kecil di wilayah Kabupaten Aceh Besar, sehingga dapat dikatakan aktivitas dominan yang terjadi di Kota Jantho dalam konteks aktivitas di Kabupaten Aceh Besar hanyalah sebatas aktivitas pemerintahan, sedangkan aktivitas non pemerintahan lebih didominasi oleh kota-kota lainnya.

3. Walaupun hierarki Kota Jantho terus meningkat semenjak tahun 1991, tetapi wilayah pengaruhnya tidak dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, sehingga dapat dikatakan Kota Jantho masih kurang pengaruhnya dibandingkan kota-kota lain di wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan hanya melayani wilayah tengah Kabupaten Aceh Besar saja. Hal ini karena pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh

Besar terjadi di kota Lambaro, Lhoknga, Peukan Bada dan Darul Imarah. Hal lain yang didapat dari aktivitas masyarakat, bahwa banyak aktivitas perekonomian di Kabupaten Aceh Besar masih berlangsung di Kota Banda Aceh yang memberikan layanan fasilitas kota yang lebih baik. Sedangkan Kota Jantho sendiri secara umum hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan.

4. Beberapa hal yang menyebabkan fungsi Kota Jantho sebagai pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Aceh Besar terutama disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi regional Kota Jantho dengan wilayah sekitarnya. Kondisi ini tentu saja akan menghambat dinamika aktivitas yang terjadi, penambahan fasilitas di Kota Jantho tentu saja hanya dapat dimanfaatkan masyarakat lokal, karena akses pemanfaatan masyarakat di sekitarnya masih sangat kurang. Kondisi ini terutama dapat dilihat dari keberadaan jaringan jalan utama yang menghubungkan Jantho dengan wilayah sekitarnya jumlahnya sangat terbatas. Selain itu keberadaan transportasi umum yang menghubungkan Jantho dengan wilayah sekitarnya juga masih sangat terbatas.
5. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Jantho kurang layak sebagai pusat pertumbuhan kota dengan beberapa keterbatasan seperti yang telah diuraikan di atas. Sehingga diperlukan investasi yang cukup besar untuk menjadikan Jantho sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Aceh Besar.

## **6.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil temuan analisis pengaruh Kota Jantho terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar, didapat hal-hal yang bisa merekomendasikan sebagai berikut:

1. Perlunya pengembangan sarana dan prasarana transportasi antara lain angkutan umum dan penambahan dan peningkatan jaringan jalan, karena kondisi aksesibilitas menuju Kota Jantho masih kurang optimal. Dengan kondisi jaringan jalan yang hanya satu

akses menuju Jantho, sebaiknya ada pembukaan jalan lain. Diperlukan adanya tambahan jaringan sebagai akses menuju wilayah kecamatan lain, terutama ke arah Barat dan Timur, sehingga jalan menuju Kota Jantho tidak hanya dari akses yang sekarang. Penambahan angkutan umum regional akan dapat mempermudah akses masyarakat di luar Jantho untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Jantho.

2. Untuk mendorong penanaman investasi di Kota Jantho perlunya peran pemerintah Kabupaten Aceh Besar, terutama menciptakan lapangan–lapangan kerja baru yang dapat menarik investor dan masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini terutama menyediakan sarana, prasarana, infrastruktur pendukung serta tentu saja iklim yang kondusif untuk melakukan investasi. Sehingga diharapkan nantinya Kota Jantho paling tidak dapat menjadi pusat pertumbuhan Kabupaten Aceh Besar bagian Selatan.
3. Perlu dilakukan studi kelayakan ulang terhadap Penetapan Kota Jantho sebagai pusat pertumbuhan dan Ibukota Kabupaten Aceh Besar. Terutama dilihat dari lokasi Kota Jantho pada posisi yang kurang tepat, sehingga berakibat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menjadikannya layak sebagai pusat pertumbuhan Kabupaten Aceh Besar, seperti yang diharapkan pada awal penetapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alkadri (ed). 1999. *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Edisi Pertama, Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah-BPPT.
- Aninomous. 1979. *Guidelines for Rural Centre Planning*. New York: Economic and Social Commission fo Asia and the Pasific, United Nations.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta.: Cetakan Keduabelas, Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFU-UGM.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Cetakan Ketiga, PT. Ghalia Indonesia.
- Bourne, L. S and Simmons, J. W. 1978. *Systems Of City: readings on structure, growth, and policy*. New York : Oxford University Press.
- Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Brannen, Julia (ed). 2002. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Alumni Bandung.
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Cooke, Philip. 1983. *Theory of Planning and Spatial Development*. London: Hutchinson and Co. Publisher LTD.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. London : Sage Publications.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Penerbit Alumni ITB.
- Eisner, Simon, et al. 1993. *The Urban Pattern*. New York : Sixth Edition, Van Nostrand Reinhold.
- Friedman, John and Clyde Weaver. 1979. *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. London : Edward Arnold Publisher Ltd.

- Gallion, Arthur B. dan Simon Eisner. 1992. *Pengantar Perancangan Kota: Desain dan Perencanaan Kota*. Jilid Satu. Jakarta: Edisi Kelima, Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Pengantar Perancangan Kota: Desain dan Perencanaan Kota*. Jilid Dua. Jakarta: Edisi Kelima, Penerbit Erlangga.
- Glasson, John. 1983. *An Introduction Regional Planning*. London: Second Edition, Hutchinson and Co. (Publisher) Ltd.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta : Lembaga Penerbit UI.
- Golany, Gideon. 1976. *New Town Planning: Principles and Practice*. New York : John Wiley and Sons Publications.
- Isard, Walter. 1976. *Methods of Regional Analisis: an Introduction to Regional Sciene*. Massachusset: The MIT Press.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Lahan Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : Penerbit ITB, Bandung.
- Kostof, Spiro.1992. *The City Assembled: The Elements of Urban From Trough History*. London : Thames and Hudson Ltd.
- Linch, Kevin and Gary Hack. 1984. *Site Planning*. Massachusset: Third Edition, The MIT Press.
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory In Underdeveloped Regions*. Duckworth, London.
- Nasir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia.
- Parr, J. B. 1973. *Growth Poles, Regional Development and Central Place Theory*. Carfax Publishing.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Growth Poles Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View*. Carfax Publishing.
- Perloff, HS, ES Dunn, EE Lampard and RF Muth. 1960. *Region, Resources and Economics Growth*. Baltimore: Resources of The Future Inc. John Hopkins Press.
- Potter, Robert B. and Sally Lloyd-Evans. 1998. *The City In The Developing World*. Essex: Addison Wesley Longman Limited.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Terjemahan Paul Sihotang. Jakarta : Lembaga Penerbit UI.

- Rodinelli, D. A and K Ruddle. 1978. *Urbanization and Rural Development: A Spatial Policy for Equitable Growth*. New York: Praeger Publisher.
- Rodinelli, D. A. 1985. *Applied Methods of Regional Analisis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. New York: Westview Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Cetakan Kedua, LP3ES.
- Sujarto, Joko. 1989. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*. Bandung: Departemen Planologi ITB.
- Taufiq A, Tuhana. 2000. *Aceh Bergolak Dulu Dan Kini*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Cetakan Ke-19, PT. Toko Gunung Agung.
- Warpani, Suwardjoko. 1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

#### **Desertasi, Thesis, Skripsi**

- Ardi, Iwan Aminto. 1998. "*Studi Evaluasi Lokasi Pusat Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Damayanti, Maya. 1999. "*Peran Semarang Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Wilayah Tengah Indonesia*". Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Neonufa, Sulihan N.I. 1999. "*Identifikasi Dampak Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Ke Sulamu Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Kupang*". Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sitorus, Delmon Prengki . 2002. "*Studi Dampak Pengembangan Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD) Terhadap Wilayah Pengaruhnya Di Kabupaten Tangerang*". Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sodikin, Djuang Fadjar. 2002. *Pengaruh Kota Cirebon Terhadap Daerah Belakangnya Di Kabupaten Cirebon*. Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.

### **Buku-Buku Kelompok Terbitan Terbatas**

Aninymous. 1994. *Development Issue In Indonesia*. Semarang : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Ma'arif, Samsul. 2000. *Pengertian Dasar dan Esensi Pengembangan Wilayah*. Semarang : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

North, DC. 1955. *Location Theory and Regional Economic Growth*. Journal of Political Economy.

### **Jurnal, Media Informasi Umum dan Internet**

Kompas .Kolom Otonomi Daerah. Jakarata, 14 Juni 2002

Kompas .NUDS. Jakarta 9, Desember 1999.

Juoro, Umar. 1995. *Peranan Peningkatan Prasarana dalam Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Majalah Kajian Strategi Pembangunan PSDPU, Jakarta, Tahun 1995 / Vol.14 / Desember.

National Urban Development Strategy. 2003. Tersedia di alamat : [www.google\\\_NUDS.hmt](http://www.google\_NUDS.hmt).

Sujarto. 1993. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No.9. Bandung.

### **Peraturan dan Buku-Buku Data**

Aninymous. 1985. *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 1984*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar, dan Badan Pusat Statistik Aceh Besar.

Aninymous. 1986. *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 1985*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar, dan Badan Pusat Statistik Aceh Besar.

Aninymous. 1991. *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 1990*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar, dan Badan Pusat Statistik Aceh Besar.

Aninymous. 1996. *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 1995*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar, dan Badan Pusat Statistik Aceh Besar.

Aninymous. 2001. *Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2000*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar, dan Badan Pusat Statistik Aceh Besar.

Aninymous. 2001. *Aceh Dalam Angka Tahun 2000*. Banda Aceh: Bappeda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Badan Pusat Statistik Aceh.

- Aninymous. 2001. *Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2000*, Banda Aceh. Banda Aceh: Bappeda Kota Banda Aceh dan Badan Pusat Statistik Banda Aceh.
- Aninymous. 2001. *Monografi Kota Tahun 2000*. Banda Aceh: Bappeda Kota Banda Aceh
- Aninymous. 1981. *Karakteristik Penduduk Propinsi D. I. Aceh Darussalam SP 1980*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Aninymous. 1981. *PDRB Propinsi D.I. Aceh dan Kabupaten Kota Tahun 1980*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Aninymous. 1991. *PDRB Propinsi D. I. Aceh dan Kabupaten Kota Tahun 1990*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Aninymous. 2001. *PDRB Propinsi D. I. Aceh dan Kabupaten Kota Tahun 2000*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik.
- Aninymous. 1979. *Peraturan Pemerintah No.35, 1979, Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Ke Kemukiman Janthoi Di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Aninymous. 1978. *Rencana Detail Induk Kota Jantho*. Banda Aceh: Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II Aceh Besar.
- Aninymous. 1993. *Rencana Detail Tata Ruang Kota Jantho*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar.
- Aninymous. 1998. *Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*. Kota Jantho: Bappeda Kabupaten Aceh Besar.
- Aninymous. 1992. *UU No.24, 1992, Tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.